

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN AKADEMIK DIUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
Ita Mafrohati
NIM. 6661110398

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Januari 2016**

ABSTRAK

Ita Mafrohati. NIM. 6661110398. Skripsi. Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Rahmawati., M.Si dan Pembimbing II: Anis Fuad., M.Si

Untirta merupakan salah satu perguruan tinggi di Banten yang telah menerapkan *e-government*, namun fakta yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa penerapan *e-governemnt* tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Untirta. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirta, diambil berdasarkan teknik *sampling* jenuh. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit, terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*. Kesimpulan penilaian hasil penelitian penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Untirta dapat dikategorikan baik, yakni mencapai angka sebesar 77,48% dari angka minimal yang dihipotesiskan sebesar 75%. Saran peneliti untuk penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Untirta diharapkan adanya peningkatan pembaharuan informasi, serta perlu adanya penambahan kapasitas jaringan dan *bandwith*, penambahan sumber daya manusia yang berlatar belakang bidang TI, Untirta membuat kebijakan sendiri dalam bidang pemanfaatan fitur dan item-item pada menu layanan yang tersedia, adanya penambahan komputer dan ruang kerja yang memadai, tingkatkan frekuensi pelatihan dan pengembangan kompetensi sehingga Untirta menjadi lebih maju dan dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.

Kata Kunci : Penerapan, *Electronic Government*

ABSTRACT

Ita Mafrohati. NIM. 6661110398. Thesis. Implementation of e-Government In Academic Services at the University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Rahmawati., M.Si and Supervisor II: Anis Fuad., M.Si

Untirta is one of the colleges in Banten that have implemented e-government , but the facts found in the field suggests that implementation of e-governemnt has not been carried out effectively and efficiently. The purpose of this study to determine the application of e-government in the academic services at Untirta. The method used is quantitative descriptive approach. The study population is all employees of Information and Communication Technology (ICT) in Untirta , taken by saturation sampling technique. Collecting data through questionnaires, observations and interviews. This study uses the theory of Booz Allen and Hamilton in Indrajit, there are five dimensions of e-government in the Balanced Scorecard as a performance measurement tool of government to implement e-government. Conclusion The assessment of the results of research in the application of e-government services can be categorized academic Untirta well, reaching a figure of 77.48% of the minimum hypothesized by 75%. Suggestions researchers for the implementation of e-government in the academic services at Untirta expected an increase updating information, as well as the need for additional network capacity and bandwidth, additional human resources background in IT, Untirta make its own policy in the field of utilization of features and item on menu of services available, the addition of a computer and adequate workspace, increase the frequency of training and competency development so Untirta become more advanced and can improve the service even better.

Keywords: Application, Electronic Government

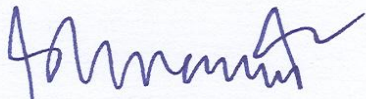
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Judul : **PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN
AKADEMIK DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA**

Serang, 18 Januari 2016
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197905252005012001

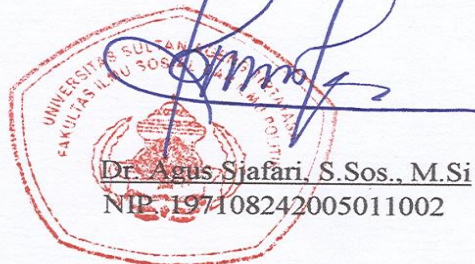
Dosen Pembimbing II



Anis Fuad, S.Sos., M.Si
NIP. 198009082006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ita Mafrohati

NIM : 6661110398

Tempat tanggal lahir : Serang, 06 Januari 1992

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA* adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Januari 2016



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ITA MAFROHATI
NIM : 6661110398
Judul Skripsi : **PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN
AKADEMIK DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA**

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang di Serang, tanggal 18 Januari 2016
dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 18 Januari 2016

Ketua Sidang 1

Nama : Listyaningsih, M.Si
NIP : 197603292003122001

Anggota 2

Nama : Ipah Ema Jumiati, M.Si
NIP : 197501312005012004

Anggota 3

Nama : Anis Fuad, M.Si
NIP : 198009082006041002

Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta



Dr. Agus Sjaafari, S.Sos., M.Si.
NIP: 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih, M.Si
NIP: 197603292003122001

Man Jadda Wajada

(Siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil)

Wama al-illadzatu illa ba'da at-ta'abi

(Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah)

Dengan Rasa Syukur kepada Allah SWT,

Kupersembahkan karya ku ini untuk

Kedua Orang Tuaku (Asmari,S.Pdi., dan Jumanti), Nenek dan kakekku, Kakak-kakak Ku (Hadari, Hajali, Sarwati, Samturi, Agus Attoullah, S.Pdi., Linda Lidiawati, S.Pdi.,Humaedi,S.Pdi., Atu Rostu Maria, Jasmani), dan Keluarga Besar, serta untuk yang selalu memberikanku motivasi dan dukungan (Ali Rohman, S.Sy) dan Sahabat-sahabatku Yang Tulus Mencintaidan Menyayangiku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur secara total peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya terutama dalam memberikan ketabahan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muahammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kita semua sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Disamping itu, salam Takzim penulis kepada kedua orang tua penulis yang selalu sabar dan memberikandoa, dukungan, semangat serta yang selalu tulus mencintai dan menyayangi penulis tanpa henti.

Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan judul "Penerapan *E-government* Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)". Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu mendukung secara moriil dan materil. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pilitik Universitas Sultan Ageng Tirtaayasa dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Rahmawati, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Dosen Pembimbing I dalam

penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.

4. Iman Mukhroman, M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto N, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ima Maesaroh, M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Anis Fuad, M.Si., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. H. Muhammad Adha Ilhami, ST., MT., dan Seluruh Pegawai Pusat dan Data (Pusdainfo) Untirta serta Kepala Bagian (Kabag) yang telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirtayang telah memberikan data dan informasi yang bermanfaat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua Orang Tuatersayang, Ibu Jumanti dan Bapak Asmari, S.Pdi., Terimakasih tak terhingga atas dukungan, doa, semangat, nasehat dan kerja keras untuk peneliti dalam menempuh pendidikan ini.
13. Kakakku tersayang, Agus Athoullloh, S.Pdi., dan Linda Lidiawati, S.Pdi., Terimakasih atas semangat, doa, dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tak pernah henti untuk peneliti.

14. Nenek dan Kakekku, Ibu Rakhmah dan Bapak Saiman. Terimakasih tak terhingga atas semangat, nasehat, doa dan dukungan baik secara moriil maupunmateril.
15. Kakakku Atu Rostu Maria dan Sarwati. S.Pdi.,Terimakasih atas doa,dukungan dan motivasi selama ini.
16. Kakakku Ismatulloh, S.Sos., Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi selama ini.
17. Ali Rohman, S,Sy., Tersayang dan tercinta yang selalu mendampingi peneliti dan yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan selama peneliti melakukan penelitian ini
18. Sahabat-sahabatku tersayang dan tercinta. Ayu Fitri Lestari, Anita, Nella Hani Rossa, Rizki Parhani, Fitri Maliani N, Dita Marsela Sufitri, Nurul Fitri S, Ika Dewi Safitri, Metta Miftahul J, Resty Nani Yustini. Teman-teman kelas A, B, C Reguler 2011 dan Non-Reguler terimakasih telah menjadi motivasi bagi penulis selama melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis sebagai penyusun menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan dari apa yang peneliti coba paparkan dan uraikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dan juga kelapangan dada, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membangun penulis dalam melangkah dan membuat karya yang lebih baik lagi untuk dapat bermanfaat lagi dikemudian hari.

Serang, Januari 2016

Ita Mafroahti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	14

1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Definisi <i>Electronic Government</i>	16
2.1.2 Tujuan <i>E-government</i>	23
2.1.3 Manfaat <i>E-government</i>	26
2.1.4 Mengukur Kinerja <i>E-government</i>	28
2.1.5 Manfaat <i>E-government</i> Di Perguruan Tinggi	32
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	36
2.4 Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	40
3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian	40
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Variabel Penelitian	41
3.4.1 Definisi Konsep	41
3.4.2 Definisi Operasional	42
3.5 Instrumen Penelitian	44

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian	49
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
3.8 Jadwal Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	55
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik	59
4.3 Deskripsi Data	64
4.4 Pengujian Hipotesis	121
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian	124
4.6 Pembahasan	125
BAB V PENUTUP	132
5.1 Simpulan	132
5.2 Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Seluruh Pegawai Information and Communication Technology (ICT) yang berada di Untirta	8
Tabel	3.1	Operasional Variabel	45
Tabel	3.2	Skor dalam Penelitian	47
Tabel	3.3	Jadwal Penelitian	54
Tabel	4.1	Hasil Uji Validitas Intrumen	61
Tabel	4.2	Hasil Uji Reliabilitas	63
Tabel	4.3	Reability Statistics	63

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 4.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
GRAFIK 4.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia	65
GRAFIK 4.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	66
GRAFIK 4.4	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 1	68
GRAFIK 4.5	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 2	70
GRAFIK 4.6	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 3	71
GRAFIK 4.7	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 4	73
GRAFIK 4.8	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 5	74
GRAFIK 4.9	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 7	75
GRAFIK 4.10	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 8	77
GRAFIK 4.11	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 9	78
GRAFIK 4.12	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 10	79
GRAFIK 4.13	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 11	80
GRAFIK 4.14	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 12	82
GRAFIK 4.15	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 14	83
GRAFIK 4.16	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 15	84
GRAFIK 4.17	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 16	86
GRAFIK 4.18	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 17	87
GRAFIK 4.19	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 18	89
GRAFIK 4.20	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 19	90
GRAFIK 4.21	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 20	92
GRAFIK 4.22	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 21	93
GRAFIK 4.23	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 22	94
GRAFIK 4.24	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 24	95
GRAFIK 4.25	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 26	97
GRAFIK 4.26	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 27	98
GRAFIK 4.27	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 28	99
GRAFIK 4.28	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 29	100
GRAFIK 4.29	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 30	102

GRAFIK 4.30	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 31	103
GRAFIK 4.31	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 32	104
GRAFIK 4.32	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 33	106
GRAFIK 4.33	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 34	107
GRAFIK 4.34	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 35	108
GRAFIK 4.35	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 36	109
GRAFIK 4.36	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 37	111
GRAFIK 4.37	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 38	112
GRAFIK 4.38	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 39	113
GRAFIK 4.39	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 40	115
GRAFIK 4.40	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 41	116
GRAFIK 4.41	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 42	118
GRAFIK 4.42	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 43	119
GRAFIK 4.43	Jawaban Responden Terhadap Pernyataan No 44	120
GRAFIK 4.44	Tingkat Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Akademik Di Untirta Berdasarkan Teori Booz Allen Dan Hamilton Dalam Indrajit	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Untirta	59
Gambar 4.2	Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis Uji Hipotesis Pihak Kanan	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini terjadi. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum akibat sedemikian cepat dan akuratnya informasi mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain.

Seperti layaknya dua sisi mata uang, fenomena globalisasi menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik; namun di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya *chaos* jika perubahan ini tidak dikelola dan dijalani secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem

yang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global, bukan sebaliknya.

Dengan kata lain, jelas bahwa peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak dapat pula dilepaskan dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan trend hubungan antar negara dan antar anggota masyarakatnya di era-era mendatang.

Adanya desakan dari negara-negara besar bahwa untuk dapat bergaul secara baik di dalam era global negara yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal semacam demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, maka terlihat secara tidak langsung tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya pun menjadi berubah. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya (terutama mereka yang harus melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti misalnya berbisnis di dalam sebuah pasar terbuka dan perdagangan bebas), lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan, lebih baik dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas, lebih menyadari berbagai perubahan mendasar yang harus dipahami dan dilakukan untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, dan lain sebagainya.

Jika dahulu sebuah pemerintahan terkenal dengan birokrasinya, yang sangat lambat, boros dan sangat fungsional, maka masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif bagi para customernya (individu, komunitas bisnis, masyarakat, dan stakeholder yang lain). Tentu saja merubah paradigma tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Namun di sisi lain, perubahan merupakan suatu keharusan bukan pilihan. Dan bagi siapa yang dapat melakukan perubahan secara cepat, akan semakin diuntungkan karena selain beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang bersangkutan dapat menjadi pemain kunci dalam mekanisme global tersebut.

Pada saat inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Karena pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta kebijakannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok untuk diterapkan di sini adalah teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tersebut telah membawa perubahan yang sangat dahsyat pada peradapan umat manusia, dimana hanya dengan termenung di depan komputer pada tempat yang sepi nan sempit, kita dapat membuka cakrawala dunia yang sangat luas (*a universe exists behind the computer screen*). Dunia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, dari kejauhan yang beribu-ribu kilometer jauhnya kita bisa mengungkapkan perkataan, menyampaikan senyuman dan dapat

menyalurkan sentuhan lewat tombol-tombol yang ada dalam komputer (*we can chat without speaking, smile without grinning; hug without touching*), (Indrajit, 2006: ix). Dengan demikian segala aktivitas atau pekerjaan tersebut dapat kita lakukan dengan lebih cepat dan mudah, terutama jika aktivitas atau pekerjaan tersebut bersentuhan dengan pelayanan publik, maka keefektifan dan keefisienan tersebut merupakan suatu keharusan dan tuntutan yang harus dipenuhi keberadannya.

Oleh karenanya untuk mewujudkan semua itu, maka pemerintah mendukung perubahan tersebut untuk menuju kearah yang lebih maju dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan teknologi informasi di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No. 06/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (*Telekomunikasi, Media, dan Informatika*) di Indonesia yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan percepatan proses demokrasi. Selain itu juga dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*, menyebutkan bahwa *e-government* tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronika dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan pula akan dapat memacu kemajuan negara Indonesia itu sendiri, melihat pada tuntutan masyarakat moderen kini yang mengharuskan pemerintah memiliki waktu response yang cepat terhadap berbagai permintaan atau kebutuhan

khalayak. Dengan kata lain, mereka (masyarakat) tidak peduli bagaimana pemerintah mengorganisasikan dirinya, namun yang penting adalah bahwa semua proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diberikan secara baik, cepat, dan murah.

Berkaitan dengan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi negeri di Banten, dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia telah menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan akademik, memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa dan dosen serta agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Teknologi informasi yang digunakan Untirta berupa penerapan *e-government*. Dalam hal ini, basis *online/ internet* yang digunakan Untirta dalam rangka membantu penyelenggaraan *e-government* tersebut agar dapat berjalan secara baik dan lancar antara lain sistem informasi akademik (SIKAD), sistem akademik registrasi, sistem informasi mahasiswa baru, sistem informasi Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), sistem pendaftaran wisuda, sistem informasi administrasi akademik, sistem informasi repository dan sistem informasi jurnal elektronik. Basis *online/ internet* yang digunakan Untirta tersebut telah diterapkan dalam *website* untirta yang dapat diakses melalui www.untirta.ac.id. Dalam *website* Untirta tersebut menaungi seluruh unit situs *website* yang berada di Untirta, diantaranya adalah untuk unit pelaksana yang terdiri dari unit Pusdainfo yang dapat diakses melalui www.untirta.ac.id/statis-13-pusdainfo.html. Untuk mengetahui unit

Perpustakaan Untirta dapat diakses melalui untirta.ac.id/statis-14-perpustakaan.html. Selain itu, situs lembaga *website* yang berada dibawah naungan *website* Untirta adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), yang informasinya dapat diakses melalui Lppm.untirta.ac.id dan situs lembaga yang lainnya adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang dapat diakses melalui lp3m.untirta.ac.id. Sedangkan situs *website* yang berada dalam naungan *website* Untirta dalam bidang akademik, diantaranya meliputi: Fakultas dan jurusan, yang didalamnya terdapat semua fakultas dan jurusan di Untirta, yakni untuk FKIP dapat diakses melalui fkip.untirta.ac.id. Fakultas Hukum dapat diakses melalui fh.untirta.ac.id. Sementara itu untuk Fakultas Teknik dapat diakses melalui ft-untirta.ac.id dan untuk Fakultas Pertanian melalui pertanian.untirta.ac.id, untuk Fakultas Ekonomi melalui fe.untirta.ac.id/web serta untuk Fakultas Fisip melalui fisip-untirta.ac.id. Sementara itu untuk Pascasarjana dapat diakses melalui Pasca.untirta.ac.id.

Penerapan *e-government* di Untirta tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang dapat diharapkan untuk memberikan pelayanan secara prima serta memberikan keterbukaan informasi yang bermanfaat bagi para civitas akademik Untirta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Akan tetapi fakta yang ditemukan peneliti pada observasi dan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terkait, penerapan *e-government* di Untirta tersebut belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan *e-government*. Hal

tersebut karena terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi, diantaranya:

Pertama, Kurang maksimalnya pembaharuan informasi yang dilakukan oleh mayoritas unit yang berada di Untirta. Hal tersebut terlihat dari mayoritas *status website* pada setiap unit yang berada di Untirta dalam memberikan informasi belum dilakukan *updating data* (sumber: hasil observasi *website*, pada 05 Agustus 2015). Dimana informasi yang diberikan oleh mayoritas unit yang berada di Untirta tersebut masih memberikan informasi yang lama, sedangkan informasi terbaru yang seharusnya cepat untuk diinformasikan atau dipublikasikan telat diinformasikan atau dipublikasikan, hal ini dapat menyebabkan masyarakat telat mendapatkan informasi terbaru tersebut. Padahal dengan adanya pembaharuan informasi yang cepat tersebut dapat membantu masyarakat untuk dapat mendapatkan informasi terbaru atau informasi yang dibutuhkan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pembaharuan informasi yang diberikan oleh mayoritas unit yang berada di Untirta adalah karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Berdasarkan data dan informasi yang peneliti temukan di lapangan, sumber daya manusia yang tersedia saat ini berjumlah 40 orang pegawai yang terdiri dari seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT)
yang berada di Untirta

No	Nama	Jumlah
1	Fakultas Hukum	2
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1
3	Fakultas Teknik	1
4	Fakultas Pertanian	5
5	Fakultas Ekonomi	1
6	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1
7	Pasca Sarjana	6
8	Humas	2
9	Pusat Data dan Informasi (Pusdainfo)	14
10	LPPM	2
11	LP3M	2
12	Perpustakaan	3
Total		40

Sumber: Peneliti 2015

Berdasarkan pada uraian tersebut, sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih kurang dari yang seharusnya, hal ini dapat terlihat dari pegawai pusat data dan informasi (Pusdainfo) yang merupakan pusatnya data dan informasi yang ada di Untirta sendiri hanya berjumlah 14 orang pegawai dari yang seharusnya dapat berjumlah mencapai 25 orang pegawai. Selain itu juga untuk masalah

sumber daya manusia tersebut juga dirasakan oleh beberapa unit yang lainnya seperti Fakultas Teknik yang saat ini berjumlah 1 orang pegawai dari yang seharusnya 3 orang pegawai. Kekurangan akan sumber daya manusia tersebut dapat mengakibatkan hasil kinerja yang kurang maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya penggandaan tugas dan beban kerja yang tinggi pada setiap pegawai. Oleh karena itu, permasalahan sumber daya manusia tersebut akan dapat menghambat berjalannya penerapan *e-government* dengan lancar, hal tersebut mengingat akan pentingnya kinerja pegawai tersebut sebagai salah satu kunci dari keberhasilan penerapan *e-government* pada suatu lembaga atau yang lainnya.

Kedua, sistem jaringan yang sering mengalami gangguan pada beberapa cakupan layanan yang tersedia. Dalam hal ini pada sistem informasi akademik Portal yang seringkali tidak bisa dibuka dan sistem informasi akademik (SIKAD) *Online*, seperti pada awal-awal menjelang pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan untuk melihat Kartu Hasil Studi (KHS) yang seringkali mengalami gangguan, yakni terjadi kerancuan pada jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau kerancuan pada padadaftar Mata Kuliah (MK) yang akan dikontrak oleh mahasiswa yang seharusnya mata kuliah tersebut dapat dikontrak. Selain itu juga terjadi gangguan pada sistem informasi Kuliah Kerja Mahasiswa(KKM). Dimana seringkali mahasiswa yang telah mengisi biodata tidak bisa langsung mencetak dan terkadang biodata yang telah diisi tersebut menjadi hilang. Berbagai permasalahan

tersebut disebabkan oleh kuota atau kapasitas *bandwith*, kecepatan dan koneksi jaringan yang terbatas serta banyaknya mahasiswa yang mengakses cakupan layanan tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan dengan keterbatasan *bandwith* yang tersedia adalah waktu untuk masa pengisian KRS dan KHS. Dimana mahasiswa tersebut hanya dapat melakukan pengisian KRS dan KHS sesuai jadwal berdasarkan fakultas masing-masing yang telah ditentukan. Sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut harus menunggu jadwal sesuai fakultas masing-masing dan tidak dapat melakukan pengisian KRS dan KHS pada waktu yang lain atau waktu yang diinginkan sendiri.

Selain itu juga dampak yang tengah dirasakan dengan kurangnya *bandwith* adalah berpengaruh terhadap kualitas proses dan akses, seperti untuk *upload* dan *download* yang menjadi lambat. Dalam hal ini menurut informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, untuk saat ini *bandwith* yang tersedia adalah 120 Mb untuk tingkat universitas. Salah satu unit yang merasa kurang akan *bandwith* yang tersedia saat ini adalah oleh pusat data dan informasi (Pusdainfo) yang kini mempunyai kuantitas *bandwith* sebesar 4Mb dari yang harusnya dapat mencapai 10 Mb .

Ketiga, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, padahal dalam suatu instansi pemerintah/ organisasi sumber daya manusia

merupakan faktor penting dalam menerapkan *e-government*, hal tersebut karena sumber daya manusia tersebut salah satu yang akan menentukan keberhasilan dari penerapan *e-government*. Oleh karena itu berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan untuk sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih tidak sesuai dengan latar belakang pegawai secara keseluruhan, dalam hal ini khususnya untuk sumber daya manusia yang berlatar belakang pada pendidikan teknologi informasi secara khusus (sumber: hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Pusat Data dan Informasi (Pusdainfo) sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pusdainfo, dan salah seorang pegawai Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai Pengadministrasi Umum).

Keempat, tidak dimanfaatkannya fitur dan item-item terkait menu layanan secara maksimal, baik dibidang akademik, kemahasiswaan dan humas. Dalam hal ini, fitur dan item-item yang dimaksudkan adalah menu layanan seperti forum diskusi, menu informasi pengumuman (akademik, beasiswa dan *workshop*, menu *mesaggin*/pesan, serta menu virtual class (materi kuliah, pengumuman, tugas kuliah, diskusi *online*, agenda kelas, agenda pribadi *file sharing* dan referensi. Berdasarkan pada fakta yang ditemukan peneliti melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terkait, kurangnya akan pemanfaatan fitur dan item-item terkait menu layanan yang tersedia tersebut dikarenakan untuk bidang

akademik sendiri lebih mengedepankan pertemuan secara langsung dibandingkan dengan menggunakan fasilitas berbasis *online* tersebut.

Kelima, tidak memadainya infrastruktur yang tersedia. Dalam hal ini dimaksudkan pada sarana dan prasarana, seperti komputer dan ruangan/gedung. Padahal sarana dan prasarana tersebut merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang pelayanan secara prima dan untuk memberikan kenyamanan kepada penyedia layanan dan pengguna layanan. Dengan tidak memadainya sarana dan prasarana yang tersedia akan dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti para pegawai yang bekerja dalam satu ruangan yang masih tergabung dengan arsip-arsip atau yang lainnya, sehingga menyebabkan para pegawai menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, kekurangan akan sarana dan prasarana tersebut akan berdampak pada hasil kinerja yang kurang maksimal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka dalam kesempatan kali ini peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai **“Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi yang dilakukan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian. Berikut adalah identifikasi tentang **Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:**

1. Kurang maksimalnya pembaharuan informasi yang dilakukan oleh mayoritas unit yang berada di Untirta.
2. Sistem jaringan yang sering mengalami gangguan pada beberapa cakupan layanan yang tersedia.
3. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian.
4. Tidak dimanfaatkannya fitur dan item-item terkait menu layanan secara maksimal
5. Tidak memadainya infrastruktur yang tersedia. Dalam hal ini dimaksudkan pada sarana dan prasarana, seperti komputer dan ruangan/gedung.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada ruang lingkup permasalahan yaitu Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah berapa besar Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan, serta mengembangkan teori-teori yang telah ada.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara mendalam

mengenai Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi penulis.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian serta masukan secara praktis oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Untirta agar dapat meningkatkan penerapan *e-Government* menjadi lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi *Electronic Government*

Istilah *e-Government* mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, maka konsep *e-Government* akan mengandung arti bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “*customernya*”nya.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) dalam Indrajit (2002:2), mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government”. (*E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah (seperti *Wide Area Networks (WAN)*, *Internet*, dan *Mobile Computing*) hal tersebut mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lembaga pemerintah lainnya).

Wibisono dan Sulistyarningsih (2002:15), mendefinisikan *e- government* sebagai berikut:

“E-government is the used of ICT by e-government in its administration processes and its service delivery. E-government refers to the use of ICT, Such as network, the internet, and mobile computing, b government agencies to improve their service. “(E-goverment digunakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses administrasi dan penghantar jasa. E-government menghubungkan informasi dan komunikasi, seperti jaringan, internet, dan komputerisasi, melalui pemerintah untuk meningkatkan jasa pelayanan).

Lebih lanjut, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP dalam Indrajit (2002:3) memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:

“E-Govermentis a global reform movement to promote Internet use by government agencies and everyone who deals with them”. (E-Goverment adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pemerintah dan pihak yang terkait lainnya).

Sementara itu, Bhanti, dkk (2011:1) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut:

“E-government refers to the use of information and communication technology to carry out government operations such as delivering government information and services”. (E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan operasi pemerintah seperti memberikan informasi dan layanan pemerintah).

Pemerintah *New Zealand* di pihak lain dalam Andrianto (2007:46), mendeskripsikan *e-government* sebagai berikut:

“E-government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes”.

Janet Caldw, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Harvard University, dalam Indrajit (2002:3), memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu:

“Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era”.

Sementara itu, UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam Indrajit (2002:2), mendefinisikan *e-government* secara lebih sederhana, yaitu:

“E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”. (*E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) oleh pihak pemerintahan).

Pemerintah Federal Amerika Serikat, dalam Andrianto (2007:46) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

“E-Government refers to the the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means”. (*e-Government* mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan *online* pemerintah melalui internet atau media digital lainnya).

Sementara, Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, dalam Indrajit (2002:3), mendefinisikan *e-Government* sebagai:

- (1) *Online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access;*
- (2) *Government operations for internal constituencies that simplify the operational demands of government for both agencies and employees.*

Sementara itu, Shrivastava, dkk (2014:1), mengatakan bahwa *E-Government* adalah sebagai berikut:

“E-Government can transform citizen service, provide access to information to empower citizens, enable their participation in government and enhance citizen economic and social opportunities, so that they can make better lives, for themselves and for the next generation”. (*E-Government* dapat mengubah layanan masyarakat, menyediakan akses ke informasi untuk memberdayakan warga, memungkinkan partisipasi mereka dalam pemerintahan dan meningkatkan peluang warga ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat membuat hidup lebih baik, bagi dirinya dan bagi generasi berikutnya).

Melengkapi kiat-kiat diatas, menurut Accenture (2001:8-9) dalam Djunaedi (2005:7), ada lima karakteristik *e-Government* yang unggul, yaitu :

1. Visi dan implementasi: mempunyai visi sejak awal dan mekanisme implementasi yang baik/tepat.
2. Berorientasi kepada pengguna/warga masyarakat: pada umumnya diawal pengembangan *e-government*, informasi dipublikasikan yang disusun dan diorganisasikan dengan mempertimbangkan cara pemerintah bekerja dan memberikan layanan secara fisik. Pada *e-Government* yang unggul, layanan kepada publik atau warga masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan kemauan dan cara berfikir lembaga pemerintah. Dalam berkomunikasi dengan pemerintah lewat *e-government*, Masyarakat tidak perlu tahu struktur organisasi dan tata laksana pemerintah. Missal: untuk aplikasi-aplikasi lainnya (tidak perlu instansi yang mengurusnya lalu mengklik tombol instansi tersebut).
3. Menggunakan manajemen hubungan masyarakat (*customer relationship management/CRM*). Humas pemerintah bergeser fungsinya bagaikan humas dalam perusahaan jasa dengan menggunakan teknik-teknik manajemen informasi pengguna jasa,

pemasaran, meminimalkan duplikasi informasi dan pembuatan profil perilaku pengguna jasa dalam rangka memprediksi kebutuhan dimasa depan;

4. Volume dan kompleksitas/kerumitan: mampu menangani volume informasi yang besar dengan kompleksitas tinggi (tapi masih nyaman dan nampak sederhana namun tidak rumit bagi pengguna);
5. Penggunaan portal sebagai satu pintu masuk: memudahkan pengguna/warga masyarakat dengan tidak perlu mengunjungi situs tiap instansi, cukup satu situs sebagai pintu masuk (portal) untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

Selain itu, menurut Indrajit (2005:18-19) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan *e-Government* masing-masing diantaranya :

- 1) *Content Development*, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan *user interface*, dan lain sebagainya;
- 2) *Competency Building*, menyangkut pengadaan SDM pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia diberbagai lini pemerintahan;
- 3) *Connectivity*, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi dilokasi *e-Government* diterapkan;
- 4) *Cyber Laws*, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktifitas *e-Government*;
- 5) *Citizen Interfaces*, menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (*multi akses chanel*) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-Government* dimana saja dan kapan saja mereka inginkan;
- 6) *Capital*, menyangkut permodalan proyek *e-Government* terutama yang berkaitan dengan biaya setelah selesai proyek dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis pendanaan (*venue modal*) yang mungkin untuk diterapkan di pemerintah.

Sementara itu, menurut Indrajit (2002:41-45), terdapat empat konsep yang berlaku di dalam *e-government*, yaitu:

1. *Government to Citizens*
Dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
2. *Government to Business*
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. *Government to Government*
Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diploma semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama.
4. *Government to Employees*
Pada akhirnya, aplikasi *e-government* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Sedangkan kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* Kementerian Komunikasi dan Informasi (2002:17), pencapaian tujuan strategis *e-Government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta jangkauan oleh masyarakat luas;
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik;
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat;
6. Melaksanakan pengembangan secara sistemik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Washtenaw County dalam Indrajit (2005:65-67), membagi berbagai inisiatif *e-government* yang ada menjadi tiga tahapan besar, yaitu:

1. *E-information*, konsep ini terkait dengan obyek bagaimana agar seluruh *stakeholder* pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat di satu sisi dapat menyediakan dan di sisi lain mengakses informasi secara cepat dan tepat melalui berbagai kanal akses. Program pembangunan aplikasi *e-government* dalam tahap ini biasanya dimulai dengan membangun *website* yang berisi informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seyogyanya merupakan tugas pemerintah untuk menyediakannya. Dengan adanya *website* diharapkan masyarakat dapat secara mandiri mencari data dan informasi yang dibutuhkannya, sekaligus memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif antara mereka dengan pihak pemerintah yang membangun *website* tersebut.
2. *E-Commerce*, di mana konsep pelayanan yang ada tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah melibatkan sejumlah proses transaksi pertukaran barang dan/ jasa. Masyarakat yang selama ini perlu mendatangi kantor-kantor pemerintahan secara fisik untuk berbagai proses perijinan dan berbagai pembayaran, seperti; membuat KTP, SIM, dan penyeteroran pajak bumi dan bangunan.
3. *E-Democracy*, di mana terjadi suatu lingkungan yang kondusif bagi pemerintah, wakil rakyat, partai politik, dan konstituennya untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkooperasi melalui sejumlah proses interaksi melalui media internet. Dalam kaitan ini masyarakat dapat menyampaikan penilaian dan pandangannya terhadap kinerja pemerintah dan menyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para wakil rakyat secara *online* dengan menggunakan fasilitas semacam *email*, *mailing list*, *discussion/forum*, *chatting*, dan *polling*.

Ketiga fase ini perlu dijalankan prosesnya satu per satu secara sekuensial karena memang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase berikutnya. Dengan kata lain dikatakan bahwa sulit untuk menjalankan kedua jika fase pertama tidak dibangun terlebih dahulu. Fase tersebut tentu saja adalah fase ketiga, dimana dibutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi informasi yang

kuat, tetapi juga dibutuhkan perubahan kultur yang besar dimasyarakat (suprastruktur).

Berdasarkan berbagai definisi *e-Government* diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang berupa interaksi baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka menjalin hubungan, baik dengan warga negara, pelaku bisnis, atau lembaga-lembaga pemerintahan yang lain.

2.1.2 Tujuan *E-Government*

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government*, *e-government* tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronika dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Sedangkan Indrajit (2005:157), secara umum penerapan *e-Government* di berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik;
3. Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat;
4. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

Sementara itu, Setiawati (2007:7) mengungkapkan bahwa tujuan dari penerapan *e-Government* adalah sebagai berikut:

“Konsep *e-Government* diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini perlu mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus menyesuaikan fungsinya dalam Negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankannya kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintah itu sendiri dimana salah satunya adalah melalui *e-Government*. Selain itu tujuan dari penerapan *e-Government* adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Indrajit (2002:9), konsep *e-Government* ini berkembang di atas tiga kecenderungan, yaitu:

1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan dari mana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (*non-stop*);
2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (*multiple channels*), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; dan
3. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

Menurut Indrajit (2005:107), implementasi *e-Government* tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perubahan pada strategi sumber daya pegawai dan aset negara lainnya. Untuk mencapai itu semua, manajemen perubahan membutuhkan beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh untuk menopang implementasi *e-Government*, yaitu:

1. *Business Process Reengineering* adalah mengisyaratkan untuk mereview secara total proses kerja yang sekarang ini berjalan. *E-Government* tidak boleh hanya sekedar membuat alternatif akses untuk pelayanan pemerintah, karena hal itu berarti justru menambah biaya. Lebih dari itu, *e-Government* adalah proses kerja baru di mana layanan pemerintah terintegrasi dalam sistem yang lebih baik. Perubahan karena itu juga tidak hanya sekedar penampilan di sisi akses masyarakat, tetapi juga pada proses kerja secara keseluruhan yang perlu di-review secara reguler;
2. Staf dan pegawai memerlukan cara kerja baru, di mana memungkinkan terbentuknya “kantor virtual” di antara mereka. Kantor virtual adalah kondisi di mana setiap staf bisa mengerjakan segala sesuatunya dari manapun ia berada tanpa perlu berkantor setiap hari. Pemimpin dituntut untuk mengubah pendekatan kepemimpinannya dengan menjadikan performa dan hasil kerja sebagai dasar penilaian seseorang, dan bukan lagi pada kehadiran. Tentu saja hal ini membutuhkan manajemen perubahan yang terencana dengan baik;
3. Fasilitas yang memungkinkan staf dan pegawai bekerja dari rumah dan kerja jarak jauh. Melalui penggunaan fasilitas teknologi dan internet, seorang staf bisa mengerjakan hampir seluruh proses pelayanan masyarakat tanpa perlu datang ke kantor;
4. Untuk mencapai semua itu tentu saja dibutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai bagi semua pegawai. Pendidikan dan pelatihan adalah cara terbaik bagaimana menyiapkan pegawai untuk bisa bekerja ketika saatnya *e-Government* diimplementasikan.

Menurut Nugroho (2007:42) tahapan perkembangan implementasi *e-Government* di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu :

1. *Web Presence* (memunculkan *website* daerah di internet, dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam *website* pemerintah);
2. *Interaction* (*website* daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antar masyarakat dan pemerintah daerah, dalam tahap ini informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas *download* dan komunikasi dari pelayanan publik dari pemerintah);
3. *Transaction* (*website* daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah);
4. *Transformation* (dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat dengan secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, sektor swasta).

Karena penerapan *e-Government* membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaannya memerlukan strategi yang terkelola dengan baik. Secara internal, *e-Government* perlu didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang kuat, dan secara eksternal perlu partisipasi dari masyarakat secara penuh. Adapun beberapa strategi kesuksesan implementasi *e-government* menurut Indrajit (2005: 84-85) adalah sebagaimana berikut:

1. Membangun kepercayaan publik yang dilakukan dengan hal, yaitu: *Privacy*, masalah keamanan data dan prinsip otentifikasi dengan memberikan password dan *personal identification number* (PIN);
2. Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya: pertama, kerjasama dengan pihak-pihak swasta, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kedua, kerjasama dengan berbagai departemen dan organisasi pemerintah untuk menjamin bahwa standar yang mereka bangun bisa saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Ketiga, kerjasama pembangunan sistem informasi secara nasional. Hal ini terkait dengan program *e-government* secara nasional;
3. Penerapan *e-Government* harus terpusat pada kepentingan pelanggan;
4. Membangun kapasitas organisasi agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Ada dua point penting dalam hal ini: *pertama*, penyediaan infrastruktur yang memadai, yang dalam hal ini infrastruktur telekomunikasi, hukum, dan juga sistem aplikasi. Adanya infrastruktur yang kuat akan menjadi dasar untuk memudahkan proses implementasi lebih lanjut. *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya staf dengan mengadakan berbagai pelatihan dan meningkatkan kemampuan mereka.

2.1.3 Manfaat E-Government

Menurut Indrajit (2005:4), Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan *e-Government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya;

2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan;
3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;
4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, dan lain sebagainya.

Sedangkan Al Gore dan Toni Blair dalam (Adrianto, 2007:46-47), secara bersemangat menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya *e-Government* ini ialah :

1. Memberikan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan usahawan dan industri) terutama dalam kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai kehidupan Negara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*;
3. Menguras secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan *stakeholder*-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada;
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (kebijakan publik) secara merata dan demokratis.

Sementara itu, menurut Kementrian KomunikasidanInformasi (2002:14),pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari seluruh aspek sebagai berikut :

1. *E-Ledership*, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif Negara didalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi;
2. Infrastruktur jaringan dan infromasi, aspek ini berkaitan dengan aspek infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup biaya, dan biaya jasa akses.

3. Pengelolaan informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.
4. Lingkungan bisnis, aplikasi ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antar pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antar badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
5. Masyarakat dan sumber daya manusia, aspek ini berkaitan dengan aspek difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

2.1.4 Mengukur Kinerja *E-Government*

Untuk membangun *e-Government* sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:47-48), menyarankan 8 (delapan) strategi *e-Government*:

1. Perencanaan strategi secara keseluruhan. Kombinasikan antara perencanaan dari sisi strategis dan detail operasionalnya di lapangan. Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya;
2. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana;
3. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang;
4. Perbandingan pelaksanaan *e-government* secara internasional. Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses adaptasi dan penyesuaian perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi secara lokal;
5. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena *e-government* akan melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, standarisasi menjadi faktor dan memungkinkan adanya pertukaran data;
6. Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa *e-government* membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. Oleh karena itu pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakannya;

7. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan ada insentif yang diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan *e-government* di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak akan mempunyai manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. *e-Government* adalah proses yang sangat besar yang membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan program *e-Government* tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait secara teknis perlu dilakukan.

Menurut Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detail. Kelima dimensi itu adalah:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah:
 - a. Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan;
 - b. Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam *one stop shop* dari satu portal menuju berbagai layanan;
 - c. Kemudahan pengguna dalam mendapatkan layanan tersebut.
2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Kriteria dalam efisiensi, diantaranya:
 - a. Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan database yang bisa berjalan dengan baik ketika dibutuhkan;
 - b. Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik;
 - c. Pemanfaatan platform teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek.
 - d. Kualitas dan ruang lingkup bagi para staf dan pegawai.
3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya:
 - a. Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web;
 - b. Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat;
 - c. Pengaruh dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan;

- d. Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas *chattig*, forum, dan, milis).
- 4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini ,mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transparansi, di antaranya:
 - a. Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain);
 - b. Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak;
 - c. *Topicality of information*.
- 5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya:
 - a. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain;
 - b. Kualitas kontrol dan *review*;
 - c. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.

Menurut Indrajit (2005:8-9), terdapat sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan *e-Government*, yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-Government*;
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah, dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-Government*;
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah, yang akan menjadi “pemain utama” atau subek di dalam inisiatif *e-Government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *e-Government*;
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran, sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *e-Government* yang akan diterapkan, hal itu membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya;
5. Perangkat Hukum, karena konsep *e-Government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke

pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, misalnya, akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

6. Perubahan Paradigma, pada hakekatnya penerapan *e-Government* merupakan suatu proyek *changemanagement* yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dengan cara berfikir.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi sejumlah praktisi *e-Government* di berbagai negara dalam Indrajit (2002:19), secara pokok ada 3 (tiga) tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep *e-Government* di negaranya masing-masing, yaitu:

1. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
2. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur *e-Government* yang dibutuhkan; dan
3. Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan *e-Government* ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Di samping itu, menurut Indrajit (2005:24) standar ukuran dampak aplikasi *e-Government*, yaitu:

1. Persentase jumlah pelanggan yang menggunakan *e-Government* dibandingkan dengan aktivitas terdahulu;
2. Jumlah “kunjungan” atau akses terhadap aplikasi *e-Government* melalui internet sehari-harinya;
3. Besarnya pengurangan biaya yang terjadi baik di kalangan institusi pemerintahan maupun yang harus ditanggung oleh masyarakat atau penikmat/pengguna/pemakai pelayanan yang diberikan pemerintah;
4. Peningkatan ragam produk atau jasa baru dari pemerintah yang disediakan bagi komunitas masyarakatnya;
5. Kemudahan dalam “mengkonsumsi” pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya; dan lain sebagainya.

Adapun menurut Sosiawan (2007:9-10), menjelaskan tentang beberapa rekomendasi alternatif untuk memecahkan permasalahan hambatan-hambatan dalam implementasi *e-government*, yaitu:

1. Untuk memecahkan hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan situs website pemerintah daerah maka pemerintah pusat perlu membuat *master plan* dan *grand strategy e-government* yang dituangkan dalam Undang-Undang atau peraturan Pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka.
2. Untuk memecahkan hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
3. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, maka diperlukan suatu kerja sama dengan pihak swasta khususnya *provider* ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak.
4. Untuk mengatasi belum meratanya *literacy* masyarakat tentang penggunaan *e-government*, maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan beberapa tahap, yaitu sosialisasi kepada pimpinan lembaga pemerintah, memberikan penekanan dalam sosialisasi *e-government* di kalangan para pimpinanfaat tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan ITC dalam tata pemerintahan, dan memberikan *brand awareness* kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam *e-government*.

2.1.5 Manfaat *E-Government* Di Perguruan Tinggi

Manfaat *E-Government* menurut Kapoor, Ranjeeta dan Nishtha Kelkar (2013:2) sebagai berikut:

1. *Benefit to university* (Manfaat bagi universitas)
 - a. *Centralized information access from anywhere* (akses informasi terpusat dari mana saja);
 - b. *Increase in student enrollment ratio* (peningkatan rasio pendaftaran siswa);
 - c. *Provide quality e-services, e-participation* (menyediakan layanan elektronik yang berkualitas, partisipasi elektronik);
 - d. *Increase transparency* (meningkatkan transparansi);
 - e. *Innovative teaching tools* (alat pengajaran yang inovatif);
 - f. *Improved decision making, Private Public Participation* (peningkatan pengambilan keputusan, partisipasi publik swasta);

- g. *Less corruption, less paper work*(Kurang korupsi, kurang pekerjaan tulis menulis).
2. *Benefits to students* (Manfaat bagi siswa)
 - h. *Increase participation in education affairs*(meningkatkan partisipasi dalam urusan pendidikan);
 - i. *Personalized login for each students* (login pribadi untuk setiap siswa);
 - j. *Substantial saving in time cost & efforts*(penghematan substansial dalam biaya waktu & usaha);
 - k. *Information & transaction services*(informasi & transaksi jasa);
 - l. *Job opportunities*(kesempatan kerja);
 - m. *Social connectivity for collaboration*(konektivitas sosial untuk kolaborasi);
 - n. *Students can access virtual lectures & webinars*(siswa dapat mengakses kuliah virtual & webinar);
 - o. *Students can solve their problems like- examination queries, result verification etc*(siswa dapat memecahkan masalah mereka pemeriksaan seperti-query, hasil verifikasi dll);
 - p. *Students can submit feedback to university*(siswa dapat mengirimkan umpan balik ke universitas).
 3. *Benefits to colleges* (Manfaat bagi perguruan tinggi)
 - q. *Data can access easily*(dapat mengakses data dengan mudah);
 - r. *Electronic data exchange with university*(pertukaran data Electronic dengan universitas);
 - s. *Saving of hidden operational cost*(penghematan biaya operasional yang tersembunyi);
 - t. *Instant statistical report generation*(instan generasi laporan statistic);
 - u. *Helpful for NAAC accreditation*(bermanfaat untuk akreditasi NAAC).

Sedangkan Shrivastava, dkk (2014:4) mengungkapkan manfaate-*government* di perguruan tinggi sebagai berikut:

“The benefits of e-government in an educational sector are improved efficiency, increase in transparency and accountability of educational administrative activities convenient and faster access to services, and lower costs for administrative services”. (Manfaat *e-government* di sektor pendidikan yang meningkatkan efisiensi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kegiatan administrasi pendidikan yang nyaman dan akses cepat ke layanan, dan biaya yang lebih rendah untuk layanan administrasi).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau keterangan mengenai kajian penelitian tersebut, sehingga meskipun terdapat kaitan penelitian yang sama antara penelitian yang dilakukan dahulu dengan penelitian sekarang, namun memiliki dimensi penelitian yang berbeda juga. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini akan diuraikan tingkat perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian terdahulu pada Jurnal Administrasi Publik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Rahmawati, yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*”. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akademik (SIKAD) *online* di Untirta masih rendah atau kurang memadai serta kepuasan responden atas penerapan sistem informasi akademik (SIKAD) *online* di Untirta masih rendah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah fokus penelitian serta teori yang digunakan. Dalam penelitian Rahmawati tersebut fokus penelitiannya adalah untuk mengukur penerapan SIKAD *online* di Untirta dengan menggunakan rumus Slovin, dan menggunakan teori tentang keunggulan dari penggunaan

Sistem Informasi Akademik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus untuk mengukur penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* jenuh (Sugiyono, 2007:92) dengan menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*.

Sementara itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang lainnya, yakni pada skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Ismatullah, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2014 yang berjudul "*Analisis Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*". Dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) *Online* Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah tergolong baik, yakni dalam kategori sedang, mencapai angka sebesar 68,68%.

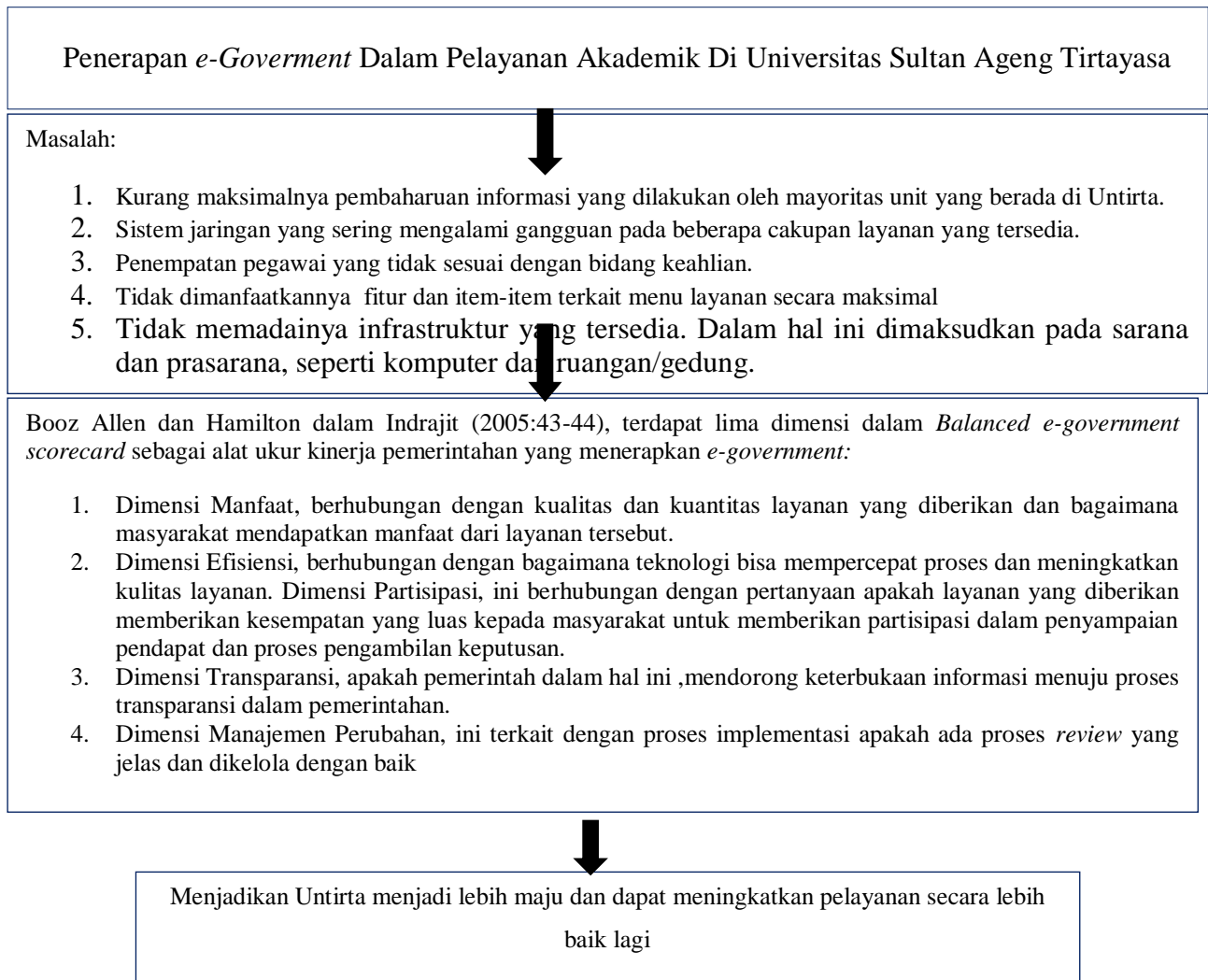
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismatullah dengan peneliti sekarang terdapat perbedaan, yakni pada fokus dan teori yang digunakan. Dalam hal ini, penelitian Ismatullah tersebut memiliki fokus untuk mengukur penerapan SIKAD *online* di Untirta dengan menggunakan rumus tabel *Issac* dan *Michael* dalam pengambilan populasi dan sampel serta menggunakan teori penerapan *e-government* dari *United National* dalam Budiati (2003:21).

Sedangkan peneliti memiliki fokus untuk mengukur penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan menggunakan teknik *sampling* jenuh (Sugiyono, 2007:92) dengan menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti telah menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah pada bab sebelumnya, oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka dalam kesempatan kali ini peneliti menggunakan lima dimensi sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government* oleh Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), dalam *Balanced e-government scorecard*. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, 2007:70). Oleh karena itu, berdasarkan pada kerangka berfikir diatas, maka hipotesis yang diambil peneliti sebagai berikut:

“Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa masih kurang baik atau $\leq 75\%$ ”.

Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara jelasnya di rumuskan sebagai berikut :

Ho : Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa masih kurang baik atau $\leq 75\%$.

Ha :Penerapan *e-Goverment* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik atau >75%.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2007:1). Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2007:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Dalam penelitian mengenai Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka peneliti membatasi materi kajian dengan menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), yang menyatakan terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berada di Banten, tepatnya terletak di Kota Serang. Peneliti

tertarik mengambil lokasi penelitian di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten dikarenakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Banten yang telah menerapkan *e-government* sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien. Disamping itu juga, dalam penerapan *e-government* di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang tengah dihadapi oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, oleh karena itu melalui skripsi ini, peneliti mencoba memberikan masukan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan penerapan *e-government* agar lebih baik lagi.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep yang dari variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti sebanyak 1 variabel yakni penerapan *e-government* dengan menggunakan konsep teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), yang menyatakan terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*. Sedangkan variabel yang akan peneliti teliti adalah penerapan *e-government*.

3.4.2 Definisi Operasional

Berdasarkan pada definisi konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, maka definisi operasional yang peneliti gunakan mengacu pada definisi konsep tersebut, hal ini dikarenakan antara definisi konsep dan definisi operasional merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Selain itu juga, agar pembahasannya menjadi terarah. Oleh karena itu, pada penelitian mengenai Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, peneliti menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), yang menyatakan terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*. Dalam hal ini kelima dimensi tersebut meliputi:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Dalam hal ini dimensi manfaat mencakup terhadap layanan yang telah diberikan dan mencakup terhadap apakah layanan tersebut telah memberikan manfaat secara maksimal serta telah memadai atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan layanan tersebut.
2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Cakupan efisiensi yang dimaksudkan adalah sejauh mana layanan tersebut dapat mengurangi proses kerja, baik dari sisi waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga terkait dengan ketersediaan layanan yang dapat membantu masyarakat

secara mudah dan cepat ketika dibutuhkan, pemanfaatan layanan tersebut secara maksimal pada seluruh aspek dan terkait juga dengan kualitas dan kuantitas terhadap pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada.

3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Dimensi partisipasi tersebut meliputi apakah layanan tersebut telah dapat memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapatnya, baik berupa saran dan kritik. Disamping itu juga apakah layanan tersebut memungkinkan masyarakat untuk dapat memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat seperti tersedianya fasilitas *chatting*, diskusi *online*, dll. Selain itu juga apakah layanan yang tersedia tersebut dimanfaatkan secara maksimal dan apakah layanan tersebut juga memberikan ruang kepada masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.
4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, dimensi transparansi tersebut, mencakup pada keterbukaan informasi menyangkut kepentingan masyarakat dan keterbukaan terhadap kepastian pendapat (berupa kritik dan saran) masyarakat tersebut diterima atau tidak.

5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Dimensi perubahan tersebut menyangkut pada apakah pengawasan yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik, sehingga evaluasi tersebut dapat dijadikan perubahan kedepan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu pada dimensi manajemen perubahan juga menyangkut apakah perencanaan strategi yang dilakukan sudah dilakukan secara maksimal dan apakah strategi kedepan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan dapat memotivasi para sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:102), Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Oleh karena adanya instrumen penelitian tersebut akan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban dari responden, hal ini karena biasanya instrumen penelitian menggambarkan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden, dalam hal ini biasa dikenal dengan kuesioner penelitian. Oleh karena itu, berikut peneliti juga menyajikan instrumen penelitian berupa operasional variabel dalam bentuk kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, antara lain:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item Instrumen
Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menurut Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44),terdapat lima dimensi dalam <i>Balanced e-government scorecard</i> sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan <i>e-government</i>	Manfaat	1. Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan 2. Bagaimana layanan tersebut bisa diakses dalam <i>one stop shop</i> dari satu portal menuju berbagai layanan 3. Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut	1,2,3,4,5,6,7
	Efisiensi	1. Ketersediaan arsitektur proses, aplikasi, dan database yang bisa berjalan baik ketika dibutuhkan 2. Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik 3. Pemanfaatan <i>platform</i> teknologi informasi dan teknologi secara maksimal pada keseluruhan aspek 4. Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai	8,9, 10,11,12,13, 14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23,24,25
	Partisipasi	1. Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web 2. Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat 3. Pengaruh dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 4. Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakat umum (tersedianya fasilitas <i>chatting</i> , forum, milis)	26,27,28 29,30,31,32

	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain-lain) 2. Informasi status permohonan aplikasi yang diajukan masyarakat. Apakah masyarakat misalnya bisa menanyakan dan mengetahui secara langsung apakah permohonan aplikasinya disetujui atau tidak 3. <i>Topicality of information</i> 	33,34,35, 36,37,38
	Manajeme Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementasi melibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain 2. Kualitas kontrol dan <i>review</i> 3. Keterlibatan dan motivasi dari pegawai 	39,41,42,43 44

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner dengan satu variabel penelitian yakni penerapan *e-government*. Sedangkan skala pengukuran instrumen menggunakan skala *Likert*. skala *Likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2007:107). Untuk keperluan analisis, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skor dalam Penelitian

Jawaban	Skor	Keterangan
A	4	Sangat Setuju
B	3	Setuju
C	2	Tidak Setuju
D	1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono, 2007

Disetiap pembicaraan mengenai metodologi penelitian, bahasan metode pengumpulan data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*). Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

2. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

3. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui berbagai referensi yang relevan berdasarkan *teks book* maupun jurnal.

4. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan, meliputi:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel atau responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi, atau bahan lain yang sudah merupakan data hasil olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu sampel tersebut harus bersifat representatif (mewakili).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, maka dalam penelitian ini populasi tersebut memiliki jumlah 40 orang pegawai yang diambil dari seluruh

pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007:96). Oleh karena itu pada penelitian ini yang akan menjadi sampel sebanyak 40 orang pegawai yang terdiri dari seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirta.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisa dan merupakan tahapan-tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan dan diformat menurut aturan untuk keperluan proses berikutnya. Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan di analisis. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

2. *Coding*

Yang dimaksud dengan koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.

3. *Tabulating*

Pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel.

3.7.1 Uji Validitas

Dalam penelitian uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan instrument penelitian artinya instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. hal ini karena hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (*software*) *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 16.0. Berikut rumus Korelasi *Product Moment*, dalam Sugiyono (2009:183), sebagai berikut:

Rumus Korelasi *Product Moment*,

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r	= Koefisien korelasi <i>product moment</i>
Σx	= Jumlah nilai dalam sebaran x
Σy	= Jumlah nilai dalam sebaran y
Σxy	= Jumlah hasil kali nilai x dan y yang berpasangan
Σx^2	= Jumlah nilai yang dikuadratkan dalam sebaran x
Σy^2	= Jumlah nilai yang dikuadratkan dalam sebaran y
n	= Jumlah sampel

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *rely*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan. Uji reliabilitas adalah pengujian ketelitian, ketepatan, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yang dibantu dengan perangkat lunak (*software*) *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 16.0.

Rumus *Alpha Cronbach*, sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right]$$

Keterangan:

n = Jumlah butir

$\sum S_i^2$ = variasi butir

$\sum S_t^2$ = Variasi total

3.7.3 Uji *t-test*

Uji *t-test* digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio. Oleh karena itu pada penelitian ini juga menggunakan uji *t-test* satu sampel berikut rumus uji *t-test* satu sampel:

Rumus: uji *t-test* satu sampel

$$t = \frac{X - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana:

t = nilai t yang dihitung

X = nilai rata-rata

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

3.8 Jadwal penelitian

Berikut ini adalah tahapan proses dan waktu yang telah peneliti lakukan dalam menyusun skripsi ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		2014		2015										2016			
		O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s	J a n
1	Observasi Awal																
2	Pengajuan Judul																
3	Perizinan Dan Observasi Lapangan																
4	Bimbingan Bab I																
5	Bimbingan Bab II																
6	Bimbingan Bab III																
7	Seminar Proposal																
8	Revisi Proposal																
9	Penelitian Lapangan																
10	Bimbingan Bab IV dan V																
11	Sidang Skripsi																
12	Revisi Sidang Skripsi																

Sumber : Peneliti, 2015

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimulai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Tirtayasa pada tanggal 1 Oktober 1980 berdasarkan Akte Notaris No: 1 Tahun 1890, kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R.Arie Soetardjo, Nomor 1, tanggal 3 Maret 1986. Kata Tirtayasa (Bahasa Sansekerta yang berarti air mengalir) diambil dari nama Pahlawan Nasional yang berasal dari Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa (Kepres RI Nomor: 045/TK/1070). Nama asli Sultan Ageng Tirtayasa Abdul Fatih Abdul Fatah, pewaris ke- IV tahta Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi tanda jasa Pahlawan Nasional karena dengan gigih menentang penjajahan Belanda dan berhasil membawa kejayaan dan keemasan Kesultanan Banten.

Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 yang disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendirian STKIP, Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan Sekolah Tinggi Teknik (STT) yang selanjutnya STT bergabung

dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.

Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan penggabungan dari STIH, STT, dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0596/01/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi menjadi Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Seiring dengan keinginan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/01/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/01/1989, tanggal 30 Mei 1989.

Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia telah ikut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Didasari oleh perkembangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang kurang signifikan dan spirit era reformasi telah mendorong Pimpinan Universitas dan para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tirtayasa serta Pengurus Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan dukungan para tokoh Banten mengusulkan penegrian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1999 keluarlah Keppres RI Nomor: 130/1999 tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas kerja

keras dan kesungguhan dari pimpinan Untirta dan Pengurus Yayasan, maka pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 32 tanggal 19 Maret Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri definitif.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang baru terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik dibidang kelembagaan, akademik, maupun dibidang kemahasiswaan dan kerjasama. Perubahan mendasar dibidang organisasi dan tata kerja adalah dengan ditetapkannya Keputusan Mendiknas Nomor: 023/J43/d.1/SK/IV/2003 dan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 10 tahun 2007. Demikian pula perubahan dan perbaikan dibidang akademik khususnya pendirian fakultas dan jurusan-jurusan baru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, pengembangan ICT untuk menunjang pendidikan pelayanan akademik prima, pengembangan dan peningkatan sarana perpustakaan menuju *e-library* dan *e-jurnal* penguatan atmosfer akademik dikampus, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dan evaluasi diri (*Quality Assurance and Self evaluation*).

4.1.2 Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Visi:

Terwujudnya Universitas terbaik yang memiliki kemandirian, kreatifitas, inovasi, unggul, dan kompetitif dalam bidang pendidikan, penelitian, serta

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

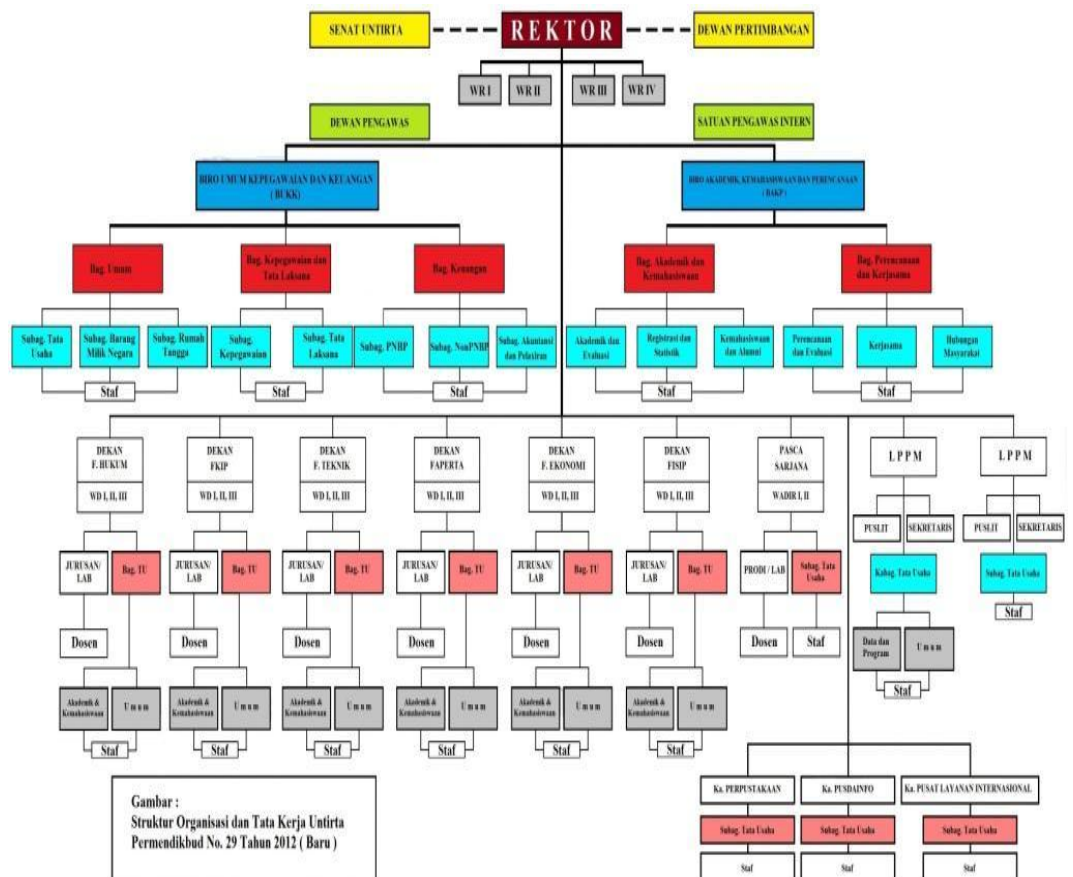
Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan (yang akan) datang;
2. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan lain dalam melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja (*net working*) untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
4. Membangun dan mengembangkan sistem manajemen mutu menuju efisiensi dan profesionalitas;
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat memacu terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif;
6. Meningkatkan tanggung jawab sosial Untirta, bersama pemerintah daerah, membawa modernisasi dan memelihara nilai luhur.

4.1.3 Struktur Organisasi Untirta

Pada saat ini Untirta dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Yang dibantu oleh WR I, WR II, WR III, WR IV serta seluruh kepala tiap unit yang ada di Untirta. Berikut ini Struktur Organisasi yang ada di Untirta:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Untirta



Gambar :
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Untirta
Permendikbud No. 29 Tahun 2012 (Baru)

Sumber: Www.Untirta.ac.id

4.2 Pengujian Persyaratan Statistik

4.2.1 Uji Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, analisis data yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan suatu instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta

mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Oleh karena itu rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

Rumus Korelasi *Pearson Product Moment*

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2) - (\sum x)^2}(n\sum y^2) - (\sum y)^2}$$

Keterangan :

r = Besarnya korelasi *product moment*

n = Jumlah sampel

$\sum x$ = Jumlah skor dalam sebaran x

$\sum y$ = Jumlah skor dalam sebaran y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

$\sum x^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

$\sum y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} telah ditentukan sebesar 0,312 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Dari pengujian di atas maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pernyataan) dengan menggunakan SPSS v.16

No	r hitung	r table	Keterangan
1	0,740	0,312	Valid
2	0,624	0,312	Valid
3	0,564	0,312	Valid
4	0,600	0,312	Valid
5	0,664	0,312	Valid
6	0,189	0,312	Tidak Valid
7	0,705	0,312	Valid
8	0,613	0,312	Valid
9	0,543	0,312	Valid
10	0,705	0,312	Valid
11	0,676	0,312	Valid
12	0,653	0,312	Valid
13	0,017	0,312	Tidak Valid
14	0,454	0,312	Valid
15	0,497	0,312	Valid
16	0,632	0,312	Valid
17	0,676	0,312	Valid
18	0,452	0,312	Valid
19	0,591	0,312	Valid
20	0,701	0,312	Valid
21	0,669	0,312	Valid
22	0,727	0,312	Valid
23	0,036	0,312	Tidak Valid
24	0,615	0,312	Valid
25	0,183	0,312	Tidak Valid
26	0,653	0,312	Valid
27	0,789	0,312	Valid
28	0,805	0,312	Valid
29	0,657	0,312	Valid
30	0,522	0,312	Valid
31	0,731	0,312	Valid
32	0,723	0,312	Valid
33	0,684	0,312	Valid
34	0,801	0,312	Valid
35	0,523	0,312	Valid
36	0,782	0,312	Valid
37	0,592	0,312	Valid
38	0,722	0,312	Valid
39	0,607	0,312	Valid

40	0,738	0,312	Vaid
41	0,719	0,312	Vaid
42	0,470	0,312	Vaid
43	0,754	0,312	Vaid
44	0,700	0,312	Valid

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2015

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 4 pernyataan yang tidak valid dari 44 pernyataan yang peneliti ujikan pada uji validitas instrumen tersebut, 4 pernyataan tersebut terdiri dari no urut pernyataan no 6, 13, 23, dan 25. Dikatakan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$ pada uji signifikansi taraf 5%. Dalam hal ini uji validitas tersebut peneliti lakukan pada 30 responden yang diambil dari seluruh responden yang ada yakni dari 40 responden.

4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur, maka peneliti menggunakan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas ini peneliti menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS v.16.

Rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum Si^2}{\sum St^2} \right)$$

Dimana :

n = Jumlah butir

S_i^2 = Variasi butir

S_t^2 = Variasi total

Dikatakan reliable menurut Siegel, jika $r_{11} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} telah ditentukan sebesar 0,6. Dengan menggunakan teknik perhitungan spss, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas (Menggunakan SPSS v.16)

Case Processing Summary		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.3
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.961	40

Nilai di atas menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,961 > 0,6$. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrumen penelitian ini adalah reliable. Berdasarkan uji validitas dan uji realibilitas yang telah

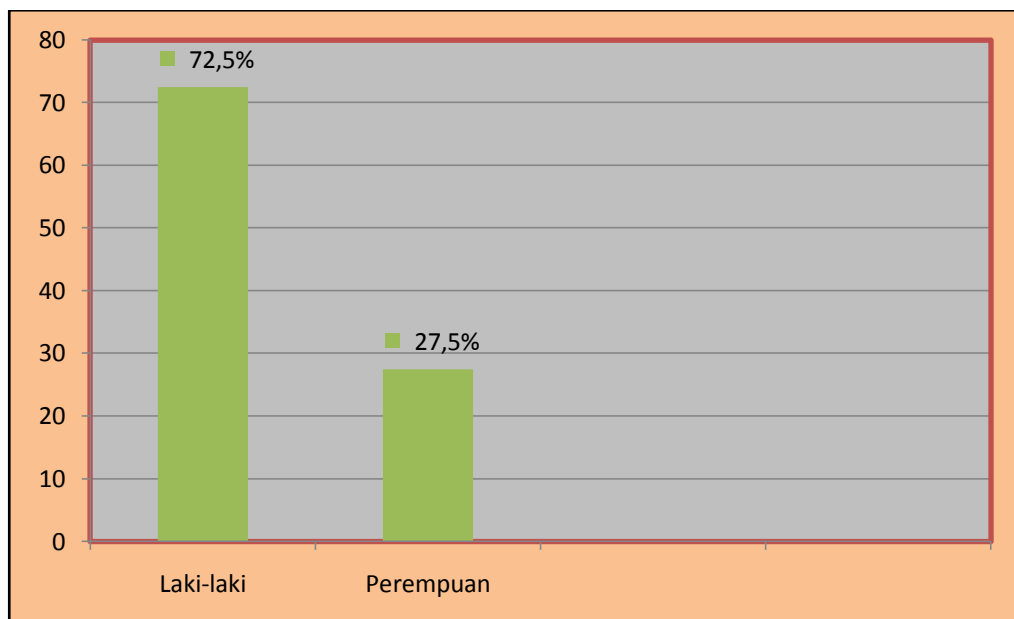
dilakukan, maka instrument dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini.

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirtayang berjumlah 40 orang. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti mengajukan kuesioner kepada semua responden, dimana dalam pengisian tersebut responden diminta untuk mengisi identitas diri yang meliputi Jenis Kelamin, Umur, dan Pendidikan Terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada histogram dibawah ini:

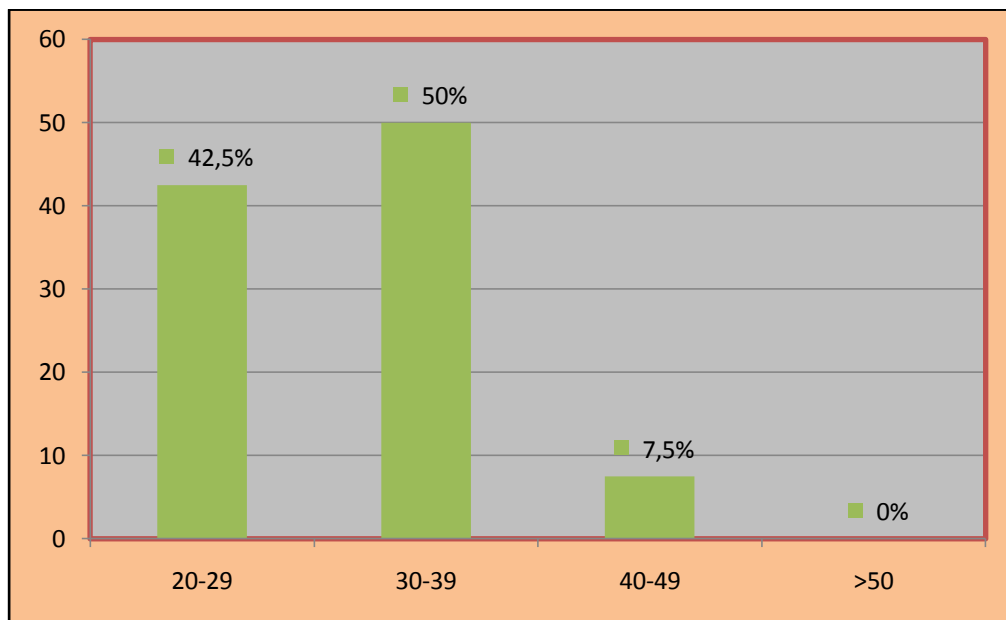
Grafik 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2015

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa persentase responden laki-laki sebanyak 29 orang atau 72,5%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 11 orang atau 27,5%. Dalam hal ini jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkn dengan jumlah responden perempuan,yakni dengan selisih sebesar 45%. Hal tersebut dikarenakan dalam proses rekrutmen pegawai yang dilakukan langsung ditangani oleh pihak Universitas, sedangkan untuk fakultas dan Unit Pelaksana Teknis(UPT) hanya menerima hasil yang diberikan oleh pihak Universitas.

Grafik 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia

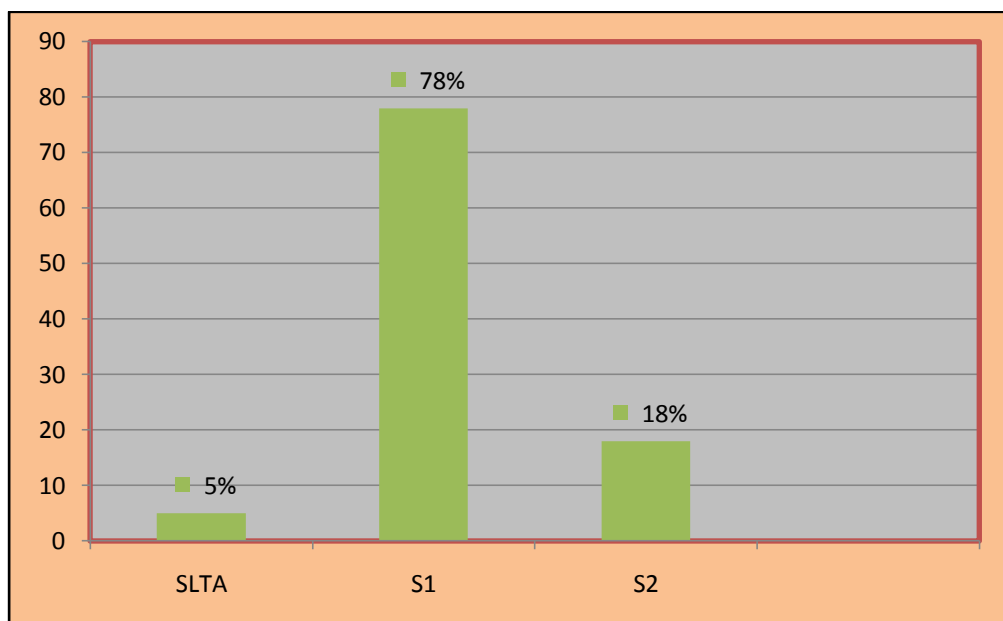


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2015

Berdasarkan grafik 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa responden berusia antara 30-39 tahun yaitu sebanyak 20 orang (50%) yang merupakan responden terbanyak. Responden terbanyak kedua berusia 20-29 tahun yaitu

sebanyak 17 orang (42,5%) dan responden yang berusia 40-49 tahun yaitu sebanyak 3 orang (7,5%), sedangkan untuk responden yang berusia >50 tahun tidak ada (0%). Oleh karena itu untuk responden yang terbanyak berdasarkan usia yakni mereka yang berusia 30-39 tahun.

Grafik 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2015

Berdasarkan grafik 4.3 di atas, didapatkan responden yang berpendidikan S1 menjawab yang terbanyak yaitu 31 orang (78%), setelah S1 yang menjawab terbanyak kedua adalah S2 sebanyak 7 orang (18%). Sedangkan responden yang berpendidikan tingkat SLTA sebanyak 2 orang (5%). Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian untuk tingkat pendidikan sudah cukup baik.

4.3.2 Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi peneliti di lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara dan penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, kuesioner disebarakan kepada 40 responden yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang pegawai dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 24 orang. 40 responden tersebut terdiri dari seluruh pegawai *Information and Communication Technology* (ICT) yang berada di Untirta .

Dalam melakukan Analisis data, peneliti menggunakan teori teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*. Dalam penellitian ini skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert. Pilihan jawaban yang disediakan dalam kuesioner tersebut terdiri dari 4 item, yaitu Sangat setuju/ bernilai 4, Setuju/ bernilai 3, Tidak setuju/ bernilai 2, dan Sangat Tidak setuju/ bernilai 1. Dalam hal ini semakin tinggi nilai yang diperoleh dalam kuesioner tersebut, maka semakin baik pula penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk lebih memperjelas jawaban responden atas kuesioner, berikut ini akan digambarkan dalam bentuk diagram yang disertai pemaparan serta kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan-pernyataan yang diajukan melalui

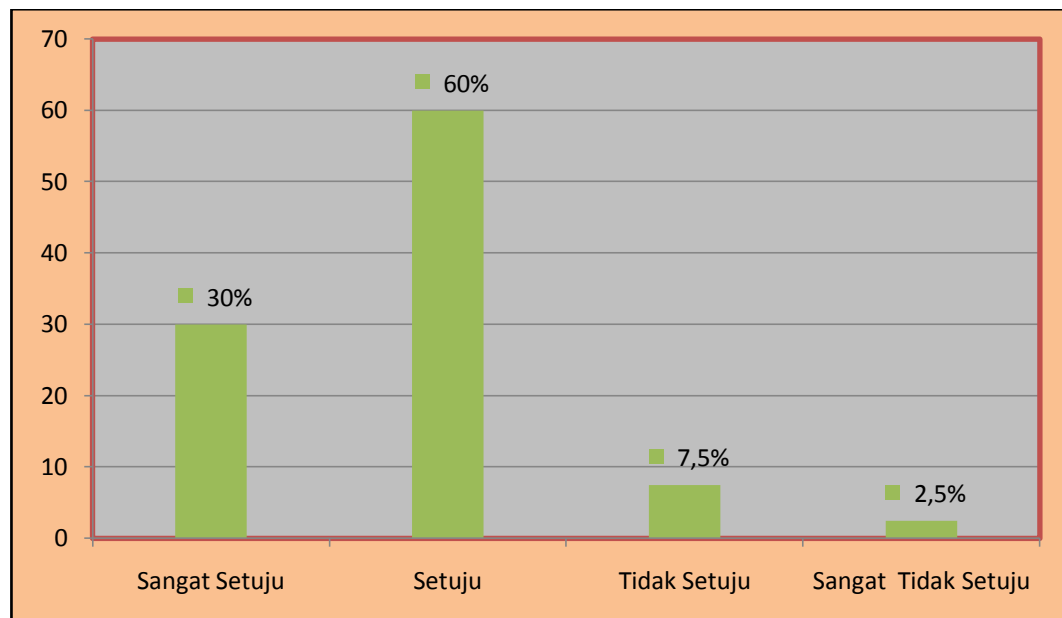
kuesioner berdasarkan indikator dalam teori tersebut. Adapun pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.2.1 Dimensi Manfaat

Terdapat 6 pernyataan yang berhubungan dengan Dimensi Manfaat, antara lain:

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan sistem pelayanan yang tersedia telah mampu melayani civitas akademik secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sebagai berikut:

Grafik 4.4
Sistem Pelayanan Yang Tersedia Telah Mampu Melayani Civitas Akademik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.1)

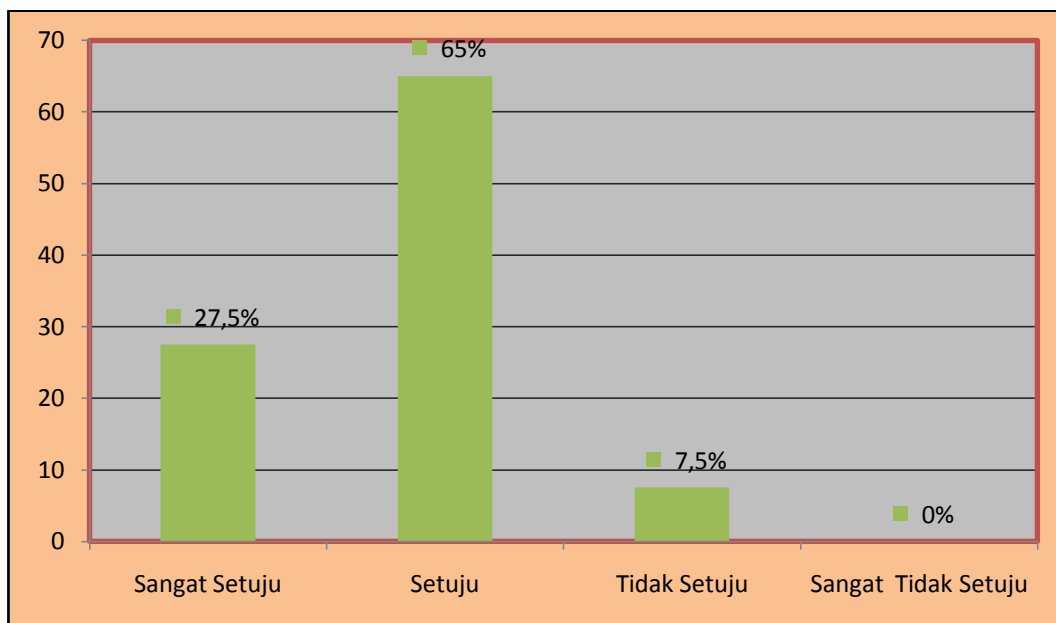
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden dengan persentase 30%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 3

responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 1 responden dengan persentase 2,5%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pelayanan yang tersedia telah mampu melayani civitas akademik secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, terbukti salah satunya dengan adanya Sistem Informasi Akademik (SIKAD) *online* dan *e-administrasi* atau surat *online* yang dapat memudahkan para pengguna layanan, sehingga untuk para pengguna layanan, khususnya mahasiswa yang dapat melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan pengisian surat *online* dapat melakukannya saja dan dimana saja tempatnya. Akan tetapi sebanyak 3 responden dengan persentase 7,5% menjawab tidak setuju. Hal tersebut karena sistem teknologi dan informasi yang ada, tidak sepenuhnya membantu pengguna layanan dalam memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini sistem teknologi dan informasi seperti *e-administrasi* atau surat *online* yang harus diverifikasi ulang kepada jurusan yang menimbulkan pekerjaan ulang untuk pengguna layanan serta layanan untuk SIKAD *online* yang sering mengalami gangguan.

Kedua, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan cakupan layanan yang tersedia sudah mampu di akses oleh civitas akademik dalam satu portal menuju berbagai layanan, sebagai berikut

Grafik 4.5
Cakupan Layanan Yang Tersedia Sudah Mampu Di Akses Oleh Civitas Akademik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.2)

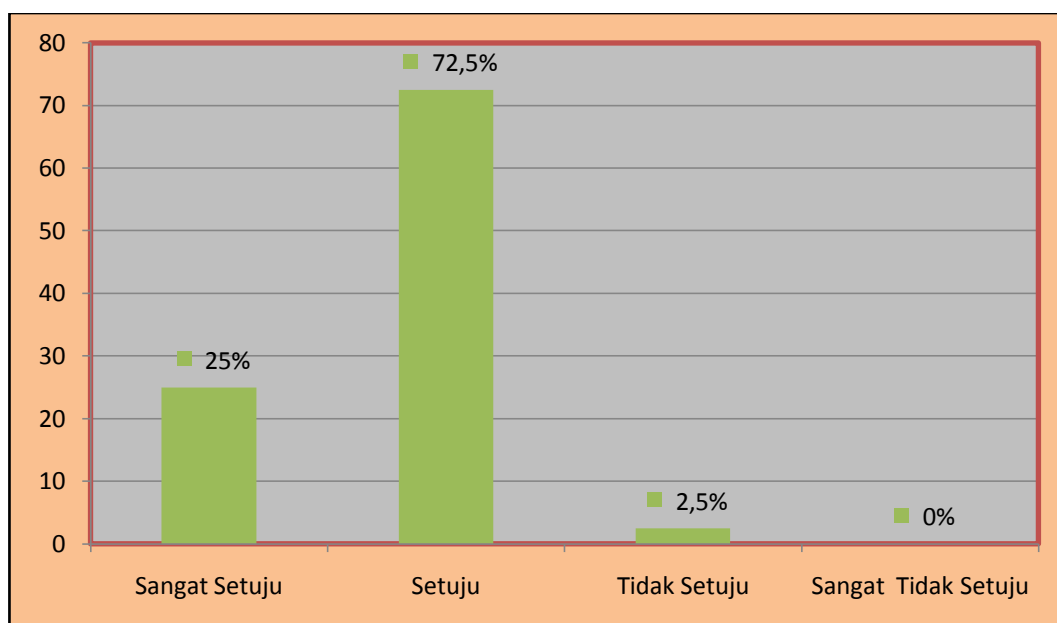
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 27,5%, 26 responden menjawab setuju dengan persentase 65%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 11 responden dengan persentase 65%. Hal ini dapat diartikan bahwa cakupan layanan yang tersedia sudah mampu di akses oleh civitas akademik dalam satu portal menuju berbagai layanan, hal ini dibuktikan dengan adanya *website* Untirta yang membawahi semua unit Fakultas dan jurusan serta unit kerja yang berada di Untirta, sehingga cukup dengan mengakses www.untirta.ac.id, pengguna layanan

dapat mengakses seluruh link yang berada di Untirta sesuai kebutuhan pengguna layanan. Namun, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase sebesar 7,5%. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengguna layanan yang belum bisa secara penuh memanfaatkan cakupan layanan yang telah disediakan, sehingga sering kali masih bulak balik kampus untuk menanyakan permasalahan yang ada, yang seharusnya dapat dilakukan secara sistem *online* secara langsung.

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan cakupan layanan yang tersedia dibuat dengan sebaik mungkin untuk memudahkan pengguna layanan.

Grafik 4.6
Cakupan Layanan Yang Tersedia Dibuat Dengan Sebaik Mungkin Untuk Memudahkan Pengguna Layanan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.3)

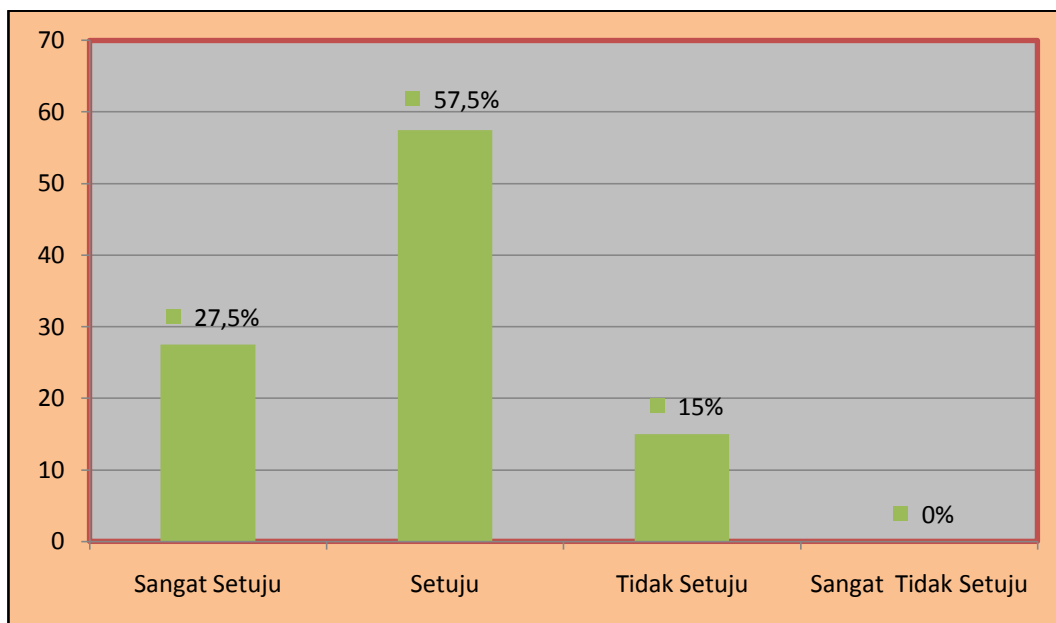
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan

persentase 25%, 29 responden menjawab setuju dengan persentase 72,5%, 1 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 29 responden dengan persentase 72,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa cakupan layanan yang tersedia dibuat dengan sebaik mungkin untuk memudahkan pengguna layanan, hal ini terbukti dengan adanya *website* Untirta yang menaungi seluruh unit yang berada di Untirta, sehingga pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses seluruh link yang berada di Untirta, yakni dengan cukup mengklik cakupan layanan sesuai yang diinginkan atau sesuai kebutuhan pengguna layanan tersebut.

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan Dalam memberikan layanan kepada civitas akademik secara penuh memanfaatkan sistem *online*, adalah sebagai berikut:

Grafik 4.7
Layanan Kepada Civitas Akademik Secara Penuh Memanfaatkan Sistem Online



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.4)

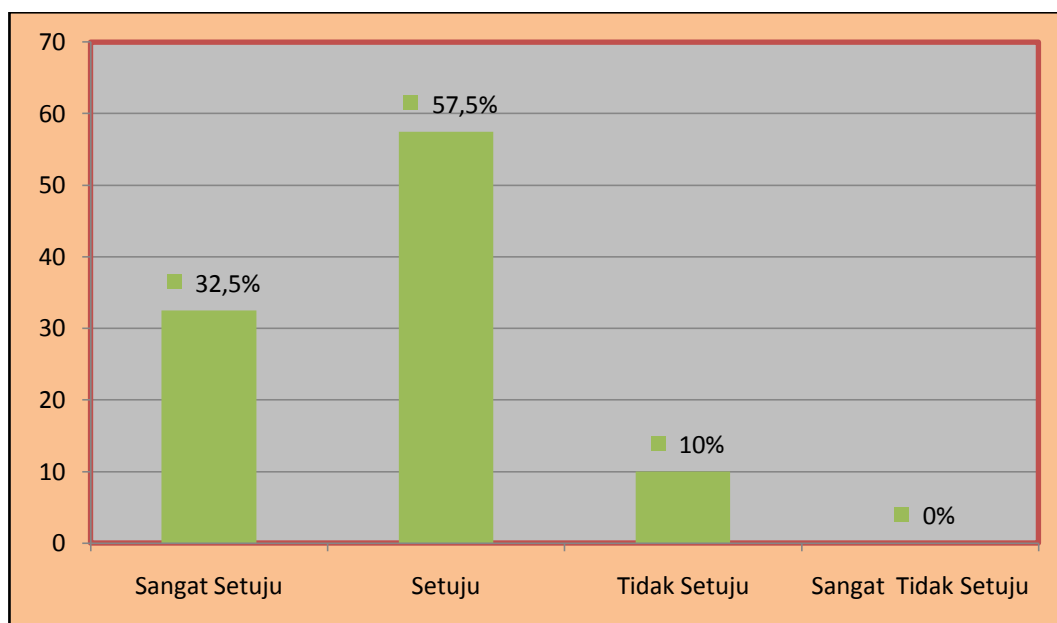
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 27,5%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 6 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 23%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam memberikan layanan kepada civitas akademik secara penuh memanfaatkan sistem *online*. Seperti untuk pelayanan surat *onlinedan* SIAKAD *online* yang dapat membantu para pegawai sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun disisi yang lain juga 6 responden dengan persentase 15% menjawab tidak setuju, hal

tersebut karena dalam pelaksanaannya para pegawai sendiri tidak secara penuh menggunakan sistem *online* dalam memberikan layanan kepada civitas akademik. Hal ini terbukti, salah satunya dengan masih adanya pekerjaan yang harus dilakukan secara manual seperti pengumpulan penerimaan mahasiswa baru dan nilai Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang harus berbentuk *hard copy* sebagai pegangan atau untuk dokumen dari lembaga tersebut.

Kelima, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan pengolahan data dan informasi sudah terkomputerisasi dengan baik, adalah sebagai berikut:

Grafik 4.8
Pengolahan Data Dan Informasi Sudah Terkomputerisasi Dengan Baik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.5)

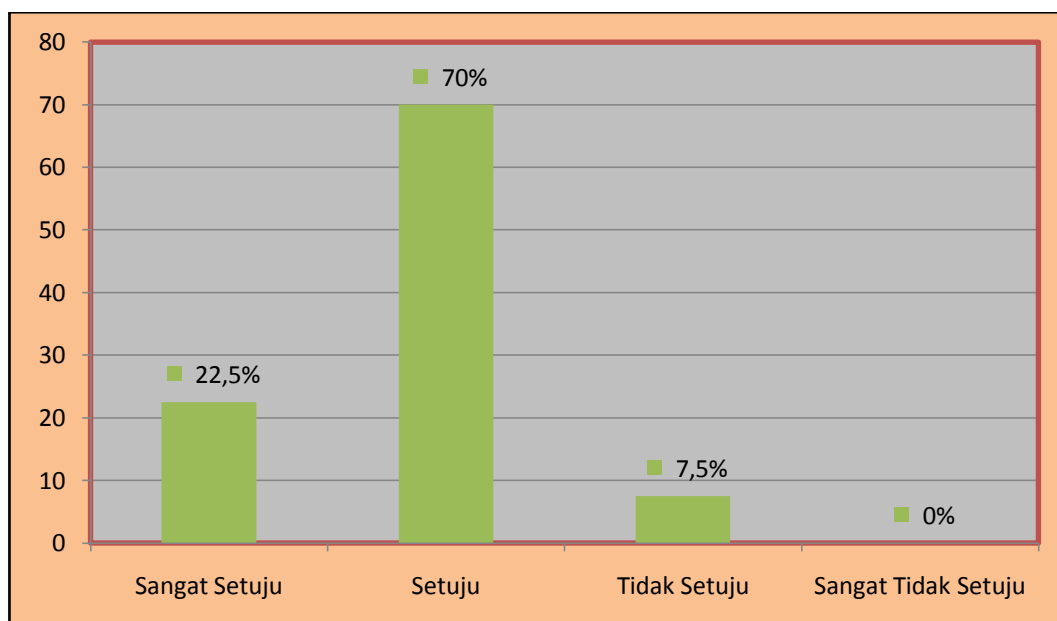
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden dengan

persentase 27,5%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 4 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 57,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa pengolahan data dan informasi sudah terkomputerisasi dengan baik, hal tersebut terbukti dengan sudah tersimpannya data-data yang ada dalam komputer secara baik dalam file yang rapih sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi para pegawai.

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan data dan informasi yang ada dilingkup kantor sudah tersimpan dalam *database* secara baik dan rapi sebagai berikut:

Grafik 4.9
Data Dan Informasi Yang Ada Dilingkup Kantor Sudah Tersimpan Dalam Database Secara Baik Dan Rapi



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.7)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 22%, 28 responden menjawab setuju dengan persentase 70%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

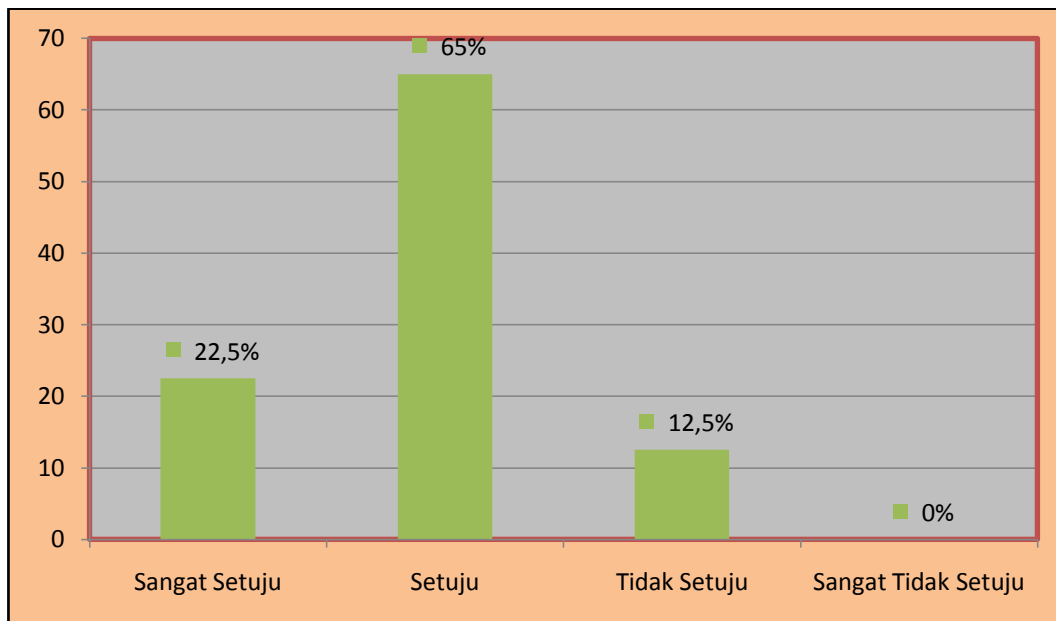
Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 28 responden dengan persentase 70%. Hal ini dapat diartikan bahwa data dan informasi yang ada di lingkungan kantor sudah tersimpan dalam *database* secara baik dan rapi, hal tersebut dikarenakan data sendiri sudah disimpan oleh pegawai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sedangkan untuk informasi yang memang layak diketahui masyarakat umum, dapat dilihat pada situs *website*-nya masing-masing.

4.3.2.2 Dimensi Efisiensi

Terdapat 15 pernyataan yang berhubungan dengan Dimensi Efisiensi, antara lain

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat sistem informasi manajemen yang memadai untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.10
Sistem Informasi Manajemen Memadai Untuk Memberikan Data Dan Informasi Yang Dibutuhkan



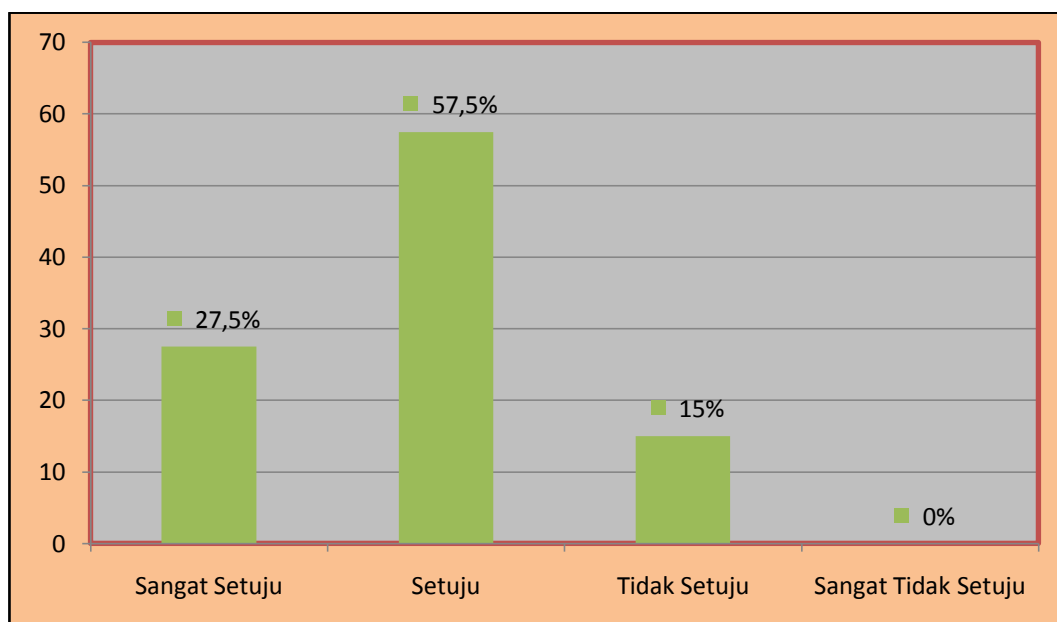
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.8)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 22,5%, 26 responden menjawab setuju dengan persentase 65%, 5 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 12,5%, dan 0 responden dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 26 responden dengan persentase 65%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat sistem informasi manajemen yang memadai untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *e-government*. Hal ini dibuktikan dengan adanya situs *website* pada setiap lembaga masing-masing yang dapat digunakan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada pengguna layanan.

Kedua, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat koneksi jaringan Local Area Network (LAN) disetiap komputer yang tersedia sudah memadai sebagai berikut:

Grafik 4.11
Koneksi Jaringan LAN Disetiap Komputer Yang Tersedia Sudah Memadai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.9)

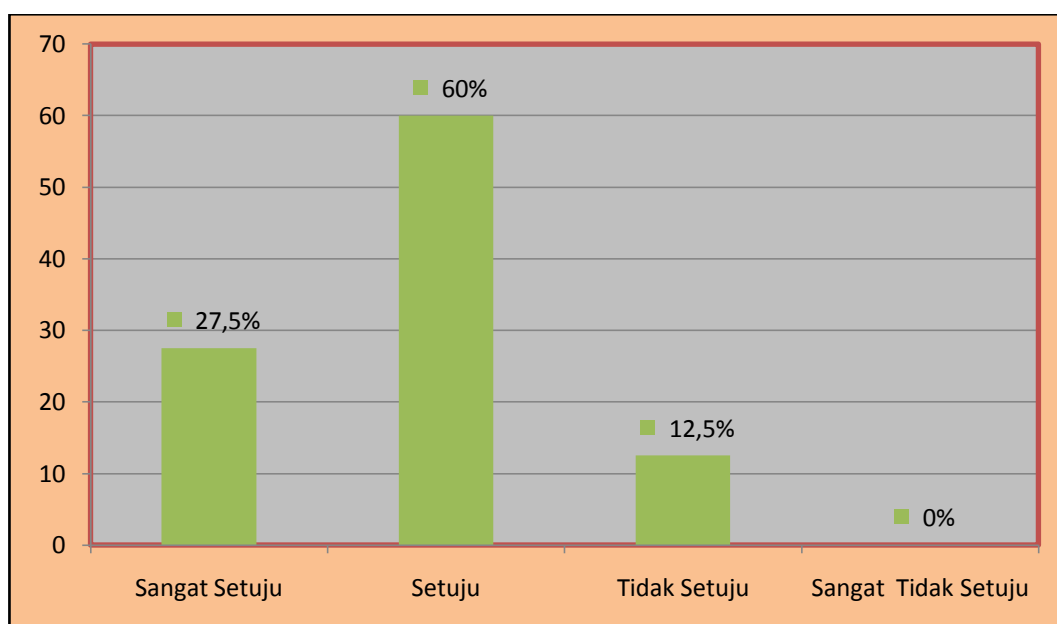
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 27,5%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 6 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 57,5. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat koneksi jaringan LAN disetiap komputer yang tersedia sudah memadai, terbukti dengan

sampai dalam penerapannya telah membantu para pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya dengan lebih mudah dan cepat. Namun disisi lain juga 6 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%. Hal tersebut dikarenakan koneksi jaringan LAN yang tersedia sering mengalami gangguan, terutama jika banyak yang mempergunakannya atau mengaksesnya, seperti pada waktu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan pendaftaran Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan Terdapat aplikasi teknologi informasi berbasis internet yang memadai dalam penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.12
Terdapat Aplikasi Teknologi Informasi Berbasis Internet Yang Memadai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.10)

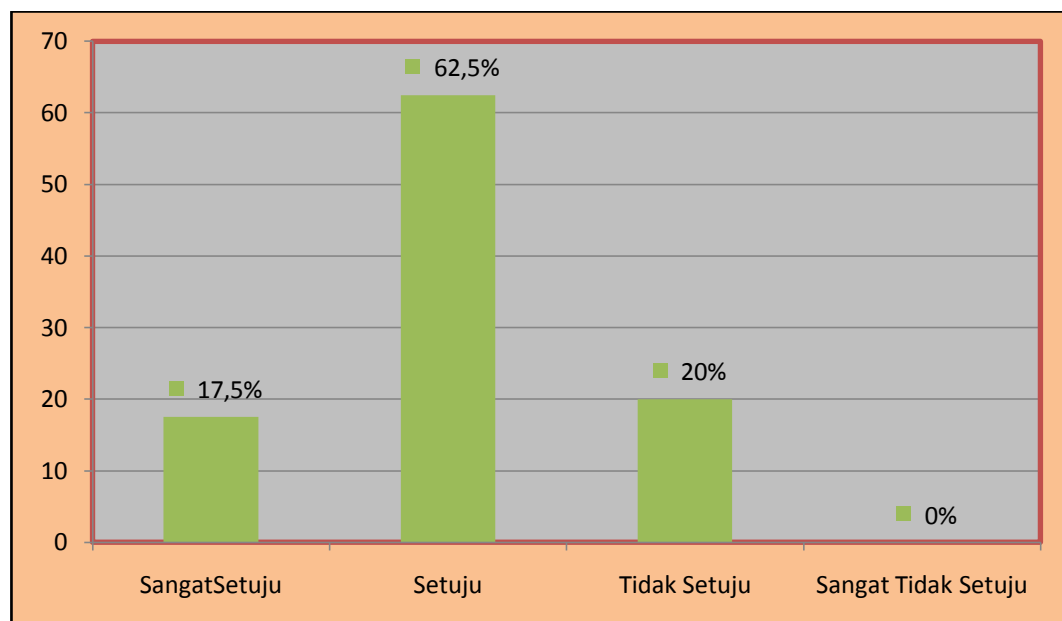
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan

persentase 27,5%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 5 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 12,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat aplikasi teknologi informasi berbasis internet yang memadai dalam penerapan *e-government*, terbukti dengan adanya *website* pada setiap unit yang berada di Untirta, serta adanya *e-mail* yang digunakan dalam membantu pekerjaan para pegawai.

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat koneksi jaringan internet yang baik sebagai berikut:

Grafik 4.13
Terdapat Koneksi Jaringan Internet Yang Baik



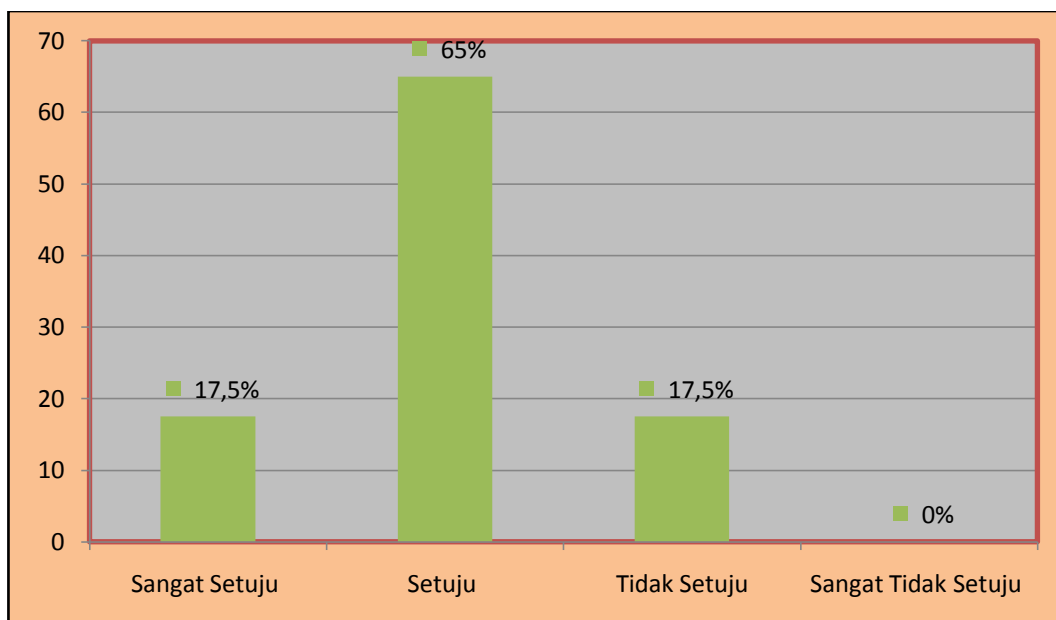
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.11)

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 17,5%, 25 responden menjawab setuju dengan persentase 62,5%, 8 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 54 responden dengan persentase 62,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat koneksi jaringan internet yang baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya pekerjaan para pegawai yang berbasis internet, sehingga dapat membantu para pegawai mengerjakan pekerjaannya secara lebih mudah dan cepat. Akan tetapi 8 responden yang menjawab tidak setuju dengan persentase 20% merasakan bahwa koneksi jaringan internet yang tersedia masih sering mengalami gangguan, seperti lambat dalam prosesnya, terutama pada saat masa KRS dan penerimaan mahasiswa baru.

Kelima,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataankemampuan Bapak/Ibu sudah memadai dalam menunjang penerapan *e-government* di Untirta sebagaiberikut:

Grafik 4.14
Kemampuan Di Bidang Teknologi Informasi Sudah Memadai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No.12)

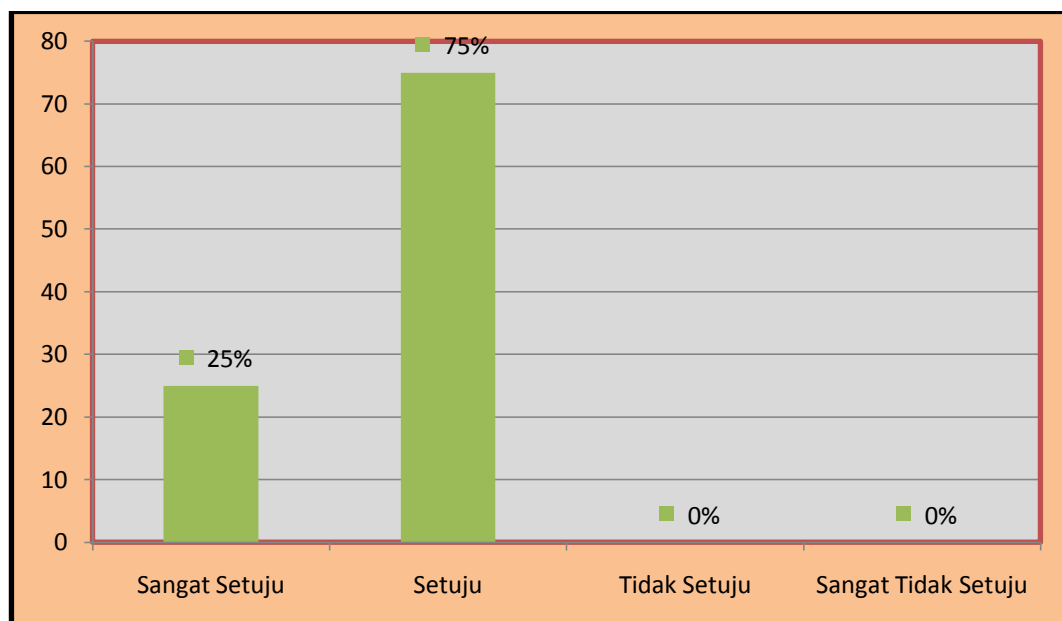
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 17,5%, 26 responden menjawab setuju dengan persentase 65%, 7 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 17,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Dari hasil jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 26 responden dengan persentase 65%. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan Bapak/Ibu sudah memadai dalam menunjang penerapan *e-government* di Untirta, terbukti dengan berjalannya pekerjaan para pegawai sesuai tugas pokok dan

fungsinya masing-masing. Namun 7 responden dengan persentase 17,5% menjawab tidak setuju, hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan para pegawai, sehingga menjadikan pekerjaan tersebut belum mencapai tingkat maksimal.

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat perencanaan untuk pengadaan staf ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani *e-government* sesuai dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Grafik 4.15
Terdapat Perencanaan Pengadaan Staf Ahli Yang Memiliki Kemampuan Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 14)

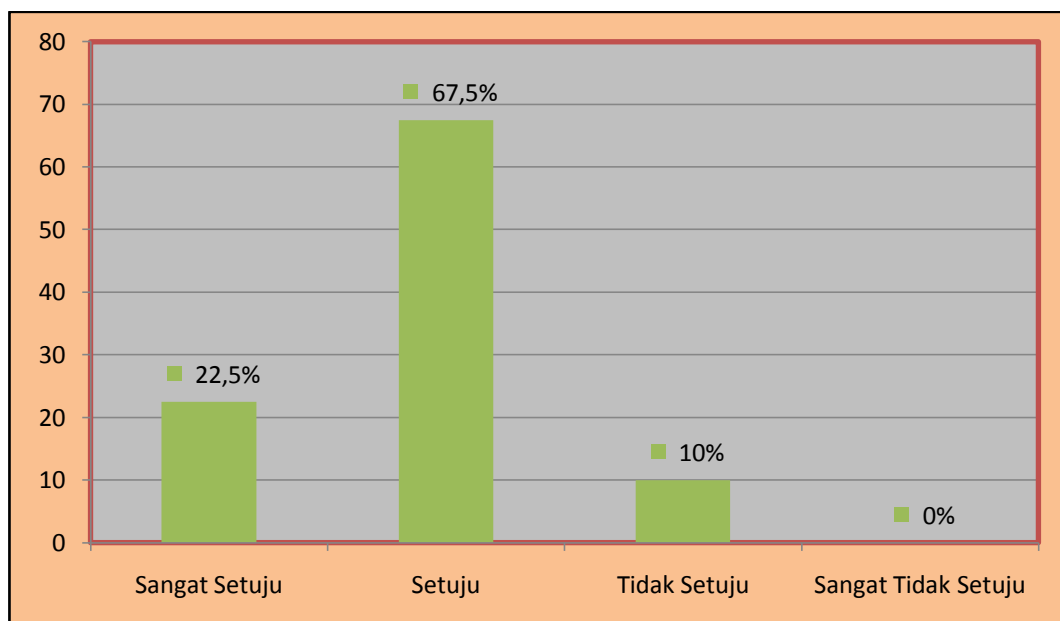
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 30 responden menjawab setuju dengan persentase 75%,

Responden menjawab tidak setuju dengan persentase 0%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Dari hasil jawaban mayoritas responden menjawab setuju berjumlah 30 responden dengan persentase 75%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perencanaan untuk pengadaan staf ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani *e-government* sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal tersebut dikarenakan agar para pegawai bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dengan bekerja sesuai latar belakang pendidikannya atau basis keilmuan diharapkan akan lebih mampu bekerja dengan lebih baik lagi.

Ketujuh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan saya telah mampu mengolah data dan informasi dalam mendukung penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.16
Kemampuan Mengolah Data Dan Informasi Dalam Mendukung Penerapan E-Government



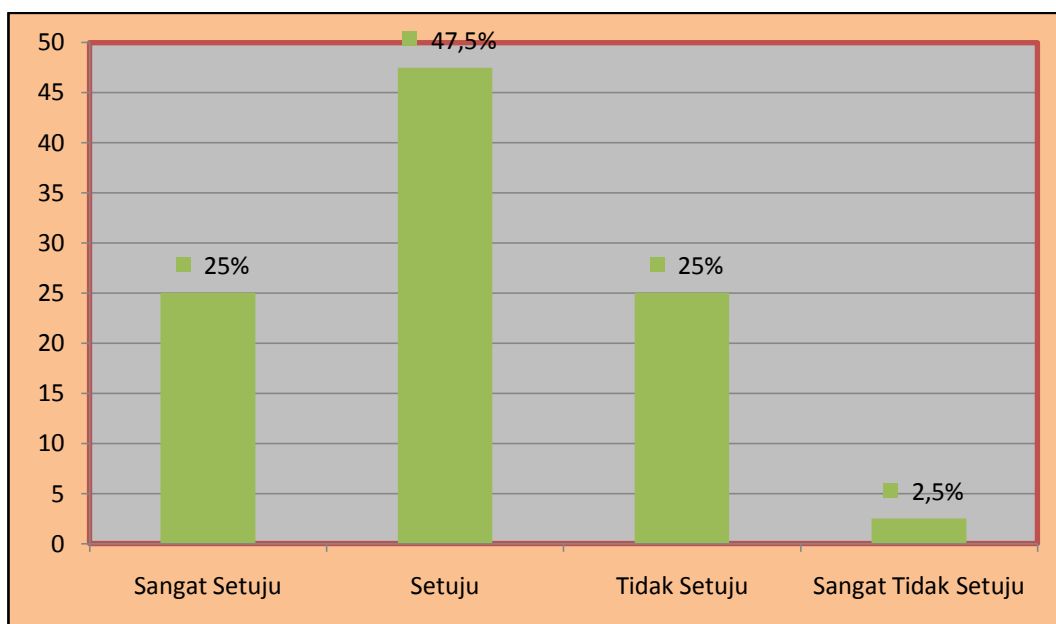
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 15)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 22,5%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 4 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 10%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Dari hasil jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa para pegawai telah mampu mengolah data dan informasi dalam mendukung penerapan *e-government*, hal ini dibuktikan dengan berjalan lancarnya pekerjaan para pegawai sesuai pekerjaan masing-masing dalam melayani civitas akademik.

Kedelapan, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat pelatihan bagi Bapak/Ibu pada bidang teknologi informasi dalam mendukung penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.17
Terdapat Pelatihan Pada Bidang Teknologi Informasi



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 16)

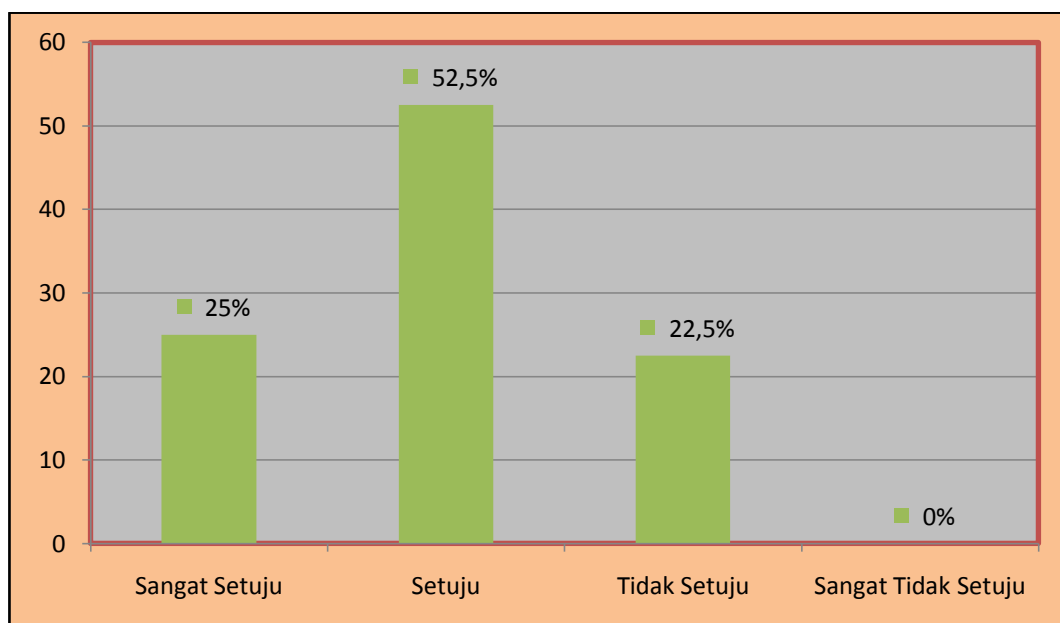
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 19 responden menjawab setuju dengan persentase 47,5%, 10 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 25%, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 2,5%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 19 responden dengan persentase 47,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pelatihan bagi para pegawai pada bidang teknologi informasi dalam mendukung penerapan *e-government*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam penyesuaian hal-hal yang baru, seperti untuk penyesuaian *e-administrasi*. Namun 10 responden dengan persentase 25% menjawab tidak

setuju, hal tersebut dikarenakan mereka belum merasakan adanya pelatihan yang diberikan pada bidang teknologi informasi.

Kesembilan, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan telah membantu Bapak/Ibu dalam penerapan *government* di Untirta sebagai berikut:

Grafik 4.18
Terdapat Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Di Bidang Teknologi Informasi



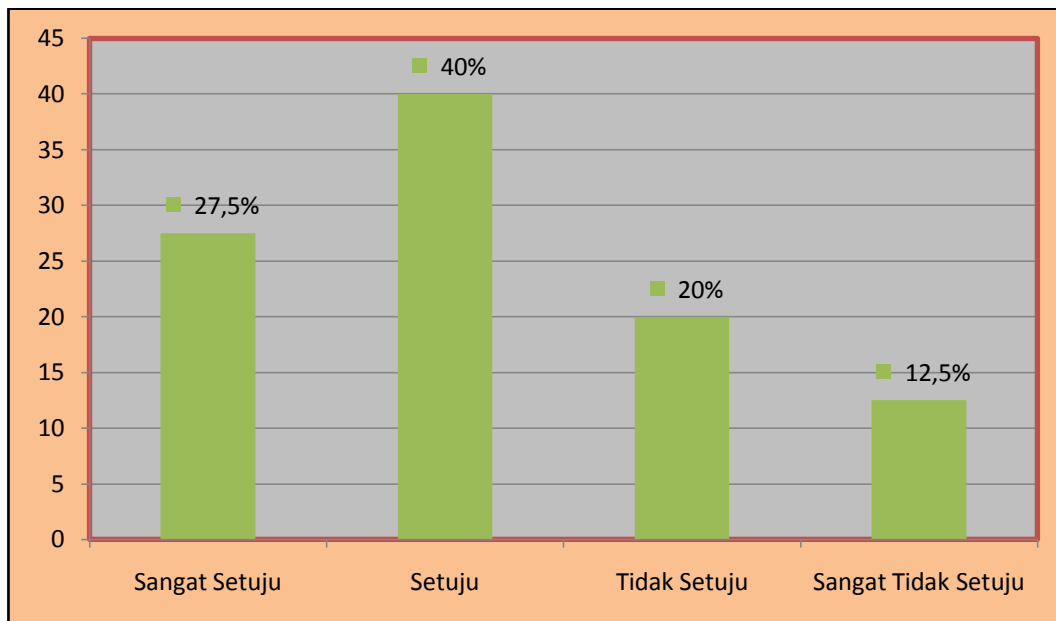
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 17)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 21 responden menjawab setuju dengan persentase 52,5%, 9 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 22,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 21 responden dengan persentase 52,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan telah membantu para pegawai dalam penerapan *government* di Untirta. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan adalah pelatihan pada aplikasi e-administrasi, yakni surat *online*. Disisi lain terdapat 9 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 22,5%. Hal tersebut karena mereka merasakan tidak adanya pelatihan yang diberikan sehingga menurutnya tidak menjadikan mereka merasa terbantu terhadap pekerjaannya.

Kesepuluh , didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan menghasilkan inovasi yang lebih baik dari hasil pelatihan dalam meningkatkan pelayanan sebagai berikut:

Grafik 4.19
Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Di Bidang TI Yang Dilakukan
Menghasilkan Inovasi Yang Lebih Baik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 18)

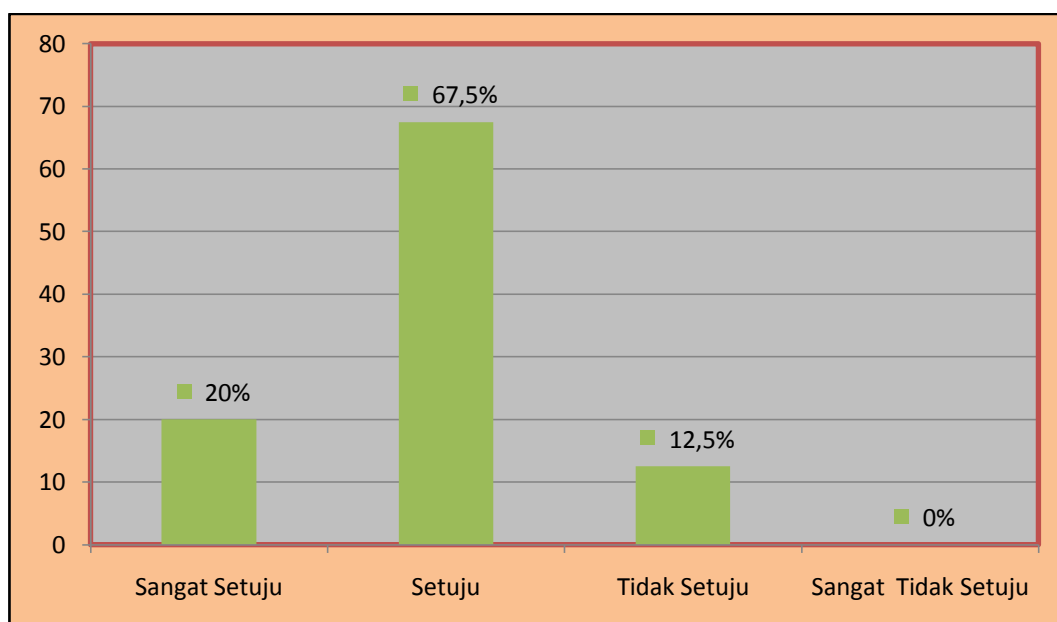
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 27,5%, 16 responden menjawab setuju dengan persentase 40%, 8 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, dan 5 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 12,5%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 16 responden dengan persentase 40%. Hal ini dapat diartikan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan menghasilkan inovasi yang lebih baik dari hasil pelatihan dalam meningkatkan pelayanan, hal tersebut dibuktikan dengan lebih mudah dan cepatnya para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan untuk 8 responden dengan persentase 20% menjawab

tidak setuju, hal ini dikarenakan mereka merasa tidak terdapat inovasi yang lebih baik, dikarenakan tidak adanya pelatihan dan mengembangkan kompetensi yang mereka diterima.

Kesebelas, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan penerapan *e-government* telah menghemat pekerjaan Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Grafik 4.20
Penerapan *E-Government* Menghemat Pekerjaan Dalam Memberikan Pelayanan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 19)

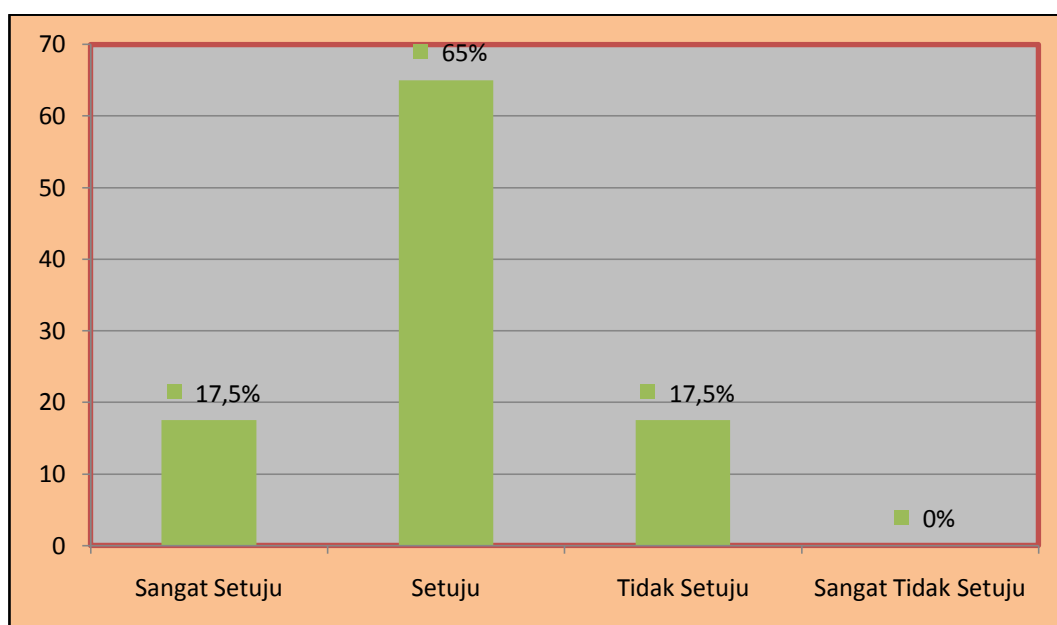
Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 5

responden menjawab tidak setuju dengan persentase 12,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-government* telah menghemat pekerjaan para pegawai dalam memberikan pelayanan, hal ini terbukti dengan lebih cepat dan lebih mudahnya para pegawai dalam memberikan pelayanan. Namun 5 responden dengan persentase 12,5% menjawab tidak setuju, dikarenakan menurutnya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilakukan manual, seperti pekerjaan untuk pemasangan baliho dan berkas-berkas dokumen yang masih menggunakan kertas dan tinta.

Keduabelas, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan penerapan *e-government* telah menghemat biaya dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Grafik 4.21
Penerapan *E-Government* Menghemat Biaya Dalam Memberikan Pelayanan



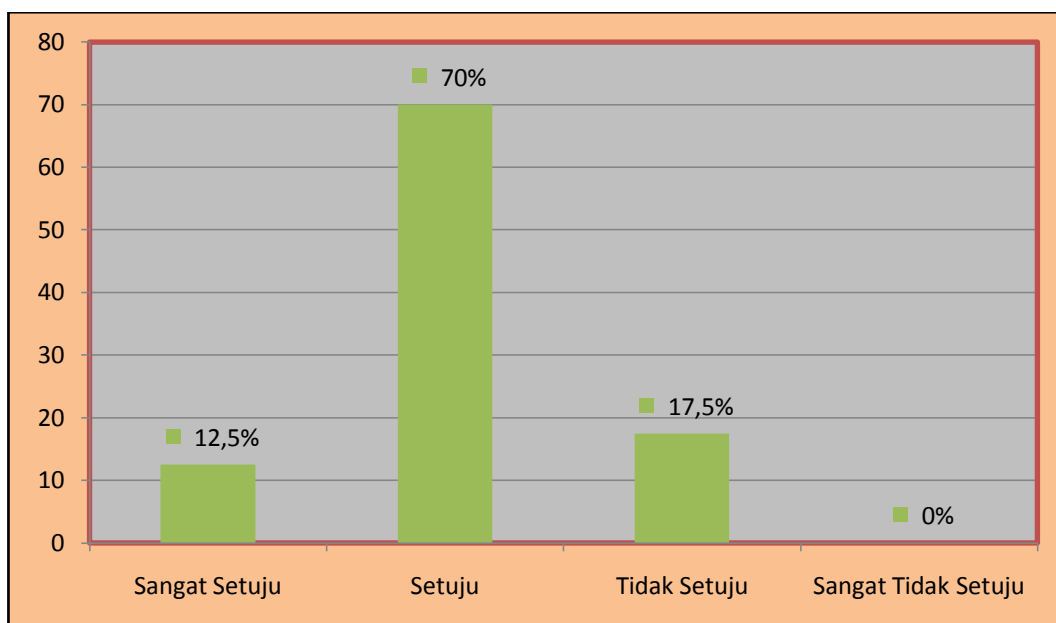
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 20)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 17,5%, 26 responden menjawab setuju dengan persentase 65%, 7 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 17,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 26 responden dengan persentase 65,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-government* telah menghemat biaya dalam memberikan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan lebih berkurangnya pekerjaan yang mengeluarkan biaya seperti untuk pembelian kertas dan tinta. Sedangkan 7 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 17,5%, hal tersebut dikarenakan masih adanya pekerjaan yang memerlukan biaya, seperti untuk pembelian kertas dan tinta

Ketigabelas, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan penerapan *e-government* telah menghemat waktu Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Grafik 4.22
Penerapan *E-Government* Menghemat Waktu Dalam Memberikan Pelayanan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 21)

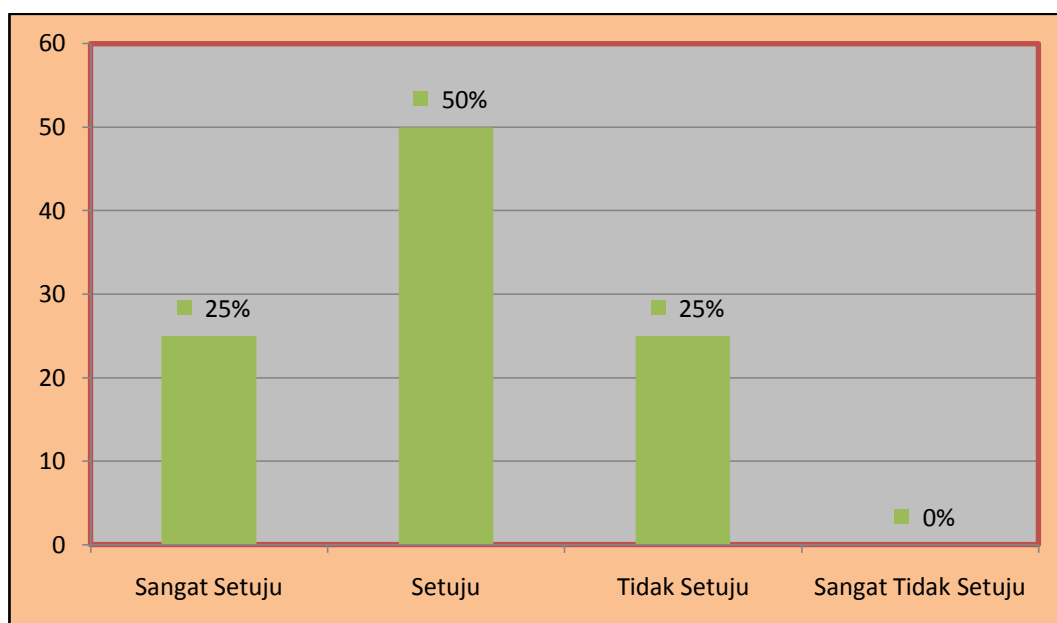
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden dengan persentase 12,5%, 28 responden menjawab setuju dengan persentase 70%, 7 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 17,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 28 responden dengan persentase 70%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-government* telah menghemat waktu para pegawai dalam memberikan pelayanan, hal tersebut dibuktikan dengan lebih cepatnya para pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaannya, dikarenakan tidak harus mendatangi langsung lokasi/tempat yang menjadi tujuan, yakni dapat dikerjakan dimana saja dan kapan saja.

Keempatbelas, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan ketersediaan sarana berupa unit komputer telah memadai dalam penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.23
Ketersediaan Sarana Berupa Unit Komputer Telah Memadai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 22)

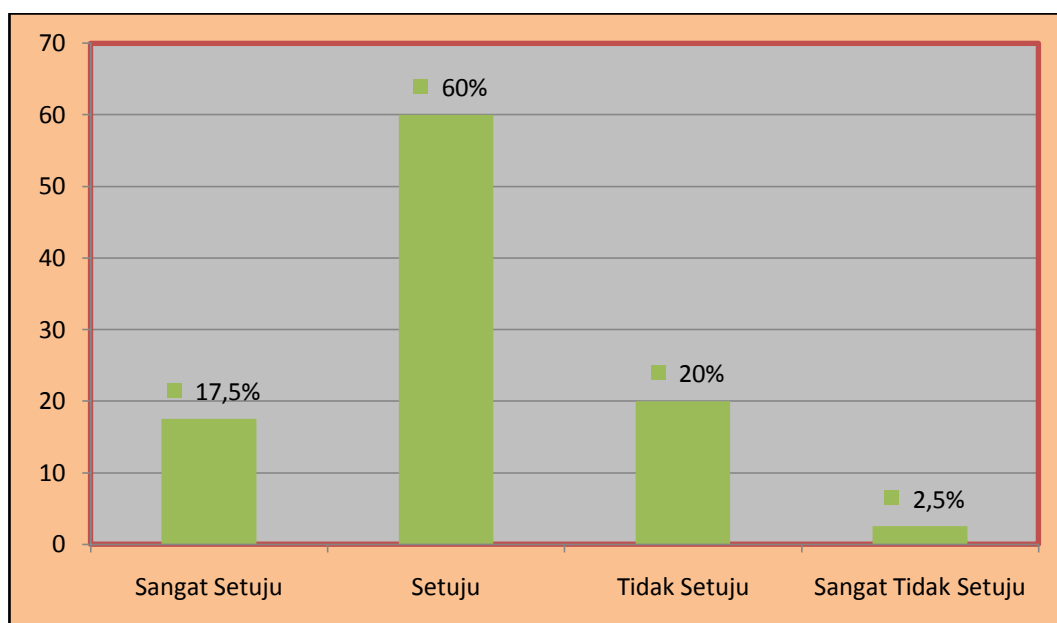
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 20 responden menjawab setuju dengan persentase 50%, 10 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 25%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 20 responden dengan persentase 50%. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan

sarana berupa unit komputer telah memadai dalam penerapan *e-government*, hal tersebut dibuktikan dengan sudah terpenuhinya unit komputer pada setiap pegawai dalam menunjang pekerjaannya. Akan tetapi 10 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, karena masih kurangnya unit komputer yang tersedia dalam menunjang pekerjaannya.

Kelimabelas, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan ketersediaan prasarana berupa *software* atau sistem aplikasi dalam penerapan *e-government* telah memadai sebagai berikut:

Grafik 2.24
Ketersediaan Prasarana Berupa *Software* Atau Sistem Aplikasi Dalam Penerapan *E-Government* Telah Memadai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 24)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 17,5%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 8

responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 2,5%.

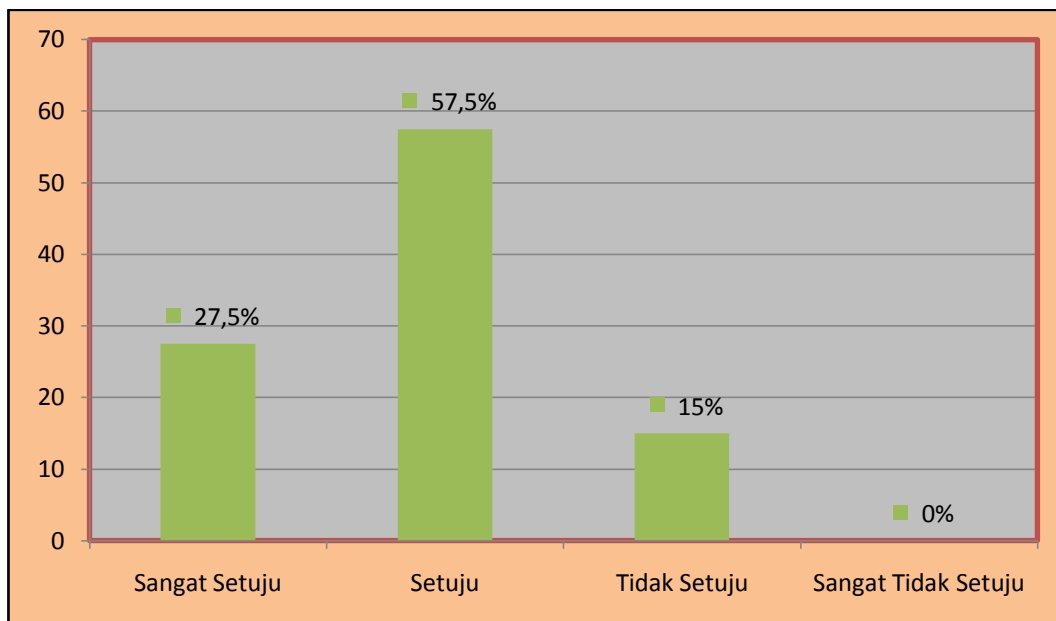
Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwaketersediaan prasarana berupa *software* atau sistem aplikasi dalam penerapan *e-government* telah memadai, hal ini dibuktikan dengan adanya sistem aplikasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna layanan, sehingga dapat memudahkan para pegawai juga dalam memberikan pelayanan.

4.3.2.3 Dimensi Partisipasi

Terdapat 7 pernyataan yang berhubungan dengan Dimensi Partisipasi, antara lain

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat aplikasi khusus guna berkomunikasi melalui *website* dengan civitas akademik sebagai berikut:

Grafik 4.25
Terdapat Aplikasi Khusus Guna Berkomunikasi Melalui *Website* Seperti Ruang Kritik dan Saran Dengan Civitas Akademik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 26)

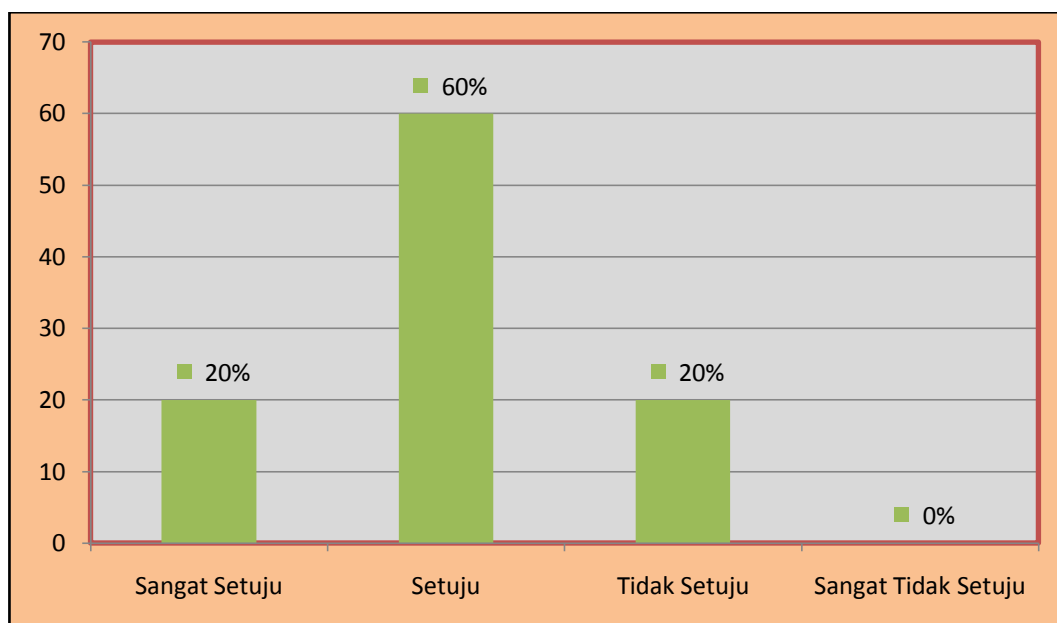
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 27,5%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 6 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 57,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat aplikasi khusus guna berkomunikasi melalui *website* (seperti ruang kritik dan

saran) dengan civitas akademik, terbukti dengan adanya adanya masukan-masukan yang diterima penyedia layanan dari para pengguna layanan.

Kedua,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan aplikasi khusus yang disediakan guna berkomunikasi dengan civitas akademik melalui *website* seperti ruang krtitik dan saran berjalan efektif sebagai berikut:

Grafik 4.26
Aplikasi Khusus Yang Disediakan Guna Berkomunikasi Seperti Ruang Krtitik Dan Saran Berjalan Efektif



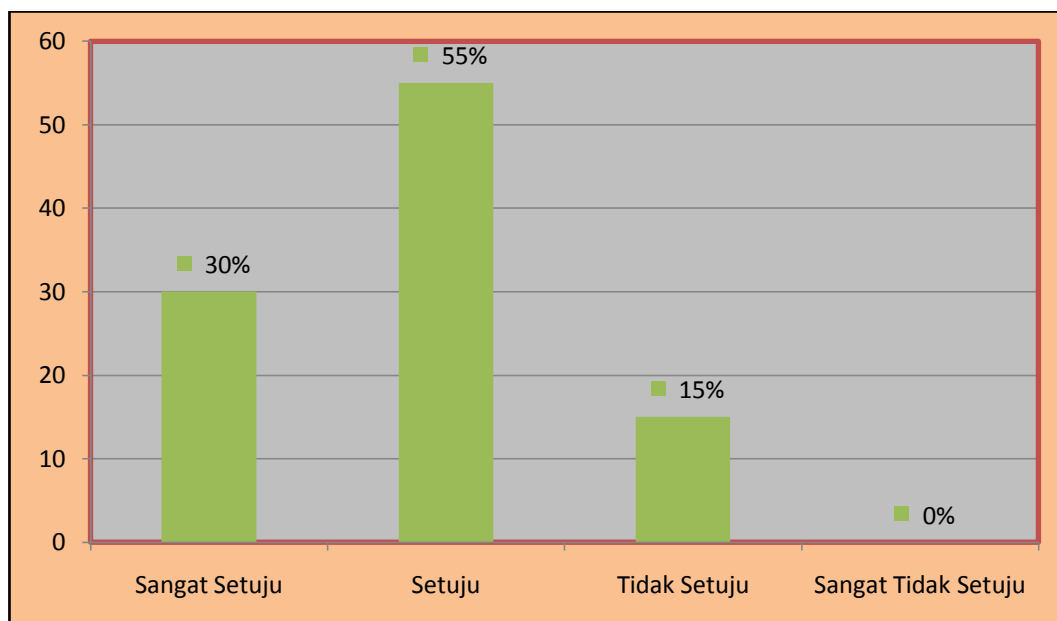
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 27)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 8 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab tidak setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa aplikasi khusus yang disediakan guna berkomunikasi dengan civitas akademik melalui *website* seperti ruang kritik dan saran berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi yang diberikan oleh pengguna layanan.

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan civitas akademik memberikan respon yang baik kepada para Bapak/Ibu dengan adanya ruang kritik dan saran sebagai berikut:

Grafik 4.27
Civitas Akademik Memberikan Respon Yang Baik Dengan Adanya Ruang Kritik Dan Saran



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 28)

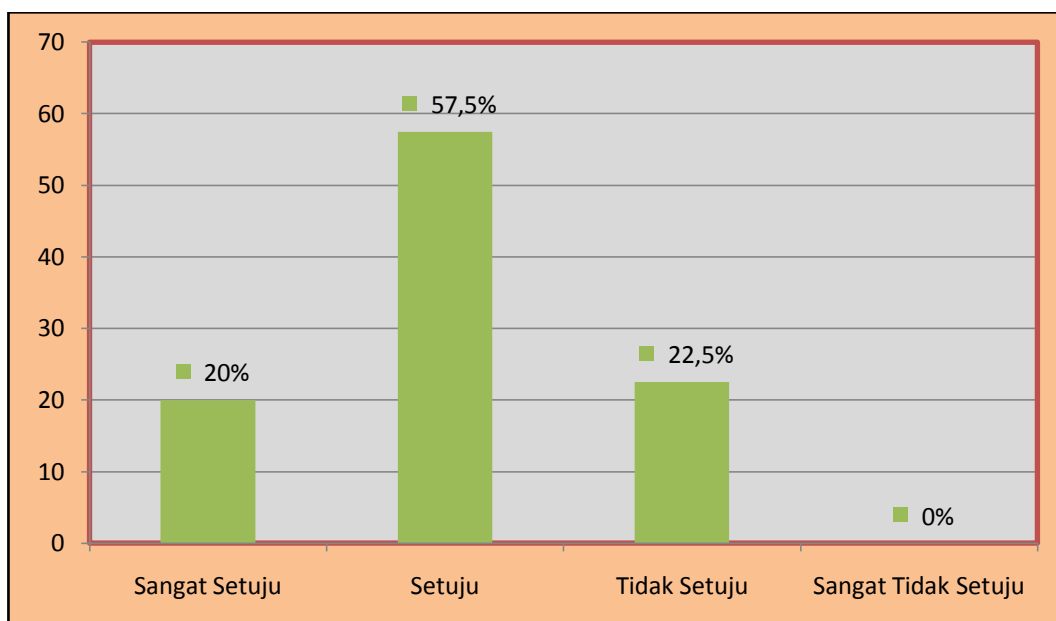
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden dengan persentase 30%, 22 responden menjawab setuju dengan persentase 55%, 6

responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab tidak setuju yang berjumlah 22 responden dengan persentase 55%. Hal ini dapat diartikan bahwa civitas akademik memberikan respon yang baik kepada penyedia layanan dengan adanya ruang kritik dan saran, hal ini dibuktikan dengan adanya masukan yang diberikan pengguna layanan kepada penyedia layanan.

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan dengan adanya ruang kritik dan saran yang tersedia mempengaruhi para pimpinan dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

Grafik 4.28
Ruang Kritik Dan Saran Yang Tersedia Mempengaruhi Para Pimpinan Dalam Mengambil Keputusan



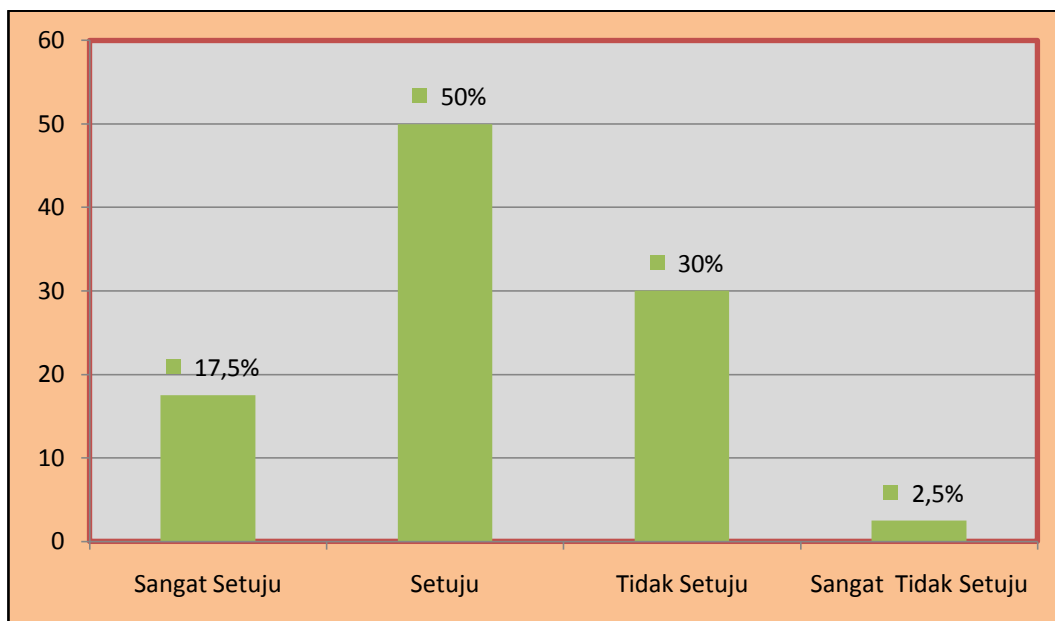
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 29)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 9 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 22,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 57,5%. Hal ini dapat diartikan bahwadengan adanya ruang kritik dan saran yang tersedia mempengaruhi para pimpinan dalam mengambil keputusan. Hal ini tersebut dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Kelima,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan *e-government* di Untirta sebagai berikut:

Grafik 4.29
Terdapat Kerjasama Dengan Pihak Swasta Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 30)

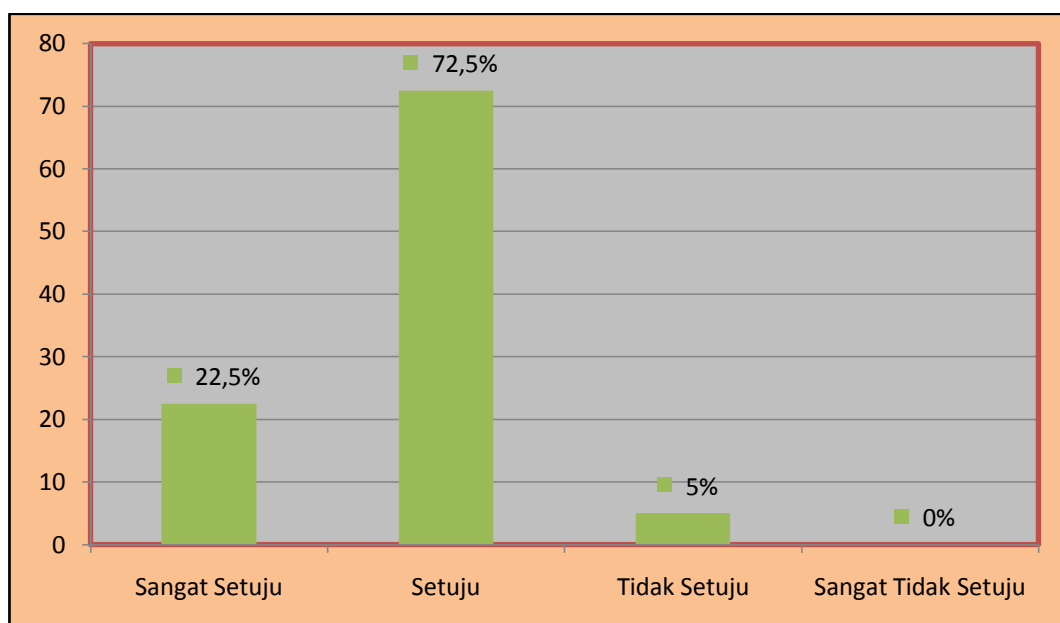
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 17,5%, 20 responden menjawab setuju dengan persentase 50%, 12 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 30%, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 2,5%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 20 responden dengan persentase 50%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan *e-government* di Untirta. Akan tetapi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia tersebut langsung ditangani oleh pihak universitas, dimana untuk setiap unit hanya tinggal menerima saja, setelah

sebelumnya memberikan pengajuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan setiap unit.

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan sistem koordinasi yang terjalin di internal oleh Pusdainfo berjalan baik dalam menunjang penerapan *e-government* di Untirta sebagai berikut:

Grafik 4.30
Koordinasi Yang Terjalin Di Internal Oleh Pusdainfo Berjalan Baik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 31)

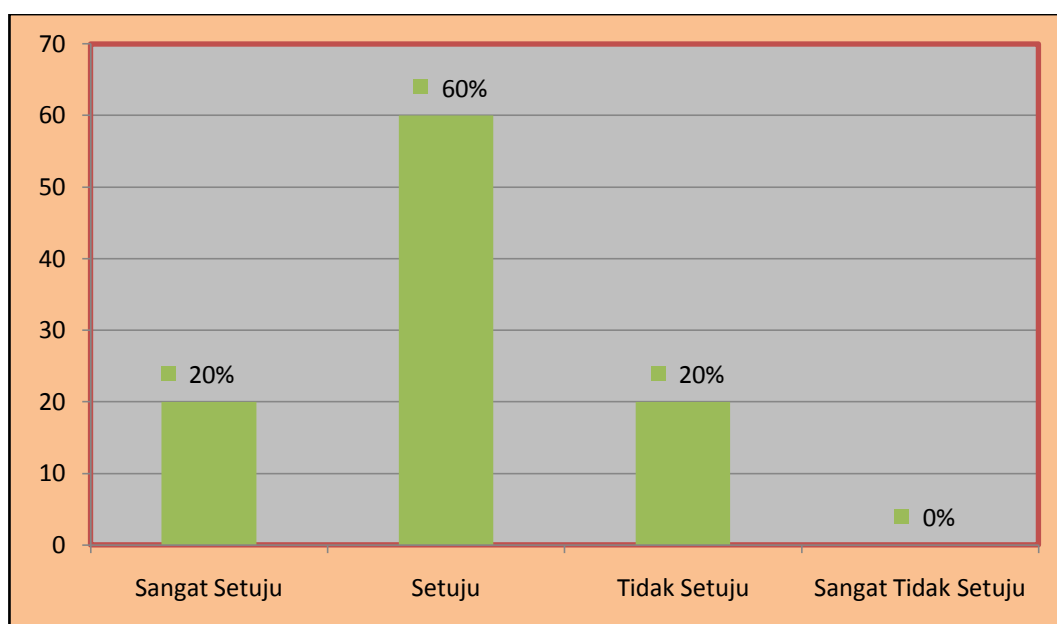
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 22,5%, 29 responden menjawab setuju dengan persentase 72,5%, 2 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 29 responden dengan persentase 72,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem

koordinasi yang terjalin di internal oleh Pusdainfo berjalan baik dalam menunjang penerapan *e-government* di Untirta, hal ini dikarenakan adanya pelatihan yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi para pegawai.

Ketujuh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan sistem koordinasi yang terjalin dengan pihak luar berjalan baik dalam penerapan *e-government* di Untirta sebagai berikut:

Grafik 4.31
Koordinasi Yang Terjalin Dengan Pihak Luar Berjalan Baik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 32)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 8 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 20%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

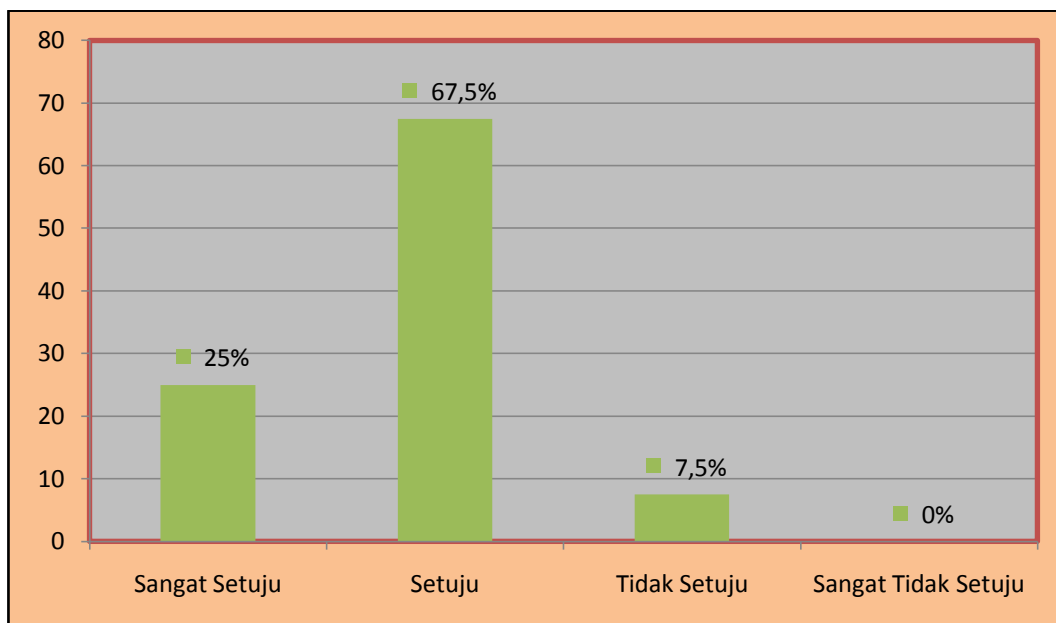
Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem koordinasi yang terjalin dengan pihak luar berjalan baik dalam penerapan *e-government* di Untirta. Hal ini dibuktikan dengan hubungan koordinasi yang terjalin baik selama ini, dengan saling menjaga kepercayaan, demi terjalinnya kerjasama yang lebih baik.

4.3.2.4 Dimensi Transparansi

Terdapat 6 pernyataan yang berhubungan dengan Dimensi Transparansi, antara lain:

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan penerapan *e-government* di Untirta meningkatkan keterbukaan informasi untuk publik sebagai berikut:

Grafik 4.32
Penerapan *E-Government* Di Untirta Meningkatkan Keterbukaan Informasi Untuk Publik



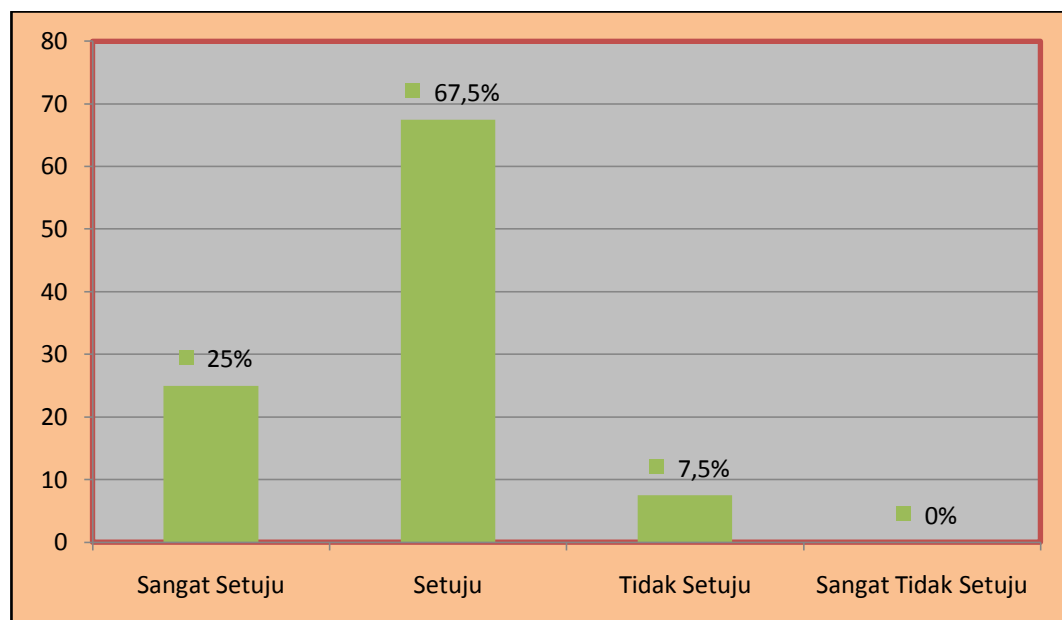
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 33)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-government* di Untirta meningkatkan keterbukaan informasi untuk publik. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang telah dipublikasikan sehingga dapat membantu pengguna layanan untuk mendapatkan informasi secara lebih mudah dan cepat.

Kedua,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan informasi yang saya berikan telah mencukupi akan transparansi kepada civitas akademik sebagai berikut:

Grafik 4.33
Informasi Yang Berikan Mencukupi Transparansi Kepada Civitas Akademik



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 34)

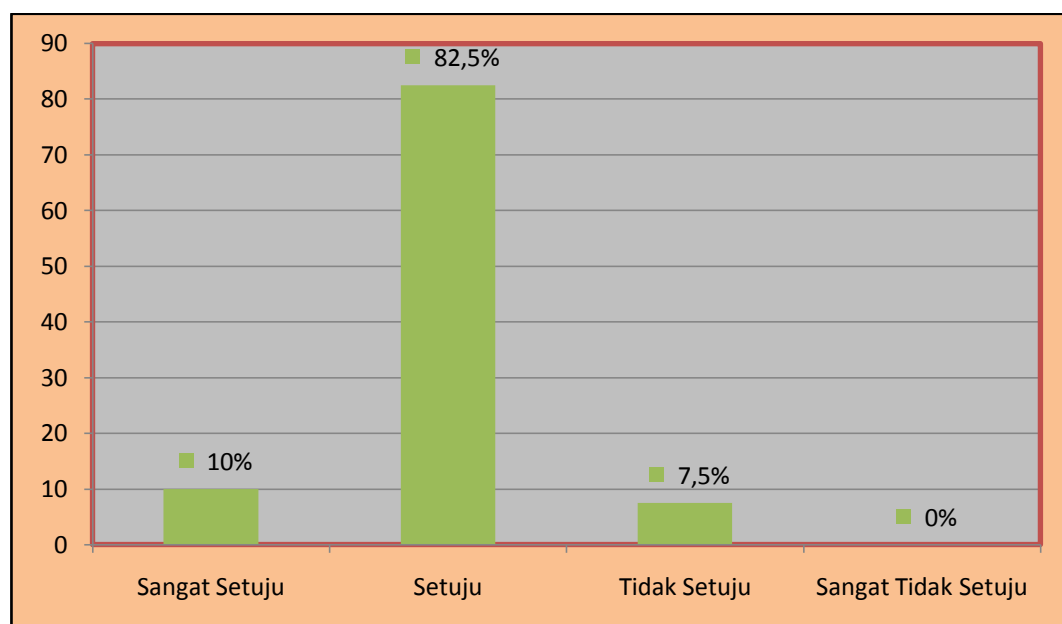
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa informasi diberikan para penyedia layanan telah mencukupi akan transparansi kepada

civitas akademik. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan penyedia layanan disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna layanan.

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan menurut saya Informasi yang saya berikan kepada civitas akademik sudah transparan baik dari segi keakuratan data, kelengkapan, ketepatan waktu dan relevansinyasebagai berikut:

Grafik 4.34
Informasi Yang Diberikan Sudah Transparan



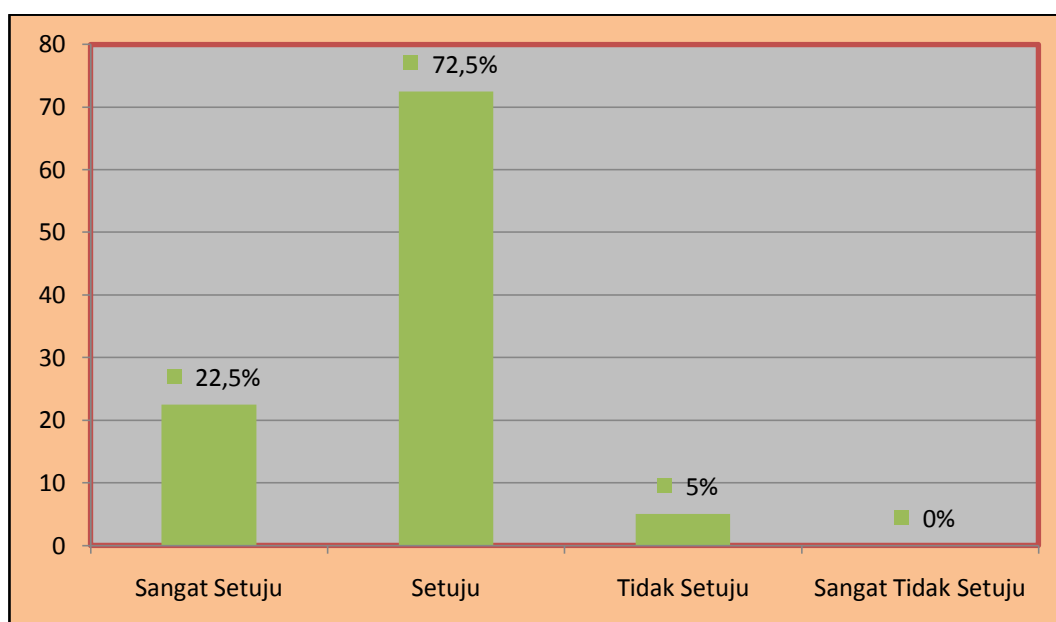
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 35)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 4 responden dengan persentase 4%, 33 responden menjawab setuju dengan persentase 82,5%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 33 responden dengan persentase 82,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa menurut para penyedia layanan informasi diberikan kepada civitas akademik sudah transparan baik dari segi keakuratan data, kelengkapan, ketepatan waktu dan relevansinya. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan kepada pengguna layanan telah sesuai dengan sebenar-benarnya yang terjadi, selain itu juga informasi tersebut dipublikasikan sesuai dengan waktunya.

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat pembaharuan informasi yang diberikan kepada civitas akademik dalam penerapan *e-government* di Untirta sebagai berikut:

Grafik 4.35
Terdapat Pembaharuan Informasi Yang Diberikan Kepada Civitas Akademik



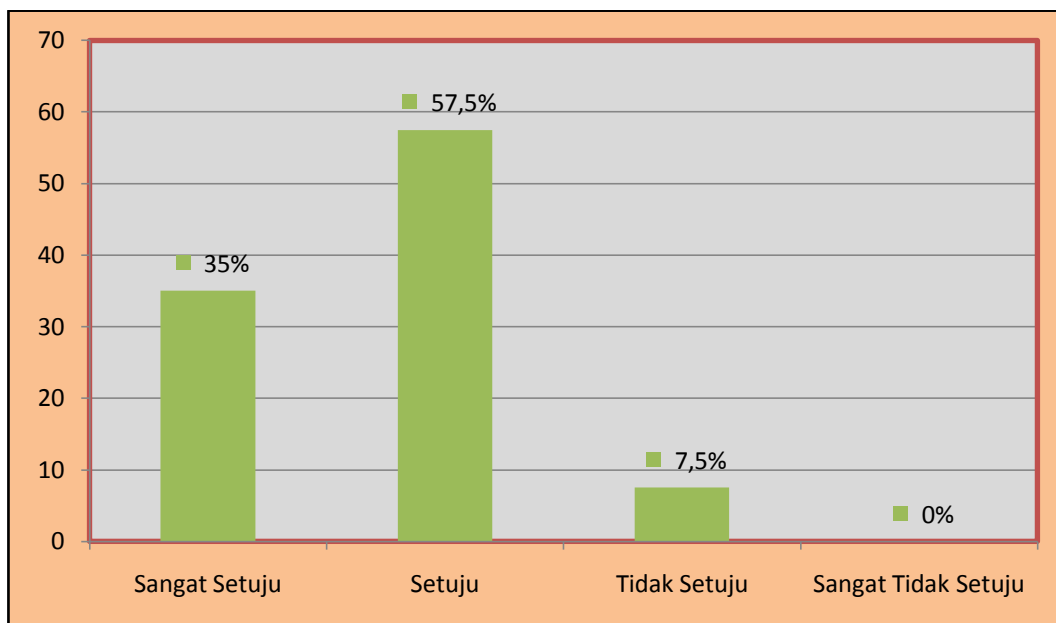
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 36)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 29%, 29 responden menjawab setuju dengan persentase 72,5%, 2 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 29 responden dengan persentase 72,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pembaharuan informasi yang diberikan kepada civitas akademik dalam penerapan *e-government* di Untirta, hal ini dibuktikan dengan adanya *updating* informasi yang dilakukan penyedia layanan agar informasi yang diberikan tidak monoton, oleh karenanya informasi yang diberikan pun terus mengikuti perkembangan.

Kelima,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan dalam menunjang transparansi kepada civitas akademik media elektronik/ internet sangat dibutuhkan sebagai berikut:

Grafik 4.36
Dalam Menunjang Transparansi Media Elektronik/ Internet Sangat Dibutuhkan



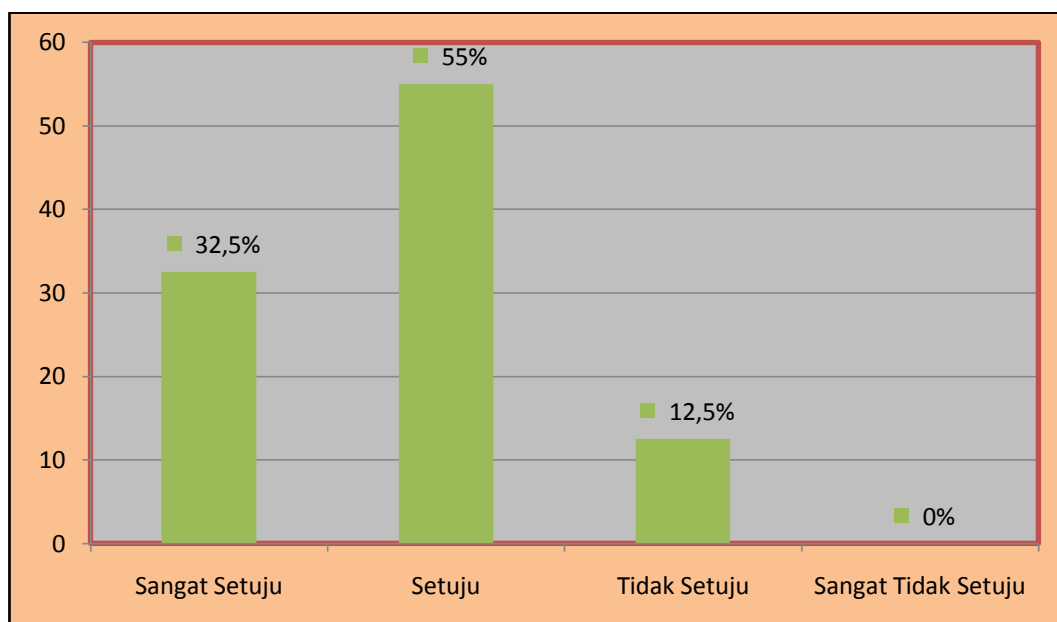
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 37)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden dengan persentase 35%, 23 responden menjawab setuju dengan persentase 57,5%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 23 responden dengan persentase 57,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menunjang transparansi kepada civitas akademik media elektronik/ internet sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan media elektronik/ internet tersebut merupakan salah satu faktor penunjang kelancaran para pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya, seperti untuk *download* dan *upload* informasi.

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan keterbukaan informasi yang diberikan mendapatkan respon yang positif dari civitas akademik sebagai berikut:

Grafik 4.37
Keterbukaan Informasi Yang Diberikan Mendapatkan Respon Yang Positif



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 38)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 32,5%, 22 responden menjawab setuju dengan persentase 55%, 5 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 12,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 22 responden dengan persentase 55%. Hal ini dapat diartikan bahwa keterbukaan informasi yang diberikan mendapatkan respon yang positif dari civitas akademik,

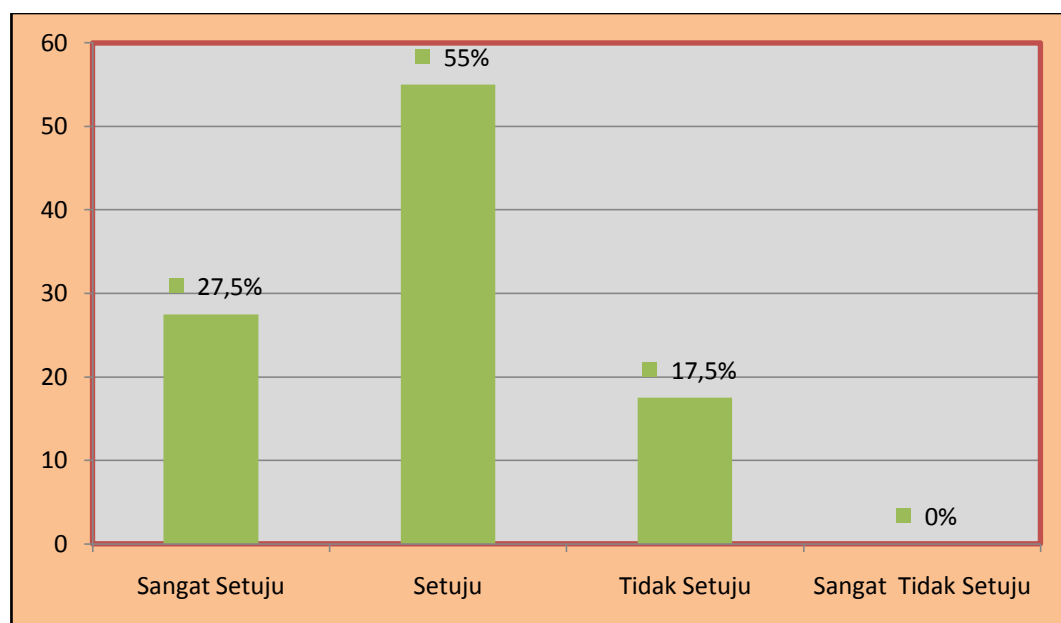
hal ini dikarenakan dengan adanya keterbukaan informasi yang diberikan , maka dapat membantu para pengguna layanan dalam mendapatkan informasi.

4.3.2.5 Dimensi Manajemen Perubahan

Terdapat 6 pernyataan yang berhubungan dengan Dimensi Manajemen Perubahan, antara lain:

Pertama,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan penerapan *e-government* di Untirta telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebagai berikut:

Grafik 4.38
Penerapan *E-Government* Di Untirta Sesuai Dengan Perencanaan Yang Telah Ditentukan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 39)

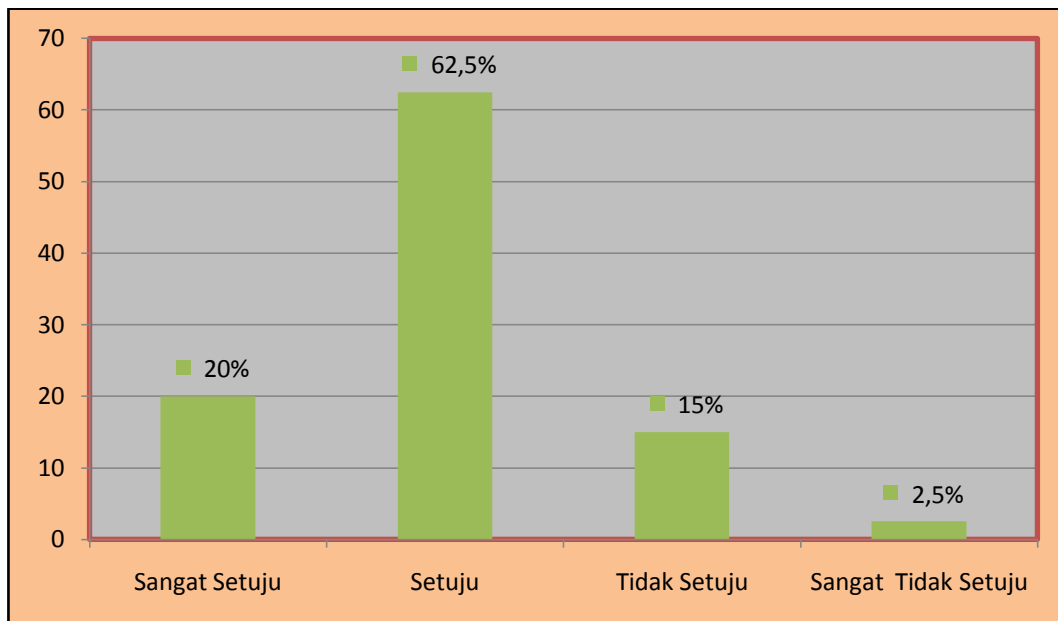
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden dengan

persentase 27,5%, 22 responden menjawab setuju dengan persentase 55%, 7 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 17,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 22 responden dengan persentase 55%. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-government* di Untirta telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan berdasarkan pada visi dan misi Untirta, hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan *e-government* tersebut yang dapat membantu para pengguna layanan dalam mendapatkan informasi, selain itu juga dengan adanya *e-government* dapat membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih mudah dan cepat.

Kedua,didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat pengembangan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan sebagai berikut:

Grafik 4.39
Terdapat Pengembangan Strategi Yang Dilakukan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 40)

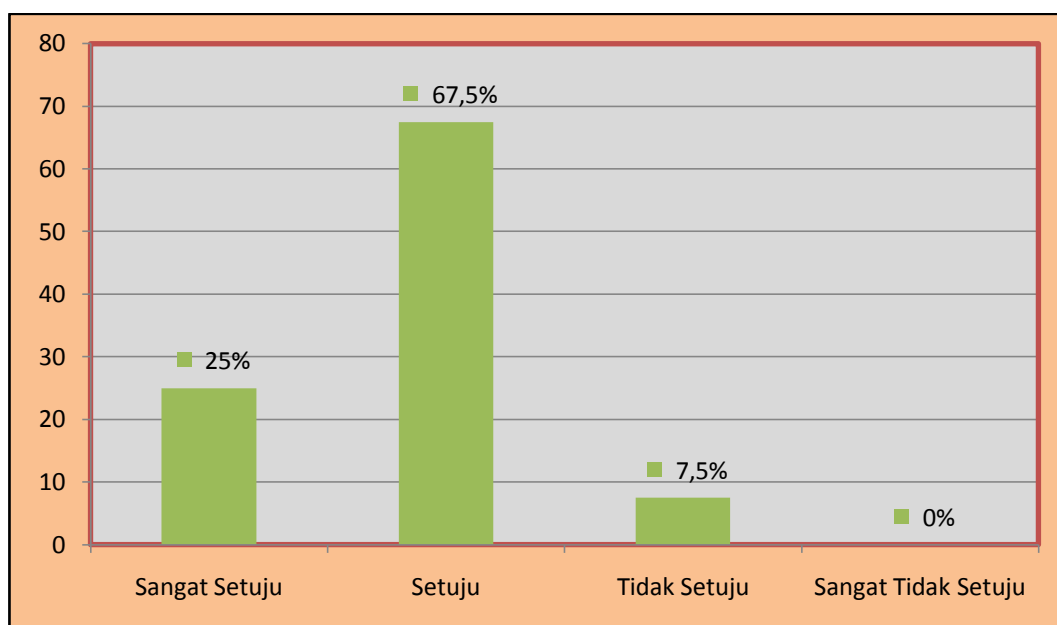
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, 25 responden menjawab setuju dengan persentase 62,5%, 6 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, dan 1 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 2,5%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 25 responden dengan persentase 62,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengembangan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan, hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan seperti untuk pelatihan dalam penyesuaian *e-administrasi* untuk menunjang kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan. Namun 6

responden menjawab tidak setuju dengan persentase 15%, hal ini dikarenakan mereka merasa tidak adanya pelatihan-pelatihan yang diterima dalam rangka pengembangan strategis untuk mencapai tujuan.

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat pengawasan seperti *updating* informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan *database(Epsbed)* yang dilakukan oleh Pusdainfo dengan baik dalam penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.40
Terdapat Pengawasan Seperti *Updating* Informasi Dari Fakultas Atau Jurusan, Dan *Database(Epsbed)*



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 41)

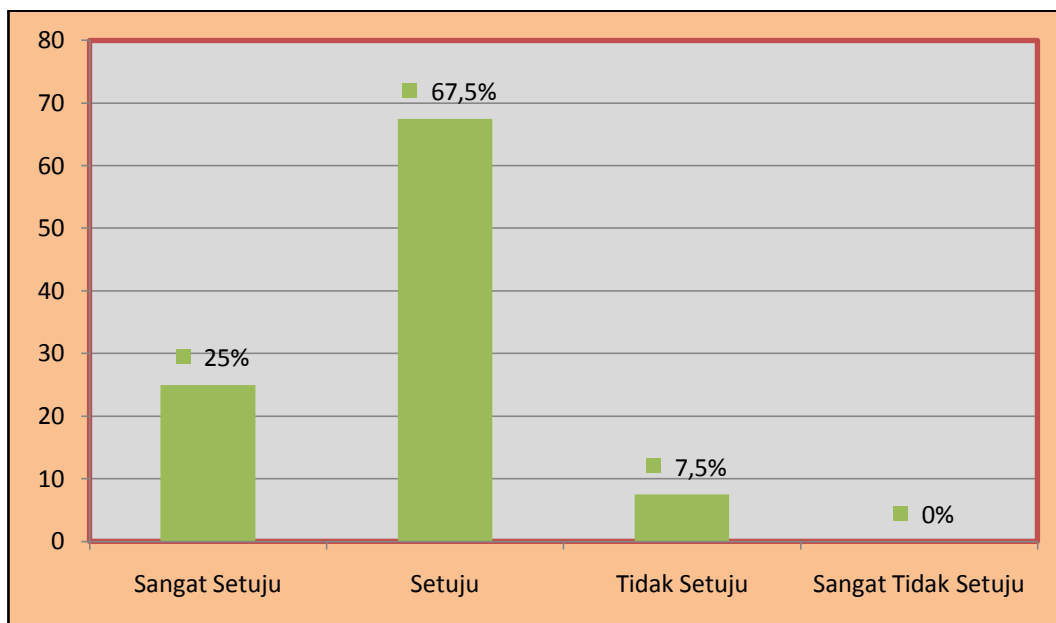
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%,

3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengawasan seperti *updating* informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan *database(Epsbed)* yang dilakukan oleh Pusdainfo dengan baik dalam penerapan *e-government*, akan tetapi untuk para pegawai selain dari pegawai Pusdainfo, untuk pengawasannya langsung dilakukan oleh pimpinan tiap unit masing-masing. Dalam hal ini bentuk pengawasannya dilakukan dengan cara mengingatkan secara personal kepada pegawai yang bersangkutan untuk dapat melakukan pembaharuan informasi agar informasi yang diberikan terus mengikuti perkembangan yang ada

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan terdapat evaluasi *updating* informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan *database(Epsbed)* yang dilakukan oleh Pusdainfo dengan baik dalam penerapan *e-government* sebagai berikut:

Grafik 4.41
Terdapat Evaluasi *Updating* Informasi Dari Fakultas Atau Jurusan, Dan Database (*Epsbed*)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 42)

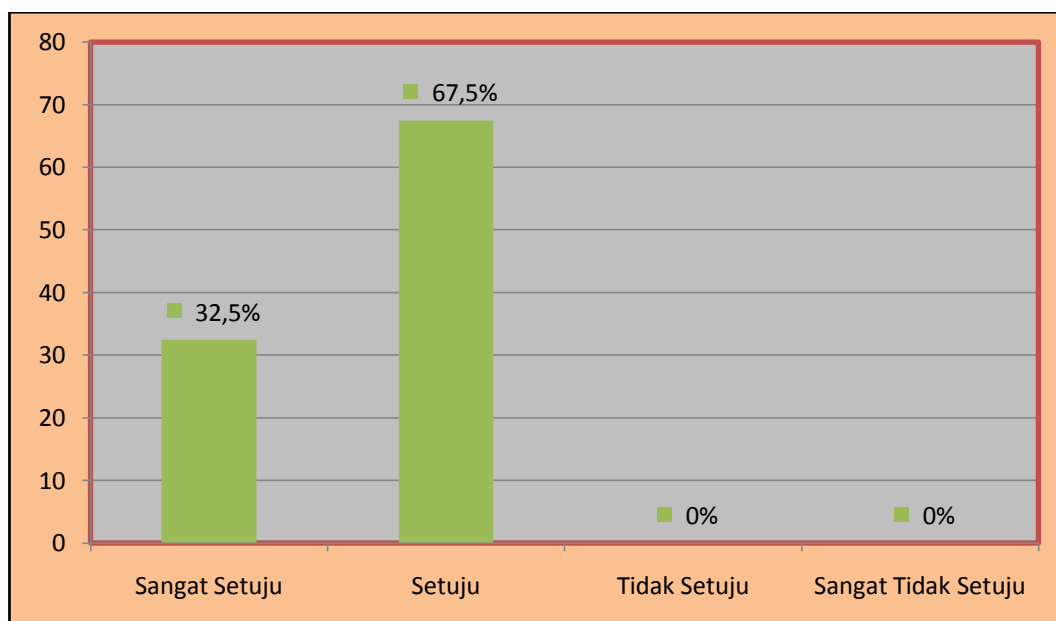
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 25%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 3 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat evaluasi *updating* informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan database (*Epsbed*) yang dilakukan oleh Pusdainfo dengan baik dalam penerapan *e-government*, akan tetapi untuk bentuk evaluasi yang dilakukan biasanya digabungkan dengan evaluasi kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan pada rapat-rapat pimpinan. Sedangkan

bahan evaluasi yang diambil adalah terkait permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi seperti permasalahan portal yang lambat untuk dapat dibuka dan koneksi jaringan yang sering mengalami gangguan.

Kelima, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan evaluasi yang dilakukan dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada masa selanjutnya sebagai berikut:

Grafik 4.2
Evaluasi Yang Dilakukan Dijadikan Sebagai Masukan Untuk Meningkatkan Pelayanan



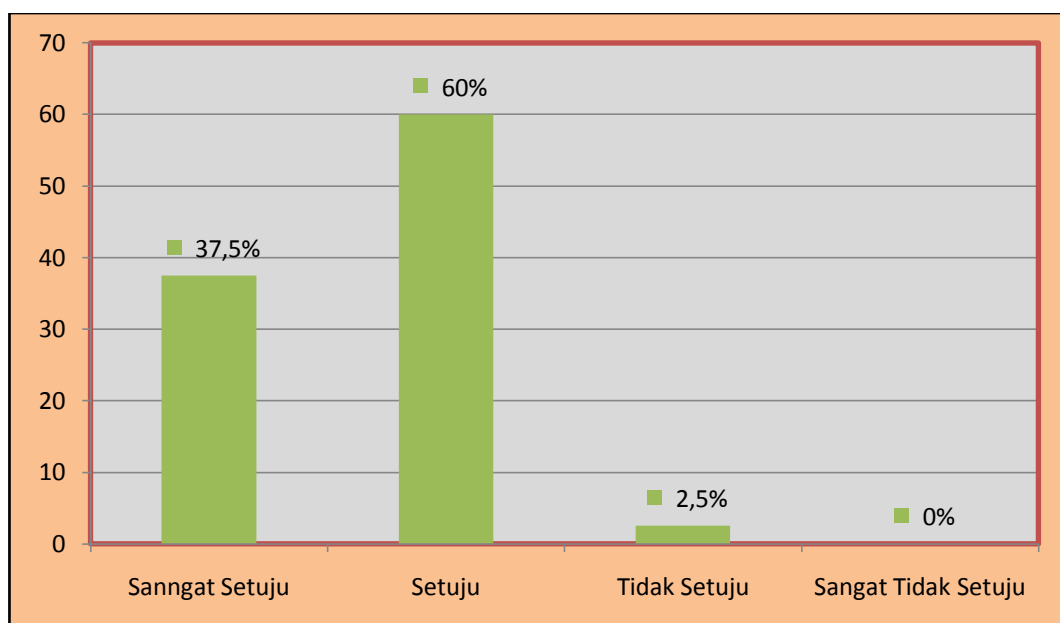
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 43)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 32,5%, 27 responden menjawab setuju dengan persentase 67,5%, 0 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 0%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 27 responden dengan persentase 67,5%. Hal ini dapat diartikan bahwa evaluasi yang dilakukan dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada masa selanjutnya. Untuk bahan evaluasinya sendiri diambil dari permasalahan yang tengah dihadapi yakni diambil dari masukan-masukan dari pengguna layanan. hal ini dilakukan agar segala sesuatu yang kurang baik diharapkan kedepannya dapat diperbaiki dan tidak akan terulang kembali, selain itu juga agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden dari pernyataan dengan adanya evaluasi memotivasi pegawai untuk meningkatkan pelayanan sebagai berikut:

Grafik 4.43
Adanya Evaluasi Memotivasi Pegawai Untuk Meningkatkan Pelayanan



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015 (Kuesioner No. 44)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden untuk pernyataan tersebut yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden dengan persentase 37,5%, 24 responden menjawab setuju dengan persentase 60%, 1 responden menjawab tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan 0 responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan persentase 0%.

Jawaban mayoritas responden menjawab setuju yang berjumlah 24 responden dengan persentase 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya evaluasi memotivasi pegawai untuk meningkatkan pelayanan, hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan.

4.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis deskriptif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yakni yang berkenaan dengan variabel mandiri, oleh karena itu dalam penelitian ini hipotesis yang peneliti gunakan adalah hipotesis deskriptif. Adapaun hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa” adalah sebagai berikut:

Ho : “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masih kurang baik $\leq 75\%$ ”.

Ha : “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik $> 75\%$ ”.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis yang akan peneliti lakukan adalah dengan menggunakan rumus t-test satu sampel dengan uji pihak kanan. Adapun untuk perhitungan pengujian hipotesis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{Variabel penerapan } e\text{-Government} &= 4 \times 40 \times 40 \\ &= 6400 \end{aligned}$$

Keterangannya 4 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini berdasarkan pada skala Likert), 40 adalah jumlah pernyataan yang ada dan 40 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Sehingga didapatkan nilai mean atau rata-ratanya adalah $= 6400 : 40 = 160$.

Dalam penelitian yang berjudul penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, nilai yang dihipotesiskan adalah teringgi 75% dari yang diharapkan. Oleh karena itu, berarti $0,75 \times 6400 = 480$ dibagi $40 = 120$. Untuk hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho : “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masih kurang baik $\leq 75\%$ ”.

Ha : “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik atau $> 75\%$ ”.

Atau dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0: \mu \leq 75\% \leq 0,75 \times 6400 : 40 = 120$$

$$H_a: \mu > 75\% > 0,75 \times 6400 : 40 = 120$$

Diketahui:

$$\bar{X} = \frac{4959}{40} = 123,97$$

$$\mu_0 = 120$$

$$s = 14,71$$

Ditanya: t ?

Jawab:

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{123,97 - 120}{\frac{14,71}{\sqrt{40}}} \\ &= \frac{3,97}{\frac{14,71}{\sqrt{40}}} \\ &= \frac{3,97}{2,32} \\ &= 1,706 \end{aligned}$$

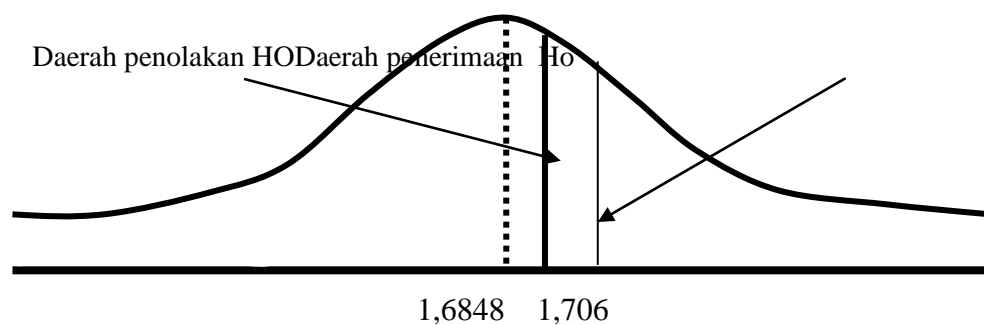
Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(dk) = (n - 1) = (40 - 1) = 39$ dan taraf kesalahan $\alpha = 5\%$ untuk uji

satu pihak kanan (*one tail test*), karena nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} atau H_0 ($1,706 > 1,6848$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu:

$$\frac{4959}{6400} \times 100\% = 77,48\%$$

Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar 77,48%.



Gambar 4.2
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis
Uji Hipotesis Pihak Kanan

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

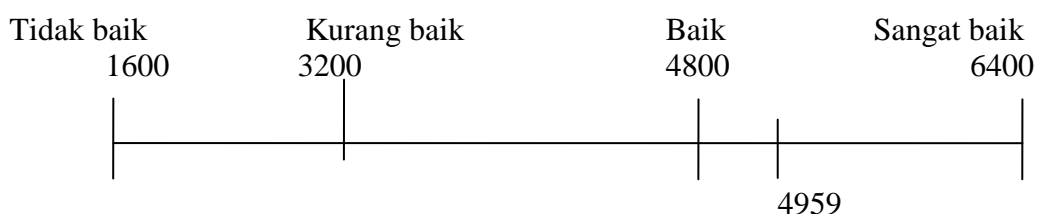
Penelitian dengan judul Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bahwa hal yang terpenting adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti pada awal penelitian. Rumusan tersebut

adalah “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kita dapat melihat dari pembahasan yang memaparkan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan menguji pihak kanan bahwa harga t hitung lebih besar ($>$) dari harga t tabel dan hal itu dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena hasil pengujian hipotesis mencapai 77,48% dari angka yang hipotesiskan 75%.

Sehingga dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa “Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencapai angka 77,48%” dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 75%, ini artinya tingkat Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori berikut:

Kategori instrumen:



Nilai 4959 termasuk dalam kategori interval baik dan sangat baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati kategori baik.

4.6 Pembahasan

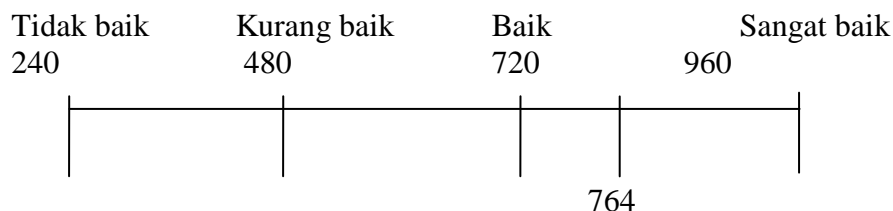
Dari pembahasan yang memaparkan tentang pengujian hipotesis di atas, menjelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari perhitungan tersebut terlihat

bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dikatakan baik.

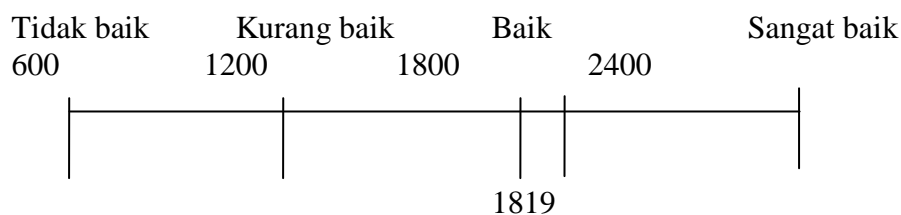
Pada penelitian ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah berdasarkan pada pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yakni berapa besar Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dimana berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal dilapangan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), dimana terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*. yaitu:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut, dalam hal ini yang dimaksudkan masyarakat adalah seluruh civitas akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada dalam indikator, peneliti memuat 6 butir instrumen pernyataan, sehingga didapatkan skor ideal dari dimensi manfaat adalah $4 \times 40 \times 6 = 960$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $40 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden, $6 =$ jumlah pernyataan yang ada pada indikator dimensi manfaat. Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $764 : 960 = 0,7958 \times 100 = 79,58\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik, jika dilihat dari dimensi manfaat. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini:

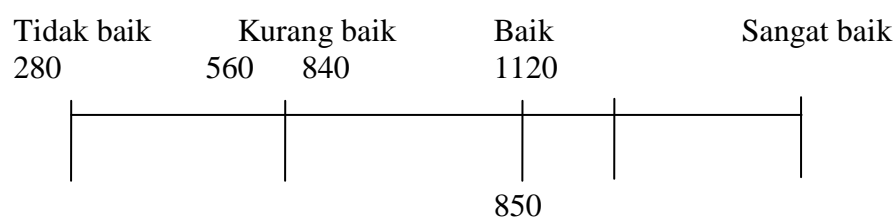


2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada dalam indikator, peneliti memuat 15 butir instrumen pernyataan, sehingga didapatkan skor ideal dari dimensi manfaat adalah $4 \times 40 \times 15 = 2400$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $40 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden, $15 =$ jumlah pernyataan yang ada pada indikator dimensi efisiensi. Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1819 : 2400 = 0,7579 \times 100 = 75,79\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik, jika dilihat dari dimensi efisiensi. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini:



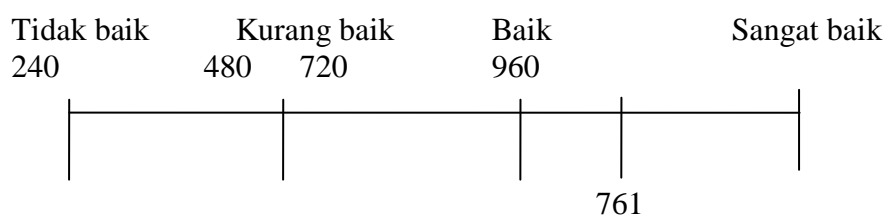
3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk

memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan, dalam hal ini yang dimaksudkan masyarakat adalah seluruh civitas akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada dalam indikator, peneliti memuat 7 butir instrumen pernyataan, sehingga didapatkan skor ideal dari dimensi manfaat adalah $4 \times 40 \times 7 = 1120$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $40 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden, $7 =$ jumlah pernyataan yang ada pada indicator dimensi efisiensi. Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $850 : 1120 = 0,7589 \times 100 = 75,89\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik, jika dilihat dari dimensi partisipasi. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini:

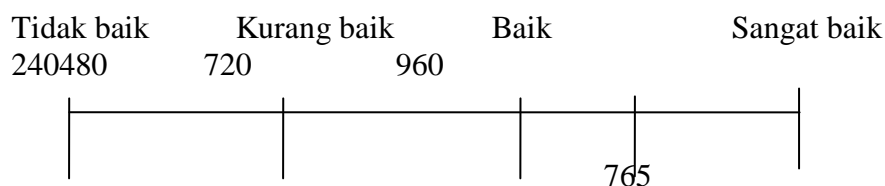


4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini, mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada dalam indikator, peneliti memuat 6 butir instrumen pernyataan, sehingga didapatkan skor ideal dari dimensi manfaat adalah $4 \times 40 \times 6 = 960$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $40 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden, $6 =$ jumlah pernyataan yang ada pada

indikator dimensi efisiensi. Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $761 : 960 = 0,7927 \times 100 = 79,27\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik, jika dilihat dari dimensi transparansi. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini:



5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil pengolahan data yang ada dalam indikator, peneliti memuat 6 butir instrumen pernyataan, sehingga didapatkan skor ideal dari dimensi manfaat adalah $4 \times 40 \times 6 = 960$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $40 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden, $6 =$ jumlah pernyataan yang ada pada indikator dimensi efisiensi. Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $765 : 960 = 0,7968 \times 100 = 79,68\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah baik, jika dilihat dari dimensi manajemen perubahan. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini:



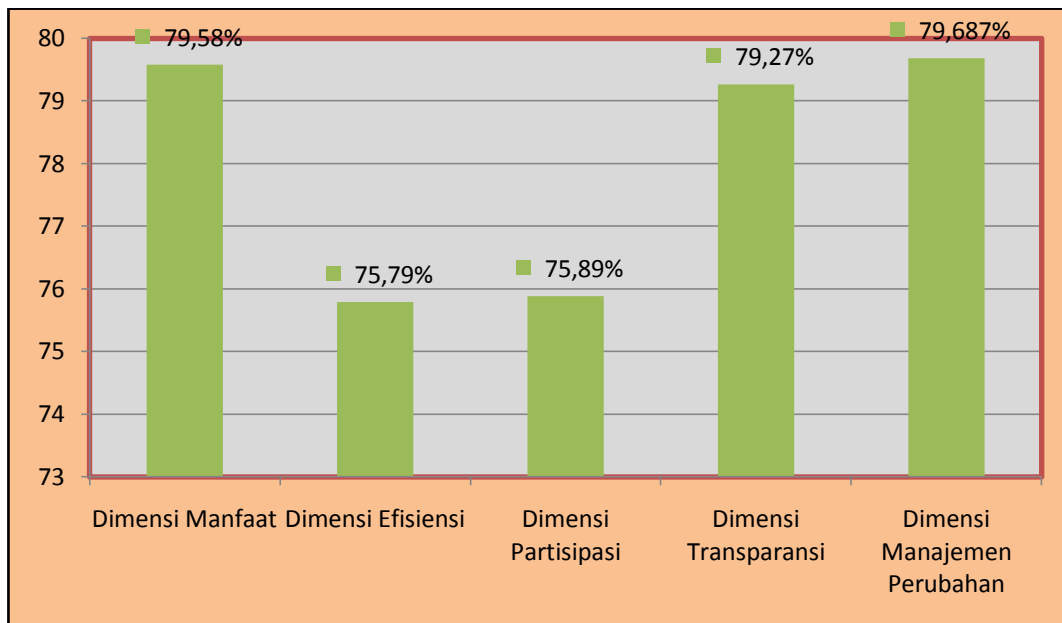
Berdasarkan perhitungan pada setiap dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap dimensi penelitian yaitu dimensi manfaat mencapai 79,58%, dimensi efisiensi mencapai 75,79%, dimensi partisipasi mencapai 75,89%, dimensi transparansi mencapai 79,27%, dan dimensi manajemen perubahan mencapai 79,68%.

Dari masing-masing tingkat persetujuan responden terhadap dimensi penelitian tersebut dapat diartikan bahwa Penerapan *e-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikatakan sudah baik, hal ini didasarkan pada teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), dimana terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*, yaitu dimensi manfaat, dimensi efisiensi, dimensi partisipasi, dimensi transparansi, dan dimensi manajemen perubahan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan pemaparan di atas, maka total skor pada tiap-tiap dimensi dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), dimana terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*, yaitu dimensi manfaat, dimensi efisiensi, dimensi partisipasi, dimensi transparansi, dan dimensi manajemen perubahan. dalam hal ini

penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat dilihat pada histogram sebagai berikut:

Grafik 4.4
Tingkat Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berdasarkan Teori Booz Allen Dan Hamilton Dalam Indrajit (2005:43-44)



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2015

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah berjalan baik, hal ini sesuai dengan jawaban responden terhadap pernyataan variabel penerapan *e-Government* dengan berdasarkan pada teori Booz Allen dan Hamilton dalam Indrajit (2005:43-44), dimana terdapat lima dimensi dalam *Balanced e-government scorecard* sebagai alat ukur kinerja pemerintahan yang menerapkan *e-government*, yaitu dimensi manfaat, dimensi efisiensi, dimensi partisipasi, dimensi transparansi, dimensi manajemen perubahan. Hal ini didapatkan berdasarkan pada hasil perhitungan perbandingan antara skor yang terkumpul dengan skor yang diharapkan yakni mencapai 77,48%.
2. Jika dilihat dari semua dimensi, maka yang paling tinggi tingkat penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yakni dimensi manajemen perubahan hingga mencapai 77,48%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang terdapat pada dimensi manajemen perubahan tersebut, yakni pada strategi yang dilakukan Untirta

dalam menerapkan *e-Government*, kualitas kontrol dan *review* yang dilakukan serta keterlibatan dan motivasi para pegawai dalam menerapkan *e-Government* dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan *e-government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peningkatan pembaharuan informasi yang diberikan kepada civitas akademik, dalam hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal pertemuan khusus untuk para pegawai *Information and Communication Technology* (ICT), untuk mengevaluasi informasi yang telah dipublikasikan, hal ini dikarenakan Untirta merupakan institusi pendidikan perguruan tinggi di Banten, yang informasinya sangat diperlukan oleh civitas akademik sesuai perkembangan informasi yang ada, selain itu juga karena Untirta sendiri berkaitan langsung dengan civitas akademik.
2. Perlu adanya penambahan kapasitas jaringan dan *bandwith* agar tidak terjadi gangguan, seperti dalam akses, *download* dan *upload* informasi.
3. Diharapkan Untirta dapat menambah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang berlatar belakang bidang Teknologi Informasi (TI) agar penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditingkatkan lebih baik lagi

4. Diharapkan adanya suatu peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh Untirta sendiri, khusus dalam bidang pemanfaatan fitur dan item-item pada menu layanan yang tersedia, dalam rangka penerapan *e-Government* dalam pelayanan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dimana peraturan atau kebijakan tersebut mengharuskan pemanfaatan fitur dan item-item pada menu layanan yang tersedia secara lebih maksimal.
5. Diharapkan adanya penambahan komputer dan ruang kerja yang memadai sehingga para pegawai akan lebih nyaman dan fokus untuk bekerja.
6. Tingkatkan frekuensi pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan, khusus oleh PUSDINFO, dalam bentuk seminar-seminar mengenai *e-Government* serta studi banding dengan perguruan tinggi lain yang menerapkan *e-Government* agar tercipta motivasi untuk dapat menerapkan *e-Government* secara lebih baik, dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Bugin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunandan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

_____. dkk. 2005. *E-Government in action: Ragam Kasus Implementasi sukses diberbagai belahan dunia*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain:

Bhanti, Prateek. dkk. 2011. *E-Governance in Higher Education: Concept and Role of Data Warehousing Techniques*.

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.206.4649&rep=rep1&type=pdf>

Djunaedi, Ahmad. 2002. *Beberapapemikiranpenerapan e-government dalam pemerintahandaerah di indonesia*.

otda.lampungprov.go.id/donwlot.php?file=files/egovt-pemda-indo-pdf.

Ismatullah. 2014. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Fisip Untirta

Kapoor, Ranjeeta Kapoor and Nishtha Kelkar. 2013. *E-Governance: Higher Education in Rural Area*.

<http://www.met.edu/Institutes/ICS/NCNHIT/papers/21.pdf>

Nugroho, Triaji. 2007. *Harapan terhadap Implementasi E-Government*.

<https://trijainugroho.wordpress.com/2007/06/13/lagi-harapan-terhadap-implementasi-e-government/>

Rahmawati. 2012. *Anaalisis Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Jurnal Administrasi

Publik. Fisip Untirta.

Setiawati, Wenny. 2007. *Penerapan E-government Di Indonesia*.

URL: http://komuniasipublik.multiply.com/journal/tem/120/penerpan_E-government_di_Indonesia.

Shrivastava, dkk. 2014. Role of e-Governance to strengthen higher education system in India

<http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/papers/Vol-4%20Issue2/Version-1/J04215762.pdf>

Sosiawan, Edwi Arif. 2007. *Tanggapan dan hambatan dalam implementasi E-government di Indonesia.*

URL: <http://edwin.dosen.upnyk.ac.id/tantangan%20egov.pdf>.

Suklabaidya, Sudipdan Angshu Maan Sen. 2013. *Challenges and Prospects of E-governance in Education.*

<http://www.ijettcs.org/Volume2Issue3/IJETTCS-2013-06-24-124.pdf>

Website www.untirta.ac.id/Kumpulan%20Sumber/RENSTRA%20UNTIRTA.htm

Diakses pada tanggal 15 Oktober 2014 pukul 14.30 WIB

Dokumen:

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Republik Indonesia.*

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang *Pengembangan Dan Pemanfaatan Telematika Di Indonesia.*

Kementrian Komunikasi dan Informasi, 2002. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government.*

Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2011-2014.

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama : ItaMafrohati
NIM : 6661110398
Tempat/Tanggal Lahir : Serang,06 Januari 1992
Agama : Islam
Alamat : Kp. TanjungLegonAsem,
Desa/KelPengarengan,Kec
BojonegaraSerang-Banten
Nomor HP : 089671216261
E-mail : Ita_Mafrohati@yahoo.com
Hobby : Mendengarkan Musik

2. Riwayat Pendidikan

1999 – 2005 : SDN KalilanangIIBojonegera
2005 - 2008 : MTS Al-JauharotunaqiyahTanjung
2008 - 2011 : SMK Informatika Kota Serang
2011 – 2015 : Universitas Sultan AgengTirtayasa,
FakultasIlmuSosialdanIlmu
Politik,JurusanIlmuAdministrasi Negara

3. Riwayat Organisasi

Ketua Departemen Pengabdian Pada Masyarakat BEM FISIP Untirta Tahun 2014

Ketua Biro Dana dan Usaha FoSMaI FISIP Untirta Tahun 2014

Ketua Departemen Pusat Kajian dan Study Gerakan FoSMaI FISIP Untirta Tahun

2013

Anggota UKM TRAS Untirta Tahun 2011

Anggota UKM Pramuka Untirta Tahun 2011

Uji Validitas Instrumen

Correlations

		P45	
P1	Pearson Correlation	,740**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P2	Pearson Correlation	,624**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P3	Pearson Correlation	,564**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	30	
P4	Pearson Correlation	,600**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P5	Pearson Correlation	,664**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P6	Pearson Correlation	,189	Tidak Valid
	Sig. (2-tailed)	,318	
	N	30	
P7	Pearson Correlation	,705**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P8	Pearson Correlation	,613**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P9	Pearson Correlation	,543**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,002	
	N	30	

P10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,705** ,000 30	Valid
P11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,676** ,000 30	Valid
P12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,653** ,000 30	Valid
P13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,017 ,929 30	Tidak Valid
P14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,454* ,012 30	Valid
P15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,497** ,005 30	Valid
P16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,632** ,000 30	Valid
P17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,676** ,000 30	Valid
P18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,452 ,012 30	Valid
P19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,591** ,001 30	Valid
P20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,701** ,000 30	Valid
P21	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,669** ,000 30	Valid

P22	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,727** ,000 30	Valid
P23	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,036 ,852 30	Tidak Valid
P24	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,615** ,000 30	Valid
P25	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,183 ,333 30	Tidak Valid
P26	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,653** ,000 30	Valid
P27	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,789** ,000 30	Valid
P28	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,805** ,000 30	Valid
P29	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,657** ,000 30	Valid
P30	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,522** ,003 30	Valid
P31	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,731** ,000 30	Valid
P32	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,723** ,000 30	Valid

P33	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,684 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P34	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,801 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P35	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,523 ^{**} ,003	Valid
	N	30	
P36	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,782 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P37	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,592 ^{**} ,001	Valid
	N	30	
P38	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,722 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P39	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,607 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P40	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,738 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P41	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,719 ^{**} ,000	Valid
	N	30	
P42	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,470 ^{**} ,009	Valid
	N	30	
P43	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,754 ^{**} ,000	Valid
	N	30	

P44	Pearson Correlation	,700**	Valid
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	
P45	Pearson Correlation	1	Valid
	Sig. (2-tailed)		
	N	30	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RENSTRA UNTIRTA

Diposting tanggal: 02 April 2012

Rencana Kebijakan Strategis 2011-2015

Dalam upaya mencapai cita-cita tinggi seperti tergambar dalam visi, misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan di atas, Untirta perlu mengembangkan kebijakan dan program yang diyakini dapat menjadi perantaranya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal Universitas terkait dengan tantangan nyata (threats) yang dihadapi di depan, besarnya peluang (opportunities) yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan, kelemahan (weaknesses) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing dan kekuatan (strengths) yang sesungguhnya dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan target tadi. Akan nampak bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program ini saling terkait satu sama lain, sebab semuanya merupakan rumusan gagasan yang utuh dalam upaya mencapai cita-cita itu. Berikut ini kebijakan dan program yang dibuat untuk 4 (empat) tahun mendatang, yang merupakan pokok Rencana Strategis Untirta 2011-2014.

Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program-program sebagai berikut ini.

Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal.

Pengembangan kultur akademik.

Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum.

Penguatan program studi.

Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga penunjang akademik.

Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan arah kebijakan penelitian universitas.

Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis penelitian.

Peningkatan sarana dan sumber belajar berorientasi penelitian.

Penyediaan dukungan fasilitas penelitian, publikasi nasional dan internasional, serta pemerolehan HaKI.

Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Kebijakan ini diwujudkan dalam program-program sebagai berikut:

Pengadaan dan perluasan lahan untuk pengembangan kampus baru

Pengadaan sarana gedung kampus baru.

Penguatan sistem komputerisasi yang online.

Melengkapi fasilitas laboratorium, meningkatkan kualitas layanan ruang baca dan tempat penggunaan internet

Menambah ruang kuliah.

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA

Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program-program sebagai berikut ini.

Peningkatan mutu kinerja manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik.

Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi Untirta yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manajemen SDM, keuangan, fasilitas/ICT, dan kegiatan lain, dan/atau antarunit kerja/unit akademik yang sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik.

Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan dan fasilitas berorientasi standar nasional untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan/atau stakeholders.

Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan dan fasilitas/ICT.
Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi.
Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten.
Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi).
Pengembangan dan/atau penerapan sistem kompensasi/remunerasi yang layak dan adil.
Peningkatan mutu laporan keuangan.
Penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai.
Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai teaching library.

PENATAAN KELEMBAGAAN

Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program-program sebagai berikut :
Penataan organisasi Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan seperangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan.
Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan karyawan terhadap struktur organisasi.
Peningkatan kualitas pengelolaan Universitas untuk mendukung tridharma yang berdaya saing dan akuntabel.
Penguatan tatapamong, tatakelola dan kewenangan akademik.
Penguatan tatapamong dan tatakelola usaha universitas.
Penguatan tatakelola Mesjid Syekh Nawawi Al-Bantani
Penguatan tatapamong dan tatakelola poliklinik.

PENINGKATAN CITRA DAN KEMITRAAN

Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program-program sebagai berikut.
Pengembangan keunggulan Universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi.
Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars).
Peningkatan kerja sama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni.
Perluasan dan implementasi kerja sama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program.
Penjajagan pembukaan program studi internasional.
Penguatan fungsi kehumasan.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni.

PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program-program-program sebagai berikut:
Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetensi.
Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan mahasiswa.
Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran dan pengabdian, minat bakat, dan kewirausahaan mahasiswa.
Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa.
Peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU

Kebijakan ini diwujudkan dalam program-program sebagai berikut ini.
Pengembangan sistem pendidikan profesional guru.
Penyelenggaraan program pendidikan profesional guru yang bermutu

KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden : (diisi oleh peneliti)
2. Jenis Kelamin : Laki- laki/Perempuan
3. Status : PNS/Tkk
4. Umur :Tahun
5. Masa Kerja : Tahun
6. Golongan PNS :
 - a. I (a b c d)
 - b. II (a b c d)
 - c. III (a b c d)
 - d. IV (a b c d)

7. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD
 - b. SLTP
 - c. SLTA
 - d. D3
 - e. S-1
 - f. S-2
 - g. S-3

Keterangan: Lingkari sesuai data yang bersangkutan

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Dimohon untuk Membaca angket ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud pernyataan angket ini.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap sesuai dari beberapa pilihan jawaban dengan cara memberikan tanda cek list (\surd), dan setiap pernyataan hanya memiliki satu pilihan jawaban.
3. Alternatif jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut :

SS	= Sangat Setuju	(Skor Nilai 4)
S	= Setuju	(Skor Nilai 3)
TS	= Tidak Setuju	(Skor Nilai 2)
STS	= Sangat Tidak Setuju	(Skor Nilai 1)
4. Bila terdapat pernyataan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung kepada peneliti
5. Kumpulkan jawaban secara langsung kepada peneliti

C. Pendapat Responden Tentang Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Akademik Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

No	Pernyataan	Respon			
		SS	S	TS	STS
	Dimensi Manfaat				
1	Sistem pelayanan yang tersedia telah mampu melayani civitas akademik secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada				
2	Cakupan layanan yang tersedia sudah mampu di akses oleh civitas akademik dalam satu portal menuju berbagai layanan				
3	Cakupan layanan yang tersedia dibuat dengan sebaik mungkin untuk memudahkan pengguna layanan				
4	Dalam memberikan layanan kepada civitas akademik secara penuh memanfaatkan sistem <i>online</i>				
5	Pengolahan data dan informasi sudah terkomputerisasi dengan baik				
6	Pemanfaatan aplikasi dalam layanan <i>SIKAD online</i> telah dilakukan secara maksimal				
7	Data dan informasi yang ada dilingkup kantor sudah tersimpan dalam <i>database</i> secara baik dan rapi				

	Dimensi Efisiensi				
8	Terdapat sistem informasi manajemen yang memadai untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penerapan <i>e-government</i>				
9	Terdapat koneksi jaringan LAN disetiap komputer yang tersedia sudah memadai				
10	Terdapat aplikasi teknologi informasi berbasis internet yang memadai dalam penerapan <i>e-government</i>				
11	Terdapat koneksi jaringan internet yang baik				
12	Kemampuan Bapak/Ibu sudah memadai dalam menunjang penerapan <i>e-government</i> di Untirta				
13	Pekerjaan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi saya sudah sesuai dengan keahlian saya				
14	Terdapat perencanaan untuk pengadaan staf ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani <i>e-government</i> sesuai dengan latar belakang pendidikan				
15	Saya telah mampu mengolah data dan informasi dalam mendukung penerapan <i>e-government</i>				
16	Terdapat pelatihan bagi Bapak/Ibu pada bidang teknologi informasi dalam mendukung penerapan <i>e-government</i>				
17	Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan telah membantu Bapak/Ibu dalam penerapan <i>government</i> di Untirta				
18	Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan menghasilkan inovasi yang lebih baik dari hasil pelatihan dalam meningkatkan pelayanan				
19	Penerapan <i>e-government</i> telah menghemat				

	pekerjaanBapak/Ibu dalam memberikan pelayanan				
20	Penerapan <i>e-government</i> telah menghemat biaya dalam memberikan pelayanan				
21	Penerapan <i>e-government</i> telah menghemat waktu Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan				
22	Ketersediaan sarana berupa unit komputer telah memadai dalam penerapan <i>e-government</i>				
23	Ketersediaan sarana gedung/ruangan telah memadai dalam penerapan <i>e-government</i>				
24	Ketersediaan prasarana berupa <i>software</i> atau sistem aplikasi dalam penerapan <i>e-government</i> telah memadai				
25	Kuantitas <i>bandwith</i> yang tersedia sudah memadai bagi penyedia layanan dalam menerapkan <i>e-government</i> di Untirta				
	Dimensi Partisipasi				
26	Terdapat aplikasi khusus guna berkomunikasi melalui <i>website</i> dengan civitas akademik				
27	Aplikasi khusus yang disediakan guna berkomunikasi dengan civitas akademik melalui <i>website</i> seperti ruang krtitik dan saran berjalan efektif				
28	Civitas akademik memberikan respon yang baik kepada para Bapak/Ibu dengan adanya ruang kritik dan saran				
29	Dengan adanya ruang kritik dan saran yang tersedia mempengaruhi para pimpinan dalam mengambil keputusan				
30	Terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang				

	penerapan <i>e-government</i> di Untirta				
31	Sistem koordinasi yang terjalin di internal oleh Pusdainfo berjalan baik dalam menunjang penerapan <i>e-government</i> di Untirta				
32	Sistem koordinasi yang terjalin dengan pihak luar berjalan baik dalam penerapan <i>e-government</i> di Untirta				
	Dimensi Transparansi				
33	Penerapan <i>e-government</i> di Untirta meningkatkan keterbukaan informasi untuk publik				
34	Informasi yang saya berikan telah mencukupi akan transparansi kepada civitas akademik				
35	Menurut saya Informasi yang saya berikan kepada civitas akademik sudah transparan baik dari segi keakuratan data, kelengkapan, ketepatan waktu dan relevansinya				
36	Terdapat pembaharuan informasi yang diberikan kepada civitas akademik dalam penerapan <i>e-government</i> di Untirta				
37	Dalam menunjang transparansi kepada civitas akademik media elektronik/ internet sangat dibutuhkan				
38	Keterbukaan informasi yang diberikan mendapatkan respon yang positif dari civitas akademik				
	Dimensi Manajemen Perubahan				
39	Penerapan <i>e-government</i> di Untirta telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan				

40	Terdapat pengembangan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan				
41	Terdapat pengawasan seperti <i>updating</i> informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan <i>database(Epsbed)</i> dan yang dilakukan oleh PUSDainfo dengan baik dalam penerapan <i>e-government</i>				
42	Terdapat evaluasi <i>updating</i> informasi dari Fakultas atau Jurusan, dan <i>database(Epsbed)</i> yang dilakukan oleh PUSDainfo dengan baik dalam penerapan <i>e-government</i>				
43	Evaluasi yang dilakukan dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik pada masa selanjutnya				
44	Dengan adanya evaluasi memotivasi pegawai untuk meningkatkan pelayanan				



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 28, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Srang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, mail: kontak@fisip-untirta.ac.id

nomor : 425 /UN.43.6.1/PG/2014

10 April 2015

tempat :

perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kabag. Kepegawaian Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : 1. Jumlah Pegawai/ Staf Pustainfo Untirta
Diperlukan : 2. Jumlah Pegawai/ Staf ICT seluruh fakultas dan jurusan
3. Jumlah Pegawai/ Staf ICT LP3M, LPPM, Perpustakaan dan Humas Untirta

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakopatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : ASG /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 April 2015

Kepada Yth.
Kepala Pusdainfo Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

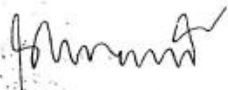
Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf Pusdainfo Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 457 /UN.43.6.1/ G/2014
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 April 2015

Kepada Yth.
Kepala Humas Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT Humas Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : ASB /UN.43.6.1/PG/2014 13 April 2015
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala LPPM Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan \square Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT LPPM Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 459 /UN.43.6.1/PG/2014

13 April 2015

Lampiran :

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala LP3M Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang beranda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data Diperlukan : Jumlah Pegawai/ Staf ICT LP3M Untirta

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 21245 Pakupatan Serang Banten
uri: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 500 /UN.43.6.1/PG/2014

13 April 2015

Lampiran

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala UPT Perpustakaan Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT Perpustakaan Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP: 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 501 /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 April 2015

Kepada Yth.
Dekan FT Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

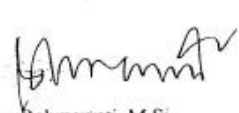
Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Pemerintahan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT FT Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 506 /UN.43.6.1/PG/2014 13 April 2015
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Dekan FE Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT FE Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si

NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 502 /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 April 2015

Kepada Yth.
Dekan FAPERTA Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT FAPERTA Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 503 /UN.4 : 6.1/PG/2014 13 April 2015
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Dekan FISIP Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/Staf ICT FISIP Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 504 /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 April 2015

Kepada Yth.
Dekan FH Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat.

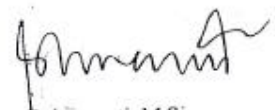
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT FH Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Rahmawati, M.Si
NIP-197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : *605* /UN.43.6.1/PG/2014 13 April 2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Dekan FKIP Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai Staf ICT FKIP Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228. Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2014
Tempat :
Tgl. :
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

1 April 2015

Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana Untirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang di butuhkan,

Nama : Ita Mafrohati
NIM : 6661110398
Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Penerapan E-Government Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Data : Jumlah Pegawai/ Staf ICT Pasca Sarjana Untirta
Diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak-/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, M.Si

**DAFTAR NOMBAYE PEGAWAINIS
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	MAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI			KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN		SANGKUT/ DOLONGA	NET
		Eselon II	Eselon IV	MAMA		MP			
1	Kepala Bina Akademik, Komando, dan Perencanaan	Bagian Akademik dan Komando			14	1	Drs. Saiful Hamid Soekochi M.Si	195806271981031005	IV/03
2	Kepala Bagian Akademik dan Komando	Bagian Akademik dan Komando			12	1	Dede Hary Hermawan, SE., MA.	197404112002121002	IV/06
3	Kepala Subbagian Akademik dan Evaluasi	Subbagian Akademik dan Evaluasi			8	1	Oyok Samudra, SH	196511120005110061	III/c
4	Pengolah Data Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			6	1	Tri Kurniawan, S.Sos	19600630200502001	III/c
5	Pengolah Data Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			6	2	Fita Marnia Huda, SPM	19710112001120001	III/c
6	Pengolah Data Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			6	3	Cherlene Magistra, SH., MH.	198110082004012001	III/b
7	Prognostis/Manajemen Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			6	4	Dewi Indriyandani, S.Pd	197209042006102001	III/b
8	Pengolah Data Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			5	1	Mak Irena, S.Sos.	1970050820000101001	III/b
9	Pengolah Data Akademik	Subbagian Akademik dan Evaluasi			5	2	Nia Daryadi	-	III/b
10	Kepala Subbagian Regulasi dan Statistik	Subbagian Regulasi dan Statistik			8	1	Koresh, SE., MA	197427112002121001	III/b
11	Pengolah Data Regulasi	Subbagian Regulasi dan Statistik			8	1	Kemp, SE., MA	196703122005011001	III/b
12	Kepala Subbagian Komando dan Koordinasi	Subbagian Komando dan Koordinasi			8	1	Andy NurNuhman MA.	19750922201121002	III/b
13	Pengelola Program Mutu, Bekerja dan Peningkatan Mutu	Subbagian Komando dan Koordinasi			6	1	Dadi Kurniawan	-	III/c
14	Pengadministrasian Layanan Akademik dan Komando	Subbagian Komando dan Koordinasi			5	1	Andi Muhammad Hary	-	III/c
15	Pengolah Data Beasiswa	Subbagian Komando dan Koordinasi			5	1	Oliva Fritta, S.Pd	196608032014042001	III/c
16	Pengadministrasian Layanan Komando dan Koordinasi	Subbagian Komando dan Koordinasi			5	1	Chemp Mardisa P. S. Kati	19760306200601000	III/c
17	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Subbagian Komando dan Koordinasi			5	1	Tungga Estrena Rahmawati, SE., M.Si	19671012201121001	III/c
18	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi			9	1	Hendri Leo Manggala, SE	197809122005041010	III/b
19	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi			7	1	Adi Basri, Adhi, Kom	197910272009121002	III/b
20	Pengolah Data Program dan Anggaran	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi			6	1	Maria Aeldi Cherrynia, SE	198603182014042001	III/a
21	Pengolah Data Program dan Anggaran	Subbagian Perencanaan dan Evaluasi			6	2	Dedi Kurniawan	-	III/a
22	Kepala Subbagian Kerja Sama	Subbagian Kerja Sama			8	1	Heri Sudojoko, SE	197809282005011003	III/a
23	Pengolah Data Kerja Sama	Subbagian Kerja Sama			6	1	Tungga Yud Sutardi	197808282006191001	III/c
24	Pengolah Data Kerja Sama	Subbagian Kerja Sama			6	2	Lidi Herandi, SE	197603032005041001	III/c
25	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Subbagian Hubungan Masyarakat			8	1	Agustia H. S. Ag	198706232002121001	III/b
26	Pengadministrasian Layanan Informasi dan Publikasi	Subbagian Hubungan Masyarakat			5	1	Rehman Hidayat Salaman	197305282007101002	III/b
27	Pengadministrasian Layanan Informasi dan Publikasi	Subbagian Hubungan Masyarakat			5	2	M. Idris E. Hidayat, S.Sos., MT.	196211142014041001	III/a

UPT PUSAT DATA DAN INFORMASI

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan	Jabatan
1	M. Adha Ilhami, ST., MT	198010202006041004	III/c	Kepala UPT PUSDainfo
✓	Bayu Sadewo, S.Kom., M.Kom	197204162002121003	III/d	Kasubag UPT PUSDainfo
3	Tri Cahyono, S.kom	197804032010121002	III/a	BPP
4	Separudin, S.Kom., M.Kom	197007162005011000	III/a	Staf
5	Sadaryono Suwahyo, SE	196711202008101001	II/b	Staf
6	Imron Solihin, SE	197911062008101002	II/b	Staf
7	Satria Kusumah, S.Kom			Staf
8	Tommy Decemrianto, S.Kom			Staf
9	M. Faridi, S.Sos			Staf
10	Ramdhan Juliansyah, A.Md			Staf
11	Rizki Lesmana, A.Md			Staf
12	Andi Arie Fachmi			Staf
13	Sanggit Arief Rachman, S.Sos			Staf
14	Deni Dwi Putra			Staf

DAFTAR NOMINATIF PEKAWAI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT: UPT PERPUSTAKAAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI			KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN			KETT
		Eselon II	Eselon IV			NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	
1	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perustakaan	-	Subbagian Tata Usaha	6	1	H. Uswah Hasanah, S.Pd., M.S	199401122001322001	IVd	
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Subbagian Tata Usaha	6	1	Aswari, SH, MM	197105132005041007	IVc	
3	Pengelolaan Umum	-	Subbagian Tata Usaha	5	1	R Triyana Kurnia W	-	IVa	Memorik K2
4	Palogga Perputakaan	-	Subbagian Tata Usaha	5	1	Pati Radaswati, S.Pd.	197508202001122001	IVB	
5	Pengolah Bahan Pustaka	-	Subbagian Tata Usaha	6	1	Dian Kusni, SE.	198309192008102001	IVb	
6	Pengolah Bahan Pustaka	-	Subbagian Tata Usaha	6	2	Sri Wahyuni, SE.	197111242005012000	IVd	
7	Pengelola Pustaka Elektronik	-	Subbagian Tata Usaha	6	1	Hiss-Normahis, S.Sos	198911142014042002	IVB	CPNS
8	Pustakawan Muda	-	-	3	1	Nia Kurniawati, S. Sos., M.P.	197604282001122001	IVc	
9	Pustakawan Pelaksana	-	-	6	1	Yunus Yudianto, SP	197909042005022002	IVd	

Itanya
Tahun dijabarkan oleh
Kementerian PAN dan RB

2014

Bulan Kepegawaian Negara

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Unit Kerja
Universitas Siliwangi Ageng Titapasa

MP

MP

MP

MP

MP

- Pembantu teknis : Triana Septiana
- Pengelola web & Repository : Hillis Normanita
- Nia Kurniawati

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT: LP3M

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI		KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN				
		Eselon III	Eselon IV		NAMA	NIP	PANGKAT/ GELONGGAM	KET	
1	Kepala Subbagian Tata Usaha LP3M		Subbagian Tata Usaha	B	1	Nur Hidayat, S.Pd	19680822002121002	IVd	
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Subbagian Tata Usaha	B	1	Ageng Gunawan Raherja	197503202008121002	IVd	

JAKARTA, 2014
Telah ditandatangani
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Kepegawaian Negara

Biro Museum dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Unit Kerja
Universitas Sultan Ageng Tjhayasa

NIP

NIP

NIP

NIP

NIP

1. Nawang Kristanto, ST., M.Kom

2. Ahmad Khurridin, SE

0817 160 259

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

UNIT FAKULTAS KEHUMAN DAN ILMU PENDIDIKAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI		PEMANORU JABATAN		PANGKAT/ GOLONGAN	KET
		Kelas II	Eselon IV	KELAS JABATAN	NAMA		
1	Kepala Bagian Tata Usaha FKIP	Bagian Tata Usaha		11	Muhammad Prasetyo Setiawan, S.Pd, M.M.Pd	19670725002121001	IVa
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FKIP	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	Dedi Supriadi, S.Pd	197303132008011002	IBG
3	Pengelola Data Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	6	Dyah Intenry, S.Pd	1988504012014040001	IBb
4	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Berkuda Subdaji	19800725007101007	IV
5	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Yuri Haryani		IBc Honorer K2
6	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Rizki Yanti Imanawati		IBc Honorer K2
7	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Anisa Muzam		IBb Honorer K2
8	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Dadang Bayuwa		IBa Honorer K2
9	Pengadministrasian Sistem Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	Surdipati, S.Pd	19601205008040001	IBb
10	Kepala Subbagian Umum	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	Muhammad Agus, S.Pd., M.Si	19660107002121001	IBb
11	Pengadministrasian Bering Milk Megara	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	5	Supriyo		IBa Honorer K2
12	Penata Usaha Penerimaan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	5	Sri Iji Abdi		IBc Honorer K2
13	Pramu Kantor	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	1	Eti Haryadi	198407012008010001	IS
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	8	Iq. Alf. Suliman	197804120060011002	IBc
15	Perencana Mutasi Kepegawaian	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	0	Andri Heryanto, SE	1978030200601002	IBb
16	Perencana Mutasi Kepegawaian	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	5	Agus Heryanto, SE	1978072500511001	IBb

Jabatan: 2014
 Tahun: 2014
 Kementerian PAN dan RB
 Badan Kepegawaian Negara
 Biro Human dan Organisasi
 Biro Kepegawaian
 Unit Kerja:
 Universitas Sultan Ageng Tjaya
 NP:
 NP:
 NP:
 NP:

ALBIE FAUZH AZIZ, S.I.KOM. STAF AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

DAFTAR NOMINATE PEGAWAI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI			KELAS JABATAN	PEMANOKU JABATAN			KET
		Eselon II	Eselon IV			NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	
1	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian	Bagian Tata Usaha		11	1	Tono Sumartono, S.Sos	196205131989011001	IVa	
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	1	Khwari (Khoti), SP	197608282006011001	IIIc	
3	Pengelola Data Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	6	1	Miharini, SE	196903022002121002	IIIb	
4	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	Edi Jusadi	197808182007101002	III	
5	Pengadministrasian Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	2	Noor Zainab		IIIa	Menunggu PK
6	Pengadministrasian Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	Ahsanudin	196408102008101001	IVa	
7	Kepala Subbagian Umum Fakultas Pertanian	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	8	1	Ish Rizka, SE	198511132001122001	IIIc	
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum	6	1	Ean Haryanti, S.Pd	196403112006042002	IIIa	

Jakarta, 2024
Tetap Berkeadilan
Kemendikbud dan NIS

Bidang Kepegawaian Negeri

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Unit Kerja
Universitas Sultan Agung Tirtayasa

NIP

NIP

NIP

NIP

NIP

Pengelola Data akademik : Miki Permata Putri, SP
- Een Wardiyanti, SP
- Pipih, SP

Data Alumni & kemahasiswaan : Vofe Dwiastri, SE.
Ppp
Taufik Julia

5

**DAFTAR HONORARIY PEDAGANG PHS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

UNIT: FAKULTAS TEKNIK

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI			KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN		KET
		Eselon III	Eselon IV	Eselon V		MAMA	NIP	
1	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik	Bagian Tata Usaha			11	1	Dr. Mochamad Genaidi, M.M.	IVb
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		8	1	Dr. Dedi Hekusidi	IVb
3	Pengelola Dan Asisten	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		6	1	Murawati, BE.	IVb
4	Pengadministrasi Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	1	Olu Rachmawati, S.S.	IVb
5	Prigabhinistrasi Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	2	Erni Rusli	IVb
6	Prigabhinistrasi Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	3	Wafiqah	IVb
7	Prigabhinistrasi Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	1	Martuti, A.Md	IVb
8	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	2	Husnah, A.Md	IVb
9	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	3	Nani Semangin, ST.	IVb
10	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	4	Suciudin	IVb
11	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	5	Hedari	IVb Honorer K2
	Kepala Subbagian Umum	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		8	0		
12	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Heeni Febriyanti, ST	IVb
13	Printra Kantor	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		1	1	Jerman	IVa Honorer K2
14	Pengemudi	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		3	1	Engkos	IVb Honorer K2
15	Teknis Sarana dan Prasarana Kantor	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Asep Yuliyana Sumadi	IVc
16	Pengadministrasi Penunjang	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Makhsudi	IVb
17	Pengadministrasi Penunjang	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	2	M Widi	IVb
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		6	1	Rika Maheswari Agustina, S.M.	IVa

Jakarta, 2014
Kepala Biro Pengawasan Negeri
Kementerian PAN dan RB

Biro Hukum dan Organisasi
Biro Pengawasan

Unit Kerja
Universitas Sultan Ageng Tjhayasa

.....
NP
.....
NP
.....
NP

DAFTAR NOMINATIF PEDAGOGI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT: FAKULTAS HUKUM

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI			KELAS JABATAN	PEMANGRU JABATAN		NET	
		Ekselon III	Ekselon IV	Ekselon V		NAMA	NIP		PANGKAT/DOLOANS
1	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum	Bagian Tata Usaha			11	1	Rio Hari Setomangah, SH., M.S.	19700923200122002	M/1
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		8	1	Dr. Mubandhi	196204102001121001	BS/1
3	Pengarah DSA Akademik	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		6	1	Ira Ratnawati, SE.	197904072000102001	BS/1
4	Pengarah DSA Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	1	Imanudin, S.Pd.	196310132000041001	BS/1
5	Pengarah DSA Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		5	2	Romyantoro	197010162007101001	4/5
6	Kepala Subbagian Umum	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		8	1	H. Ted Ratnawati, SE. MM.	197303262002122001	BS/1
7	Pengarah DSA Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Masbich Nurris, A.Md.	197603182000102002	BS/1
8	Pengarah DSA Sarana Pendidikan	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	2	Ercu Subijah, SE.	197101012001122001	BS/1
9	Pembina Usaha Pribadi	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Nisa Lili Beroi Hidayat - <i>Handwritten</i>		BS/1
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		6	1	Rufi Purnamasari, SE., M. Akl.	197903172000102001	BS/1
11	Pemroses Monev Kepegawaian	Bagian Tata Usaha	Subbagian Umum		5	1	Mas'ud, SH.	196605012005011002	BS/1

Jakarta, 2024
Kementerian PMP dan IB

Besari Kepegawaian Negara

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kepegawaian

Lisa Kati
Universitas Sahaja Angrii Tarasana

NIP

NIP

NIP

NIP

NIP

Handwritten: Guruh Satria Wirayuda, SH ⇒ Operator obses & Slated

DAFTAR Nominasi Pegawai PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI		KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN			KET	
		Eselon III	Eselon IV		NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN		
1	Kepala Subbagian Tata Usaha Peaca Bergana	-	Subbagian Tata Usaha	0	1	Eva Satriah, S.Ag	196903022001122002	III/c	
2	Pengadministrasi Akademik	-	Subbagian Tata Usaha	5	1	Endra Beyaningsih, S.Sos.	197604052009102001	III/b	✓
3	Pramu Kantor	-	Subbagian Tata Usaha	1	1	Mas'mun	197704112008101001	IV/d	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Subbagian Tata Usaha	5	1	Hono Dew. Tradisi, S.Sn.	198402122009122004	III/b	
5	Pengadministrasi Umum	-	Subbagian Tata Usaha	5	1	Lia Laila, S.Sos.	198404052009092002	III/c	
6	Pengadministrasi Umum	-	Subbagian Tata Usaha	5	2	Adi Heryadi		III/a	✓

Kasabag TI
ESBED → Pro
Ilmu Hube

ESBED
operator BMT
Prodi Manajemen
Atuntani

Jakarta, 2014
Tebah divalidasi oleh
Kementerian PAN dan RB

Badan Kepegawaian Negara
Biro Kepegawaian
Biro Kukur dan Organisasi
Unit Kerja
Universitas Sultan Ageng Tjani

NIP NIP NIP NIP NIP

1. Jatinings Pambudi, S.Pd → ESBED - Prodi TPM
2. Ahmad Lanang Girawan, S.H., MH → ESBED - PB1
3. Della Djumingsih, SE → ESBED → Prodi Manajemen
4. Nurza Abdi Khairuzi, SE → ESBED → Prodi Adm. Public.

CATATAN BIMBINGAN

Pembimbing I
Pembimbing II

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PASIAF DOSEN
	25/11/14	Revisi LBM lengkapi dgn data penyelesaian & lap.	Shufi
	19/12/14	Konultasi lebih lanjut dgn PB II. "pa mndon bantawnye y terna dan permasalahan sse proposal ita". Hax.	Shufi
	13/01/15	perbaiki LEM. bagian Bab II, sel & pedoman	Shufi

Catatan: Jarak yang masih harusnya dengan meeting-masing pembimbing minimal 1 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 4 kali) setiap minggu.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PASIAF DOSEN
		- Perbaiki Bab I LBM dan lengkapi lebih detail program yang relevan	Shufi
		perbaiki Bab I dan lengkapi lebih detail yang relevan	Shufi
		Perbaiki Bab II dan lengkapi lebih detail yang relevan	Shufi
		perbaiki Bab II dan lengkapi lebih detail yang relevan	Shufi

Catatan: Jarak yang masih harusnya dengan meeting-masing pembimbing minimal 1 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 4 kali) setiap minggu.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PABAF DOSEN
	6/4	Bab II tulis - Bab II Rumpuh - Bab II bentuk - Informasi team - yang sudah selesai - bulat ke semester - Perbaiki question	af
	7/4	perbaiki question	af
	16/5	Ace Seminar Silahkan kerjakan ke P6	af
	16/5	Ace Seminar	af

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (lima dengan 2 pembimbing dan dua kali tetap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PABAF DOSEN
		- latar belakang, tersedia buku - Perbaiki kesomer	af
	10/8-15	Ace Turn lapang	af
	13/8-15	Revisi kesomer	af
	14/8-15	Ace setelah selesai	af
	14/8-15	LCC	af
	29/10	tambahan analisis (hasil wawancara yg dilakukan) / mempresentasikan pembahasan pangusian statistik (validasi + reliabilitas) dilakukan saat itu langsung respond	af

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (lima dengan 2 pembimbing dan dua kali tetap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PADA DOSEN
	3/11-15	<p>Acc draft STAFSI wujukan ke PB II</p> <p>- Bertindak sebagai waduk - Pembaca & pengira</p> <p>Acc Stdy</p>	<p>Sumi</p> <p>of / of</p>

Contoh: Mula-mula saya akan melakukan dengan menggunakan perisian 1 kali (saya dengan 2 perisian) tetapi 1 kali saya tidak.

Orangman, 30/11/2015, hal 62

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PADA DOSEN

Contoh: Mula-mula saya akan melakukan dengan menggunakan perisian 1 kali (saya dengan 2 perisian) tetapi 1 kali saya tidak.

Orangman, 30/11/2015, hal 62